

INOVASI BAYAR PAJAK DENGAN SAMPAH SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DI KOTA MOJOKERTO

(Studi Pada Badan Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

AHMADI

NIM. 145030101111124



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2018

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 3 Mei 2018

Waktu : 08.15 – 09.15 WIB

Skripsi Atas Nama : Ahmadi

Judul : Inovasi Bayar Pajak Dengan Sampah Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Di Kota Mojokerto

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Drs. Abdul Wachid, M.AP
NIP. 19561209 198703 1 008

Anggota



Nurjati Widodo, S.AP, M.AP
NIP. 2012018 30129 1 001

Anggota



Drs. Sukanto, MS
NIP. 19591227 198601 1 001

Anggota



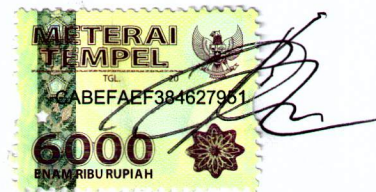
Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D
NIP. 19691205200501 1 003

PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang 26 Maret 2018



Nama: Ahmadi
Nim: 145030101111124

RINGKASAN

Ahmadi, 2018, **Inovasi Bayar Pajak Dengan Sampah Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Mojokerto** (Dan Studi Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Dan Aset), Drs. Abdul Wachid, MAP dan Nurjadi Widodo, S.AP,.M.AP, 156 Hal + xv

Program bayar pajak merupakan program yang ditujukan untuk mempermudah dan meringankan pembayaran pajak bagi para wajib pajak di Kota Mojokerto, dimana pembayaran pajak dilakukan melalui bank sampah dengan mengumpulkan sampah terlebih dahulu secara bertahap. Pembayaran pajak melalui bank sampah dengan modal sampah merupakan bentuk perluasan akses pembayaran pajak pajak bumi dan bangunan perkotaan, dan hal tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah Kota Mojokerto untuk meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan perkotaan, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan program bayar pajak dengan sampah sebagai upaya meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan perkotaan di Kota Mojokerto dan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat inovasi bayar pajak dengan sampah sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan di Kota Mojokerto.

Penelitian ini menggunakan studi kasus tunggal yang digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis inovasi bayar pajak dengan sampah sebagai upaya meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan perkotaan, wawancara dilakukan dengan kabid pendataan BPPKA, Kasubid pendataan dan penetapan BPPKA, staff bidang penetapan dan penataan DLH, masyarakat yang mengikuti program bayar pajak dengan sampah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi bayar pajak pakai sampah sebagai upaya meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan perkotaan telah menunjukkan ciri atau atribut inovasi, diataranya adalah adanya Relative Advance, Combatibility, Complexity, Triability, Observability, dan faktor pendukung dalam inovasi bayar pajak dengan sampah terdiri dari keberadaan pemimpin dan pihak terkait seperti DLH dan bank sampah, harga sampah lebih mahal, keberadaan bank sampah, dan hadiah umroh gratis bagi yang melunasi pembyaran pajak pakai sampah sebelum tanggal 19 juni atau hari jadi pemerintah kota, faktor penghambat terdiri dari kurangnya respon masyarakat, keberadaan bank sampah tidak merata.

Kata Kunci: Inovasi Pembayaran Pajak, Sampah, Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan

SUMMARY

Ahmadi, 2018, **Innovation Pay Taxes With Waste as Efforts to Increase Land and Building Tax Revenues In Mojokerto City** (And Study On Income And Asset Management Agency), Drs. Abdul Wachid, MAP and Nurjadi Widodo, S.AP, .M.AP, 156 Hal + xv

Taxpayer program is a program intended to facilitate and ease tax payment for the taxpayers in Mojokerto City, where the tax payment is done through the garbage bank by collecting garbage first in stages. Tax payment through garbage bank with garbage capital is a form of expanding access to tax payment of land tax and urban building, and it is one step of government of Mojokerto City to increase tax income of earth and urban building. This research aim to analyze and describe tax pay program with garbage as an effort to increase tax income of earth and urban building in Mojokerto City and to analyze factor of supporting and inhibiting innovation pay tax with garbage as an effort to increase Income Tax of Land and Urban Building in Mojokerto City.

This study uses a single case study used to describe and analyze tax pay innovation with waste as an effort to increase tax revenue of the earth and urban buildings, the interview is done with the data of BPPKA, Kasubid data collection and establishment of BPPKA, DLH establishment and arrangement staff, pay tax program with garbage.

The results of this study indicate that the innovation of tax-consuming waste as an effort to increase tax revenue of the earth and urban buildings has shown the characteristics or attributes of innovation, including the existence of Relative Advance, Combatibility, Complexity, Triability, Observability, and supporting factors in innovation pay taxes with garbage consisting of the presence of leaders and related parties such as DLH and garbage bank, the price of more expensive garbage, the existence of garbage bank, and free umroh prize for those who pay the waste tax use before 19 June or anniversary of city government, obstacle factor consists of the lack of public response , the existence of uneven garbage bank.

Keywords: Tax Payment Innovation, Waste, Land Tax and Urban Building

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, Alhamdulillah. Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Inovasi Bayar Pajak Pakai Sampah Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan (studi pada badan pengelolaan pendapatan keuangan dan aset Kota Mojokerto) telah selesai, dan penulis dapat menyelesaikan dengan baik.

Skripsi ini sebagai pemenuhan untuk mendapatkan gelar sarjana Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu yang tak henti hentinya memberikan dukungan dan doa selama pengerjaan skripsi berlangsung
2. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Drs. Andy Fefta Wijaya MDA, Ph.D Selaku kajur Ilmu Administrasi Publik
4. Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D_selaku kepala Prodi Ilmu Administrasi Publik
5. Drs. Abdul Wachid, M.AP selaku ketua dosen pembimbing skripsi yang memberikan banyak masukan pada saat pengerjaan skripsi berlangsung

6. Nurjati widodo, S,AP., M.Si. Selaku anggota dosen pembimbing skripsi yang telah mendorong dan juga banyak memberikan masukan dalam mengerjakan skripsi
7. Drs. Siti Nur Komarijati m.kes selaku Kasubag Pendataan dan Penetapan di BPPKA Kota Mojokerto
8. Alfaini Yahya selaku kabid pendataan di BPPKA Kota Mojokerto
9. Bapak Edi selaku staff bidang penataan dan penataan dinas lingkungan hidup Kota Mojokerto
10. Masyarakat kota mojokerto khususnya dilingkungan suromulang, kedungkwali, dan magersari yang telah bersedia memberikan informasi terkait dengan skripsi ini.
11. Teman teman yang telah memberikan masukan dalam mengerjakan skripsi

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan

Malang 15, Maret 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|-------------|
| MOTTO | i |
| PERSETUJUAN SKRIPSI..... | ii |
| ORISINALITAS SKRIPSI..... | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| RINGKASAN | vi |
| SUMMARY | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xv |

BAB 1 PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 15 |
| C. Tujuan Penelitian | 16 |
| D. Kontribusi Penelitian..... | 16 |
| E. Sistematika Penelitian | 17 |

BAB II Kajian Pustaka

A. Keuangan daerah

| | |
|---------------------------------|----|
| 1. Konsep keuangan daerah..... | 20 |
| 2. Pendapatan asli daerah | 22 |

B. Pajak

| | |
|--|----|
| 1. Pengertian pajak | 23 |
| 2. Fungsi pajak | 24 |
| 3. Cara memunggut pajak | 26 |
| 4. Jenis Pajak..... | 26 |
| 5. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan | 28 |

C. Inovasi

| | |
|--|----|
| 1. Pengertian inovasi | 30 |
| 2. Atribut Inovasi | 32 |
| 3. Siklus dan Pengembangan inovasi | 34 |
| 4. Tipologi Inovasi | 37 |
| 5. Level Inovasi | 38 |
| 6. Faktor Pendukung Inovasi | 39 |
| 7. Faktor Penghambat Inovasi | 44 |

D. Pelayanan Publik

| | |
|--------------------------------------|----|
| 1. Pengertian pelayanan publik | 47 |
| 2. Inovasi pelayanan publik | 48 |
| 3. Prinsip pelayanan publik | 49 |

E. Sampah

| | |
|--|----|
| 1. Pengertian Sampah | 51 |
| 2. Sumber sampah | 51 |
| 3. Jenis sampah | 53 |
| 4. Program bayar pajak dengan sampah | 54 |

BAB III Metode Penelitian

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Jenis penelitian | 55 |
| B. Fokus Penelitian | 56 |
| C. Lokasi dan situs Penelitian | 58 |
| D. Sumber Data | 58 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 60 |
| F. Instrumen Penelitian | 64 |
| G. Analisis Data | 65 |
| H. Keabsahan data | 68 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran umum Kota Mojokerto

| | |
|---|----|
| a. Letak geografis Kota Mojokerto | 72 |
| b. kependudukan | 74 |
| c. Perekonomian | 76 |
| d. Visi misi Kota Mojokerto | 78 |

2. Gambaran Umum BPPKA

| | |
|--|----|
| a. Profil BPPKA Kota Mojokerto | 79 |
| b. Struktur organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset | 80 |
| c. Tugas Pokok dan Fungsi | 81 |
| d. Visi dan Misi BPPKA Kota Mojokerto | 86 |

B. Penyajian data

1. Inovasi Bayar Pajak pakai sampah sebagai upaya meningkatkan pendapatan pajaka bumi dan bangunan perkotaan

| | |
|------------------------------------|----|
| a. <i>Relative Advantage</i> | 88 |
| b. <i>Compatibilit</i> | 91 |
| c. <i>Complexity</i> | 95 |
| d. <i>Triability</i> | 97 |
| e. <i>Observability</i> | 99 |

2. Faktor pendukung dan penghambat invasi bayar pajak pakai sampah sebagai upaya meningkatkan PBB perkotaan

| | |
|--|-----|
| a. Faktor pendukung | 100 |
| 1. Peran Pemimpin dan pihak pihak terkait (DLH dan Bank Sampah) | 100 |
| 2. Keberadaan Bank Sampah | 106 |
| 3. Harga Sampah Lebih Mahal | 111 |

| | |
|--|------------|
| 4. Hadiah Umroh/Wisata Religi Gratis | 114 |
| 5. Peningkatan PBB Perkotaan | 116 |
| b Faktor penghambat..... | 120 |
| 1. Kurangnya respon masyarakat..... | 120 |
| 2. Masih banyak bank sampah yang baru berdiri | 123 |
| C. Analisis data | |
| 1. Inovasi Bayar Pajak pakai sampah sebagai upaya meningkatkan pendapatan pajaka bumi dan bangunan perkotaan di Kota Mojokerto | 126 |
| a. <i>Relative Advantage</i> | 126 |
| b. <i>Compatibilit</i> | 129 |
| c. <i>Complexity</i> | 133 |
| d. <i>Triability</i> | 137 |
| e. <i>Observability</i> | 140 |
| 3. Faktor pendukung dan penghambat inovasi bayar pajak dengan sampah sebagai upaya meningkatkan PBB Perkotaan di Kota Mojokerto | |
| a. Faktor pendukung | 142 |
| b. Faktor penghambat..... | 145 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 147 |
| B. Saran..... | 151 |
| DAFTAR PUSTAKA | 152 |
| LAMPIRAN..... | 156 |

DAFTAR TABEL

| No | Judul | halaman |
|----|---|---------|
| 1 | Tabel 1. Data Target Penerimaan Dan Realisasi Penerimaan PBB Perkotaan Tahun 2011-2014 | 9 |
| 2. | Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Mojokerto Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin..... | 75 |
| 3 | Tabel 3. Rumusan Strategi dan arah kebijakan <i>BPPKA</i> | 87 |
| 4. | Tabel 4. Daftar Seluruh Bank Sampah Tahun 2017 | 107 |
| 5. | Tabel 5. Target dan realisasi penerimaan PBB Kota Mojokerto tahun 2014-2017 | 117 |
| 6 | Tabel 6 Rekapitulasi Penerimaan Pajak Pbb Dari Bank Sampah Tahun 2017 | 118 |
| 7 | Tabel 7. Rekapitulasi Jumlah Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Pakai Sampah..... | 122 |
| 8 | Tabel 8. Bank sampah aktif 2017..... | 124 |
| 9 | Tabel 9. Perbandingan sebelum dan sesudah adanya program bayar dengan sampah | 131 |

DAFTAR GAMBAR

| No | Judul | Halaman |
|-----|---|---------|
| 1. | Gambar 1. Diagram komposisi PAD kabupaten atau kota di Indonesia Tahun 2016 | 6 |
| 2. | Gambar 2. Diagram Perbandingan Penerimaan PBB-P2 Sebelum dan Setelah pengalihan | 7 |
| 3. | Gambar 3. Perbandingan Pembayaran Pajak PBB dengan sampah Dan pembayaran pajak PBB tidak dengan sampah Tahun 2017 | 14 |
| 4. | Gambar 4. Siklus pengembangan inovasi | 36 |
| 5. | Gambar 5. Faktor Penghambat inovasi | 45 |
| 6. | Gambar 6. Model Analisis Data Creswell..... | 66 |
| 7. | Gambar 7. Peta Kota Mojokerto | 72 |
| 8. | Gambar 8. Perbandingan luas wilayah menurut kecamatan di Kota Mojokerto | 73 |
| 9. | Gambar 9. Struktur organisasi BPPKA Kota Mojokerto | 80 |
| 10. | Gambar 10. Mekanisme Pembayaran Pajak Dengan Sampah | 93 |
| 11. | Gambar 11. Wali Kota Mas'ud Yunus menimbang sampah di bank Sampah..... | 102 |
| 12. | Gambar 12. Pembayaran Pajak PBB dengan sampah Melalui Mobil Keliling Pajak | 103 |
| 13. | Gambar 13. Iklan Program Bayar Pajak Dengan Sampah | 105 |
| 14. | Gambar 14. Daftar Harga Jual Sampah..... | 113 |
| 15. | Gambar 15. Penerima Hadiah Umroh Gratis Dari Pembayaran Pajak Dengan Sampah Tahun 2017 | 115 |

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah membutuhkan sebuah pembiayaan yang tidak sedikit, sehingga dalam menjalankan penyelenggaraan tersebut dapat menguras banyak anggaran untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang sudah menjadi kewajibanya. Kemampuan dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah diharuskan dilakukan secara mandiri, termasuk kemandirian dalam pengelolaan keuangan yang sudah menjadi konsekuensi dari diberlakukanya otonomi daerah, untuk melaksanakan wewenang yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien sebagai pendukung dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka pemerintah daerah diberikan sumber-sumber pembiayaan atau pemasukan bagi daerah oleh pemerintah pusat untuk membiayai berbagai aktifitas di daerah.

Sumber keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran daerah diantaranya adalah pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah lainnya. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah merupakan kewenangan yang secara finansial mampu menyedot banyak anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, “maka dari itu untuk mengimbangi aktivitas tersebut diperlukan

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang berguna untuk membiayai tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya” (Halim dan Mujib, 2009:27).

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan sebuah bentuk dukungan pendanaan kepada pemerintah daerah atas penyerahan kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Halim dan Mujib, 2009:56). Semakin luas urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah semakin luas pula fungsi yang harus dilaksanakan, semakin luas fungsi, semakin dibutuhkan dana pembayaran yang besar (Djaenuri, 2014:40), maka diperlukan sumber keuangan daerah yang besar untuk dapat membiayai berbagai urusan yang berada di daerah, karena keuangan merupakan sumber utama bagi bergerak atau tidaknya roda pemerintahan khususnya untuk pemberian layanan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga keberadaanya diperlukan perhatian khusus agar keberadaanya tidak menjadi penghambat dalam membiayai pembangunan dan aktivitas penyelenggaran di pemerintah daerah. Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan memberikan kesempatan kepada daerah otonom untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara untuk meningkatkan nilai tambah bagi penyelenggraan pemerintahan, pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan, menurut Djaenuri (2014:42-43).

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, maka pemerintah suatu negara pada hakikatnya

mengembangkan fungsi utama, yakni fungsi alokasi yang meliputi, antara lain sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat; fungsi distribusi, antara lain pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan; dan fungsi stabilitas, antara disparitas antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, baik pembiayaan yang menyangkut pembiayaan operasional organisasi pemerintahan, pengeluaran belanja pegawai, dan pengeluaran untuk membiayai proyek pembangunan dibiayai dari dana pendapatan asli daerah meskipun nanti pemerintah pusat memberikan dana kepada pemerintah daerah. Dalam kerangka desentralisasi keuangan, maka dalam rangka meningkatkan kapasitas keuangan, pemerintah daerah membutuhkan peningkatan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil keuntungan perusahaan daerah, dan lain lain pendapatan yang sah, melakukan pinjaman, mengembangkan harta kekayaan milik daerah. (Djaenuri 2014:64).

Kebutuhan pemerintah daerah akan sumberdaya keuangan merupakan kebutuhan yang paling mendesak untuk disegerakan, karena keuangan daerah mempunyai posisi tawar tinggi sehingga sangat diperlukan untuk mendukung pembiayaan daerah, agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Mengingat banyaknya kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, membuat pemerintah daerah harus berupaya untuk secara mandiri dalam hal pembiayaan di daerah dengan baik karena pemerintah sudah memberikan kewenangan mengelola sumber sumber yang dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dibagian penjelasan umum tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dijelaskan bahwa pemerintah daerah diharapkan mampu untuk mengelola keuangan sendiri dan membiayai kegiatan yang ada di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pendapatan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pada periode tahun bersangkutan. Adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, memberikan gambaran bagaimana sebuah daerah supaya mampu mengelola dengan maksimal sumber pendapatan yang terkandung dalam daerah untuk dijadikan sumber pembiayaan bagi daerah agar mampu membiayai segala urusan pemerintahan yang berada di daerah dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan potensi daerah, dengan begitu akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah dalam mendapatkan dana.

Sumber penerimaan daerah yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, dan lain-lain PAD yang sah. Sumber dari pendapatan asli daerah salah satunya berasal dari sektor pajak yang merupakan salah satu sumber terpenting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan daerah, salah satu sektor penting sebagai sumber PAD adalah pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan,

hal tersebut dijelaskan didalam point c *considerans* Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pajak merupakan iuran wajib bagi masyarakat dimana dalam pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah berdasarkan peraturan perundang undangan guna membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (Resmi, 2014:2), maka dari itu untuk mewujudkan pembangunan dalam daerah dibutuhkan sumber finansial guna membiayai berbagai aktifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dari itu agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terlaksana dengan hasil akhir adalah kesejahteraan masyarakat, adalah dengan cara memaksimalkan penerimaan sektor pajak, untuk mewujudkannya dapat dilakukan melalui sektor pajak daerah salah satunya adalah sektor pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2).

Komposisi dari pendapatan asli daerah merupakan sektor paling mendominasi dalam APBD tahun 2016 Kabupaten/Kota di Indonesia adalah dari sumber pajak daerah, kemudian disusul dengan lain lain PAD yang sah, retribusi daerah, dan yang terakhir adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan , sesuai pada gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram komposisi PAD kabupaten atau kota di Indonesia Tahun 2016

Sumber: Kemendagri 2016

besarnya komposisi pajak daerah menunjukkan bahwa sektor pajak sangat penting bagi pemerintah daerah karena menyumbang nilai yang besar dari sektor pajak lainnya.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sebuah kesempatan bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan daerahnya, karena undang undang tersebut, pajak bumi dan bangunan yang semula dikuasai oleh Pemerintah Pusat kemudian diserahkan kepada daerah memberikan peluang kepada daerah untuk dapat menambah kapasitas keuangan untuk membayai penyelenggaraan dan pengeluaran pemerintah,

Pengelolaan pajak bumi dan bangunan dikuasi oleh pemerintah pusat dengan dengan hasil yang dikembalikan kepada pemerintah daerah sebesar 64.08%, karena pengelolaan pajak pada waktu itu masih dikelola oleh Pemerintah Pusat, namun setelah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah

dan retribusi daerah berlaku, penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah sebesar 100%, pengalihan pengelolaan pajak bumi dan bangunan tersebut maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) (Direktorat Jenderal Pajak, 2012). Perbedaan penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan sebelum dan sesudah Undang-undang pajak dan retribusi daerah dapat dilihat pada gambar 2 sebagai berikut:



Gambar 2. Diagram Perbandingan Penerimaan PBB-P2 Sebelum dan Setelah pengalihan

Sumber: Direktorat Jendral Pajak 2012.

Berdasarkan gambar 2 diatas, Besarnya porsi yang didapat oleh pemerintah daerah terkait dengan hasil pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan membuat semakin bertambahnya salah satu dari sumber pendapatan asli daerah. Besarnya potensi dari sektor pajak bumi dan bangunan perlu

dimaksimalkan keberadaanya untuk digunakan sebagai alat pembiayaan berbagai aktifitas di daerah, oleh karena itu, diperlukan sebuah cara untuk memaksimalkan sumber sumber pendapatan dalam rangka membiayai berbagai aktivitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka pemerintah daerah perlu melakukan sebuah inovasi untuk memaksimalkanya sumber keuangan di daerahnya, karena dengan inovasi sesuatu yang awalnya memiliki nilai rendah dalam sisi kemanfaatan menjadi lebih tinggi dan memiliki kemanfaatan yang luas dalam masyarakat dan organisasi, hal tersebut guna mendukung penyelenggaraan pemerintah agar tetap berjalan dengan baik.

Organisasi sektor publik mempunyai tugas untuk melayani kepentingan masyarakat luas, dan itu merupakan kewajiban organisasi pelayanan masyarakat. Disamping tugas melayani masyarakat, organisasi sektor publik juga tidak lepas dengan sebuah permasalahan, baik itu malah internal dan eksternal organisasi, Keberadaan inovasi di dalam organisasi publik merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di organisasi dan inovasi juga dapat mengefektifkan peran dan kinerja organisasi, oleh karena itu inovasi menjadi kunci strategis keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Thomas L. Friedman (2006) yang dikutip oleh Tim Pusat Inovasi Tata Pemerintahan dalam buku Hanbook Inovasi Administrasi Negara (2014:42) mengatakan bahwa “sebenarnya dunia ini datar dan kesejahteraan akan mudah berpindah kenegara yang berinovasi”. Dengan kata lain negara ataupun daerah yang kurang menjadikan inovasi sebagai arus utama dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mensejahterakan masyarakat maka bisa dikatakan bahwa negara itu sedang

menuju kemunduran dari segi daya saing dengan negara lain atau daerah lain, sehingga posisi inovasi menjadi sangat penting untuk dijadikan pendorong kemajuan sebuah organisasi sebuah negara ataupun dalam lingkup pemerintah daerah.

Pemungutan pajak di Kota Mojokerto dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2013 atas dasar peraturan daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 tentang pajak daerah setelah diterbitkannya surat keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-694/PK/2010 tentang persetujuan pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tahun 2013 oleh direktorat jendral perimbangan keuangan,

Kota Mojokerto dari sisi penerimaan sektor pajak bumi dan bangunan perkotaan memiliki pencapaian cukup baik dalam perkembangannya, dari penelitian yang dilakukan oleh Deny Novadan dalam jurnal ilmu dan riset akutansi Tahun 2015 menunjukkan target dan realisasi dari sektor pajak bumi dan bangunan perkotaan, sesuai pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Data Target Penerimaan dan realisasi Penerimaan PBB perkotaan Tahun 2011-2014 Kota Mojokerto

| Tahun | Target penerimaan | Realisasi penerimaan | Petumbuhan % |
|----------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 2011 | 4.934.647.403,00 | 5.184.546.932,00 | - |
| 2012 | 3.669.408.681,00 | 5.421.024.640,00 | 4,56 |
| 2013 | 4.850.000.000,00 | 5.468.686.486,00 | 0,88 |
| 2014 | 5.100.000.000,00 | 5.838.447.077,00 | 6,76 |
| Rata-rata laju pertumbuhan | | | 4,07 |

Sumber: Jurnal Ilmu Dan Riset Akutansi Tahun 2015 (Denny Novadan)

Tabel 1. diatas menunjukkan bahwa realisasi pencapaian penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan dari target penerimaan setiap tahunnya, dan hal tersebut tidak lepas dari strategi pemungutan pajak oleh BPPKA seperti: percepatan penyediaan pranata hukum; penyediaan sistem administrasi perpajakan modern; bekerjasama dengan instansi pemerintah lainnya; bimbingan teknis petugas pemungut PBB perkotaan; pembayaran online; dan pembinaan kepada masyarakat.

Peningkatan pajak tidak lepas dari kesadaran para wajib pajak yang menunaikan kewajiban membayar pajaknya, realisasi pembayaran wajib pajak di Kota Mojokerto pada tahun 2013 dan 2014 dalam jurnal akuntansi dan riset yang ditulis oleh Denny Novadan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak, pada tahun 2013 jumlah wajib pajak sebesar 41.193 dan realisasi pembayaran sebesar 26.664 wajib pajak, sedangkan tahun 2014 jumlah wajib pajak sebanyak 42.032 dan realisasi pembayaran wajib pajak sebesar 28.610 wajib pajak.

Pemungutan pajak di Kota Mojokerto yang cukup beragam terutama dalam hal tempat pembayaran pajak menunjukkan bahwa pemerintah kota Mojokerto memberikan kemudahan dan beragam pilihan kepada para wajib pajak di Kota Mojokerto dalam hal pembayaran pajak bumi dan bangunan, hal tersebut diharapkan dapat menarik minat masyarakat dalam membayar pajak karena akses pembayaran sudah cukup beragam, sehingga PBB dapat meningkat.

Pemerintah Kota Mojokerto dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan daerah dari sektor PBB perkotaan. Pemerintah Kota Mojokerto

membuat sebuah terobosan yaitu inovasi pembayaran pajak bumi dan bangunan pakai sampah melalui bank sampah, dimana sampah yang tidak berguna dan tidak memiliki kemanfaatan kemudian dirubah agar sampah memiliki nilai jual dengan mengelola sampah terlebih dahulu dengan cara dipilah antara sampah organik dan anorganik yang memiliki nilai jual, sehingga sampah mempunyai nilai ekonomis yang bisa dimanfaatkan untuk membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan di Kota Mojokerto.

Sampah memang tidak lepas dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia, Menurut Notoatmodjo (2007:87) sampah merupakan sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai oleh manusia dan dibuang. Artinya sampah adalah bahan buangan tidak terpakai yang belum memiliki nilai ekonomis, oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sampah yang memandang bahwa sampah dapat dijadikan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan (Djohan dan Halim, 2013:210). Dalam pelaksanaan program bayar pajak dengan sampah adalah dengan memilah dahulu antara sampah plastik dan sampah organik kemudian dijual ke bank sampah yang terdapat di seluruh RT atau RW diseluruh Kota Mojokerto untuk ditukarkan dengan uang untuk mebayar pajak artinya sampah keberadaan sampah berubah dan memiliki nilai ekonomis. Munculnya inovasi bayar pajak pakai sampah merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak bumi dan bangunan.

Masyarakat sebagian masih mempunyai padangan bahwa sampah sebagai bahan yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan,

selain itu masyarakat dalam mengelola sampah masih mempunyai pendekatan akhir, dimana sampah yang ada dikumpulkan diangkut, kemudian dibuang tanpa melalui proses pemilahan terlebih dahulu. Fenomena baru program bayar pajak pakai sampah Pemerintah Kota Mojokerto memberikan perubahan pada sisi pengelolaan sampah pada lingkungan masyarakat, dimana saat ini pengelolaan sampah hanya bertumpu pada pemerintah saja, dengan adanya inovasi ini, sistem pengelolaan sampah dirubah dimana masyarakat dituntut dapat mengelola sampah secara mandiri dari skala rumah tangga, kemudian disinergikan dengan bagaimana sampah bisa digunakan untuk mendorong peningkatan pemasukan pajak PBB.

Inovasi bayar pajak dengan sampah mencoba merubah sampah menjadi modal utama pembayaran pajak, Pembayaran pajak pakai sampah dilakukan oleh masyarakat mulai bulan januari sampai akhir jatuh tempo pada akhir bulan November, menjual sampah kemudian hasil dari penjualan sampah ditabung untuk digunakan membayar pajak, adapun mekanisme masyarakat yang ingin membayar pajak dengan sampah sebagai berikut:

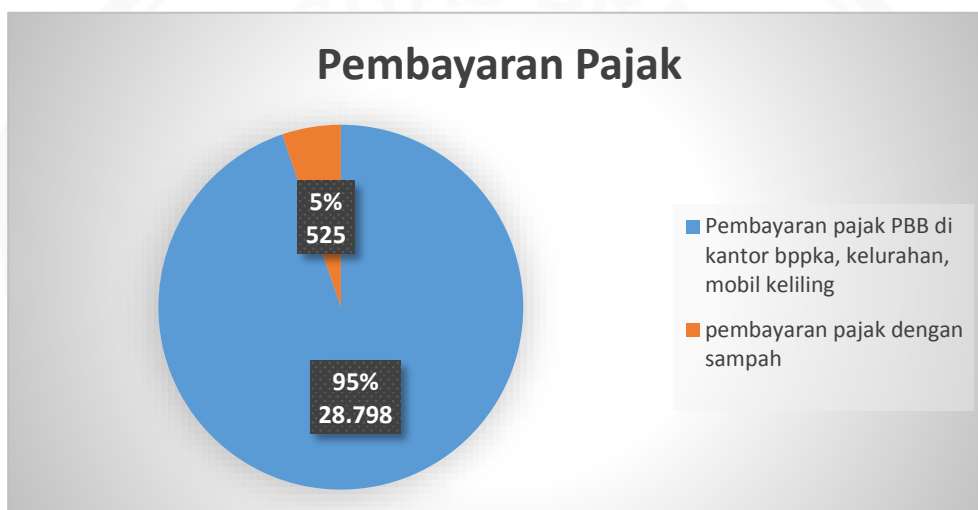
1. Masyarakat mendaftarkan diri sebagai Nasabah bank sampah yang ada di kelurahan RT/RW terdekat kemudian dikasih buku tabungan sampah.
2. Setelah terdaftar menjadi anggota bank sampah, masyarakat mulai dapat membayar pajak dengan cara menjual sampah ke bank sampah terdekat dan uang hasil dari penjualan sampah di ditabung secara berkala.
3. Diakhir periode hasil dari dari sampah yang dijual dipotong untuk digunakan membayar pajak sesuai dengan nominal yang ada di surat pemberitahuan pajak terutang.

4. Masyarakat diberi oleh pengurus bank sampah bukti pembayaran pajak asli dari Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset. (Sumber: BPPKA, diolah)

Inovasi bayar pajak pakai sampah mempunyai tujuan selain dapat meningkatkan atau mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak bumi dan bangunan, juga sebagai langkah pemerintah kota Mojokerto untuk menjadikan lingkungan Kota Mojokerto bersih dan sehat, dan sekaligus masyarakat juga menjadi teredukasi agar tidak membuang sampah sembarangan karena sampah itu memiliki nilai ekonomis. Dalam pelaksanaannya, program bayar pajak dengan sampah tidak dilakukan oleh satu pihak, namun inovasi ini merupakan sinergi program antara Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset dan Dinas Lingkungan Hidup Bank sampah induk selaku organisasi kemasyarakatan.

Program bayar pajak dengan sampah ini bakal mendorong penerimaan pajak (tribunnews.2016), pernyataan tersebut wajar karena inovasi tersebut memudahkan masyarakat dalam membayar pajak PBB, dan memberikan alternatif pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan baru bagi masyarakat dalam pembayaran pajak yang juga dapat dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset, kelurahan, bank jatim, mobil keliling, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak., dengan hanya mengumpulkan dan memilah barang tidak terpakai seperti plastik, kertas, kaca, botol dan sampah kering lainnya yang didapat atau dihasilkan dari sampah rumah tangga, pertokoan pajak bisa terbayarkan. Inovasi bayar pajak pakai sampah baru di *launching* pada 11 November Tahun 2016 dan baru bisa

dimanfaatkan oleh masyarakat pada awal bulan Januari 2017 sampai saat ini, Penyederhanaan sistem pembayaran pajak tersebut membuat masyarakat semakin antusias dalam membayar pajak terutama pajak bumi dan bangunan, munculnya Inovasi bayar pajak pakai sampah terbukti mampu menarik perhatian masyarakat, adapun dari data keseluruhan nasabah dari bank sampah di Kota Mojokerto yang mengikuti program bayar pajak pakai sampah pada tahun 2017, sesuai dengan gambar 2 sebagai berikut :



Gambar 3. Perbandingan Pembayaran Pajak PBB dengan sampah dan pembayaran pajak PBB tidak dengan sampah Tahun 2017

Sumber: BPPKA Kota Mojokerto 2017(diolah)

Data pembayaran pajak pada gambar 3 diatas menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak tahun 2017 di Kota Mojokerto yang melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan sebesar 28.798 atau sekitar 95 persen, dan wajib pajak yang membayar pajak bumi bangunan perkotaan pakai sampah sebesar 585 atau sekitar 5 persen wajib pajak, hal tersebut menunjukkan bahwa inovasi yang memiliki manfaat lingkungan dan *income* daerah tersebut mendapat sambutan baik dari masyarakat, inovasi bayar pajak pakai sampah membuat pembayaran pajak

bumi dan bangunan perkotaan tidak perlu mengeluarkan uang, cukup hanya dengan menjual sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, pertokoan, warung, perkantoran dan lain sebagainya pajak bisa terbayar.

Pembayaran pajak dengan sampah merupakan teknik baru sekaligus perluasan akses tempat pembayaran pajak, agar masyarakat semakin mudah dalam pembayaran pajak karena masyarakat diberikan banyak alternatif pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan hanya mengumpulkan sampah, sehingga dengan semakin beragamnya tempat realisasi pembayaran pajak PBB diharapkan dapat meningkat dan cepat terealisasi, dengan begitu pajak bumi dan bangunan perkotaan di Kota Mojokerto dapat meningkat dan terealisasi sesuai target wajib pajak yang sudah ditentukan, dari meningkatnya pendapatan PBB akan bermuara pada meningkatnya pendapatan asli daerah Kota Mojokerto yang merupakan salah satu sumber untuk membiayai berbagai aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Inovasi Bayar Pajak Dengan Sampah Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan di Kota Mojokerto”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Inovasi Bayar Pajak Dengan Sampah sebagai upaya meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan di Kota Mojokerto?

2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan inovasi bayar pajak pakai sampah sebagai upaya meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan perkotaan di Kota Mojokerto?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Inovasi Bayar Pajak Dengan Sampah Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan di Kota Mojokerto.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Inovasi Bayar Pajak Dengan Sampah Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Di Kota Mojokerto.

D. Kontribusi penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, kontribusi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Akademis
 - a. Dapat mempelajari dan menganalisis mengenai inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mojokerto dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan perkotaan.
 - b. Menambah referensi pustaka dan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya apabila ingin mengambil tema yang berkaitan tentang

inovasi bayar pajak dengan sampah sebagai upaya meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan perkotaan di Kota Mojokerto

2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi peneliti, menambah wawasan dalam hal pengaplikasian mengenai inovasi bayar pajak dengan sampah sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan perkotaan, serta bagian dari pemenuhan tugas akhir sebagai prasarat kelulusan sarjana SI.
- b. Bagi pemerintah khususnya dinas yang terkait dalam pelaksanaan dari inovasi bayar pajak dengan sampah sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan perkotaan, diharapkan karya penelitian ini dapat dijadikan masukan dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan inovasi bayar pajak pakai sampah serta sebagai cerminan kinerja yang dilakukan oleh dinas terkait.
- c. Bagi masyarakat, dapat dijadikan masukan mengenai inovasi yang selama ini berjalan sehingga dapat memberikan masukan kepada pemerintah agar kedepanya program dapat dilaksanakan dengan baik diwaktu mendatang.

E. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang Inovasi bayar pajak dengan sampah sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan perkotaan di kota

Mojokerto, dan juga menjelaskan mengenai rumusan masalah sebagai batasan penelitian yang berisikan bagaimana inovasi bayar pajak pakai sampah sebagai upaya meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan perkotaan di Kota Mojokerto, serta bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambatnya, tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis dari rumusan masalah, kontribusi penelitian ini dijukan khususnya pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, instansi terkait dan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini mengemukakan berbagai macam teori yang mendukung dalam penyusunan skripsi dari para ahli di bidangnya. beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah, keuangan daerah, pajak, inovasi, pelayanan publik, dan sampah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan metode metode yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian lapangan terkait dengan tema yang diangkat, sehingga penelitian dapat terarah dan akurat dalam melaksanakan penelitian, yang berisi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan

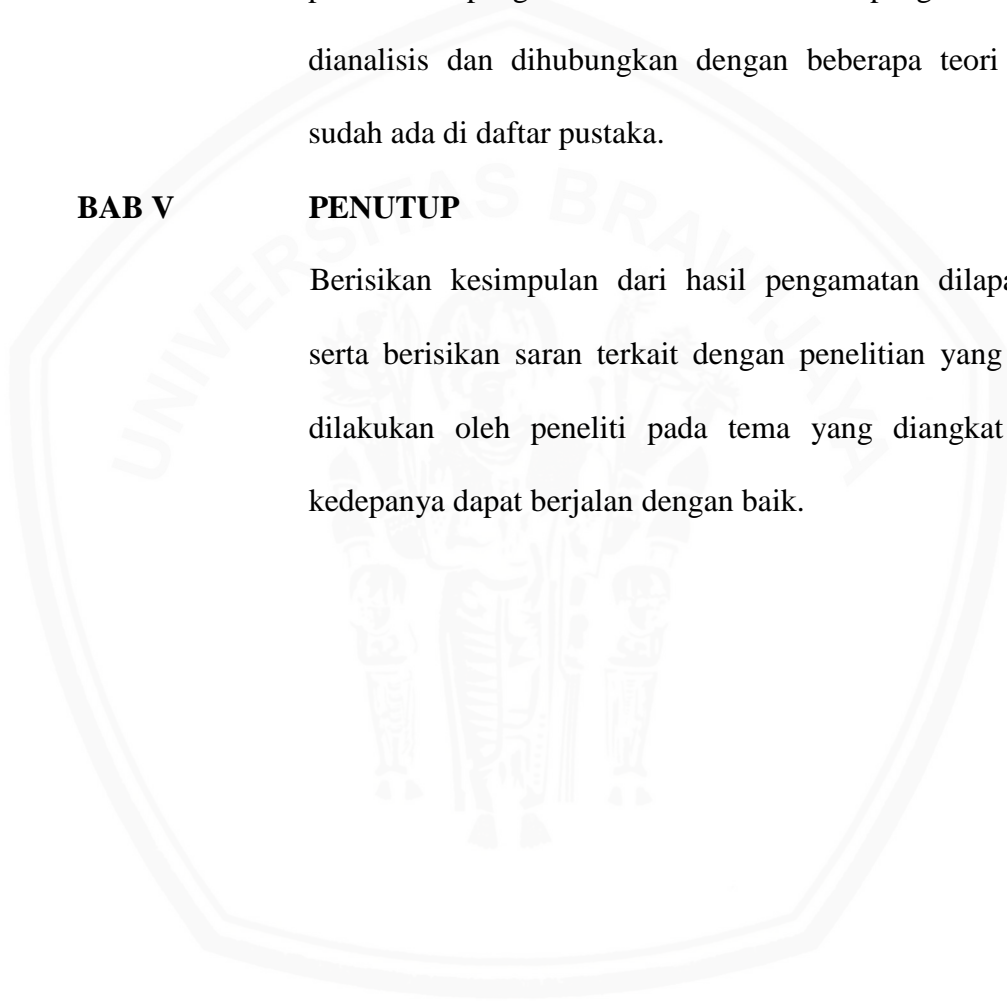
situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data, dan keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini bersikan penyajian data yang telah didapat oleh peneliti dilapangan kemudian data dari lapangan tersebut dianalisis dan dihubungkan dengan beberapa teori yang sudah ada di daftar pustaka.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dari hasil pengamatan dilapangan serta berisikan saran terkait dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada tema yang diangkat agar kedepanya dapat berjalan dengan baik.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Keuangan Daerah

1. Konsep Keuangan Daerah

Menjalankan pemerintahan dalam daerah tentu membutuhkan kapasitas keuangan daerah yang baik, dalam artian secara finansial dapat membantu penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pada bab 1 pasal 1 tentang pengelolaan keuangan daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, sedangkan menurut Memesah dalam Halim (2008:23-25) Pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak pihak lain sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah merupakan sumber kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah berdasarkan undang undang yang berlaku.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan melalui manajemen keuangan daerah yang baik, maksudnya adalah pemerintah daerah harus dapat mengelola keuangannya dengan maksimal, karena pengelolaan keuangan daerah

merupakan seluruh kegiatan dari proses perencanaan sampai pengawasan. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas pemerintah dalam membiayai pelaksanaan tugas tugas pemerintahan seperti pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Maka sumber penerimaan daerah menjadi penting untuk diperhatikan, karena kewenangan keuangan menjadi tanggung jawab daerah, sebagaimana yang dikutip oleh Mahmudi (2009:16), telah ditetapkan sumber sumber penerimaan daerah sebagai berikut:

1. Pendaptan Asli Daerah (PAD)
 - a. pajak daerah
 - b. retribusi daerah
 - c. bagian laba pengelolaa aset daerah yang dipisahkan
 - d. lain lain PAD yang sah
2. Transfer pemerintah pusat
 - a. bagi hasil pajak
 - b. bagi hasil sumber daya alam
 - c. dana alokasi umum
 - d. dana alokasi khusus
 - e. dana otonomi khusus
 - f. dana penyesuaian
3. transfer pemerintah provinsi
 - a. bagi hasil pajak
 - b. bagi hasil sumber daya alam
 - c. bagi hasil lainnya
 - d. Lain-lain pendapatan yang sah

Penetapan sumber-sumber penerimaan daerah yang jelas membuat kemampuan daerah dalam menyelenggarakan berbagai urusan di daerah semakin baik, karena didukung oleh sumber pembiayaan yang jelas. Banyaknya sumber yang didapat daerah membuat pemerintah daerah harus bisa mengotimalkan sebaik mungkin sumber sumber tersebut untuk keperluan yang bermanfaat bagi

pelaksanaan program program pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan aktifitas pemerintahan.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan yang berasal dari daerah yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah, Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 bab 1 pasal 1 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah mengartikan bahwa pendapatan asli daerah adalah “pendapatan yang diperoleh diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dalam Undang-undang 33 Tahun 2004 pasal 6 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menyebutkan sumber dari pendapatan asli daerah, terdiri dari : a. Pajak daerah b. Reribusi daerah c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan d. Lain-lain PAD yang sah.

Sumber sumber dari pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota) digunakan sebagai pembiayaan dalam daerah. Pengelolaan mulai dari pengadministrasian, penentuan tarif, pemungutan, regulasi penurunan dan peningkatan tarif pajak dilakukan oleh pemerintah daerah, wewenang tersebut sepenuhnya sudah diserahkan kepada pemerintah daerah tanpa ada ikut campur pemerintah pusat dalam hal pengelolaannya, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana bantuan dari pemerintah pusat, dan hal tersebut juga merupakan bentuk kemandirian daerah dalam mengelola sumber daya yang

terdapat di daerah secara mandiri dengan memperhatikan kemampuan daerahnya masing masing sehingga dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara efektif dan efisien.

B. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan elemen penting bagi pemerintah daerah yang didapat dari masyarakat, dimana pajak mempunyai posisi penting penyelenggaraan pemerintahan. Pengertian pajak menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan mengartikan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat”. Sedangkan pendapat lain menurut Adriani. A dalam Sari (2013:33-37) mengartikan pajak sebagai berikut:

“Turun masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak dapat prestasi kembali yang Langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Pengertian pajak dari pendapat ahli dan Undang-undang, sehingga pengertian pajak dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban warga negara tanpa terkecuali yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang, untuk membiayai aktifitas atau kegiatan dalam menjalankan

pemerintahan. Pembiayaan tersebut ditujukan bagi kepentingan masyarakat seperti memaksimalkan pajak untuk pembangunan dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Fungsi pajak

Fungsi pajak menyangkut bagaimana pajak itu digunakan sebagai pembiayaan dan sebagai instrumen pengatur perekonomian masyarakat. Menurut Rahayu dan Suharti (2010:3-4) umumnya dikenal dengan 2 macam fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*

a. Fungsi *budgetair*

Pajak memiliki fungsi *budgetair*, maksudnya adalah bahwa pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai berbagai aktifitas pemerintahan. Sebagai sumber keuangan pemerintah berusaha untuk memasukkan dana secara optimal ke dalam kas negara, dengan cara memungut pajak kepada masyarakat berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

b. Fungsi *regulerend*

Artinya pajak merupakan alat pengatur pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Disamping memasukkan uang ke kas negara, pajak dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk mengubah atau mengatur susunan pendapatan kekayaan dalam ranah swasta.

Fungsi pajak menurut Sari (2013:37-38) menjelaskan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi antara lain:

a. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal itu bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien

b. Fungsi distribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat

c. Fungsi demokrasi

Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud dari sistem gotong royong. fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

Pendapat ahli mengenai fungsi pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki fungsi yang penting untuk membiayai dan mendukung dari aspek finansial dari berbagai aktifitas yang ada di dalam pemerintah daerah, penyelenggaraan dari segi pemerintahan, kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat agar roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik dan tidak berhenti, oleh sebab itu eksistensi pajak dalam daerah harus dijaga dan dimaksimalkan dengan cara melakukan berbagai strategi atau inovasi dalam hal perpajakan di dalam daerah.

3. Cara Memungutan Pajak

Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah baik itu di lingkup pusat maupun daerah, dan pemungutan dilakukan dengan beberapa cara dan sudah diatur dalam undang undang yang berlaku. Menurut Rahayu dan Suharyati (2010:6-7) Ada 3 macam cara pemungutan pajak yaitu sistem fiktif, sistem nyata, dan sistem campuran, sebagai berikut:

- a. Sistem fiktif, penganan pajak didasarkan atas suatu anggapan yang sudah diatur dalam Undang-undang
- b. Sistem nyata, bahwa pengenaan pajak pada obyek yang nyata pada setiap akhir tahun, besaran pengenaan pajak dapat diketahui di akhir tahun pajak. Dimana setelah semua penghasilan yang didapat diketahui rincianya.
- c. Sistem campuran, pengenaan pajak didasarkan atas sistem fiktif dan sistem nyata. Bahwa penghasilan seseorang dianggap sama besarnya dengan pengasilan sesungguhnya dalam tahun lalu

4. Jenis pajak

Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, dimana sudah ditetapkan pajak apa saja yang sudah ditetapkan dan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hal itu terjadi karena adanya Undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah Nomor 28 Tahun 2009, terkait dengan siapa aktor pelaksana yang pemungut pajak, menurut Susyanti dan Dahlan (2015: 2-4) terkait dengan pengolongan pajak, secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Pajak Pusat (pajak negara)

Merupakan pajak yang dikuasi oleh pemerintah pusat sehingga hasilnya dimiliki oleh pemerintah pusat, sedangkan untuk yang mengelola adalah direktorat jendral pajak dan direktorat jenderal bea cukai dan dipungut dengan menggunakan sistem pemungutan *self assesment* mempunyai arti wajib pajak diberikan keleluasaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang dikenakan dan *withoulding system* yang mempunyai arti sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Menurut Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan 2012 menyebutkan bahwa pajak pemerintah pusat terdiri meliputi: 1. Pajak Penghasilan (PPh) 2. Pajak pertambahan nilai (PPN) 3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 4. Bea Materai 5. Pajak bumi dan bangunan (pajak bumi dan bangunan merupakan pajak pusat yang dialikan ke daerah mulai pada tahun 2010 namun apabila sampai 31 desember 2013 daerah (kabupaten/kota) belum menerbitkan peraturan mengenai pajak bumi dan bangunan maka pemungutan masih dilakukan oleh pemerintah pusat)

b. Pajak daerah

Pajak daerah merupakan objek pajak yang berada di daerah yang sudah menjadi kewenangannya sesuai Undang-undang, dipungut oleh pemerintah daerah (provinsi kabupaten atau kota) dan hasilnya masuk ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah. sistem yang dipakai dalam memungut pajak adalah dengan sistem pemungutan *official assesment system* yaitu pemungutan

yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besaran pajak dan *witholding system* yaitu dalam pemungutan memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besaran pajak.

Pajak pusat dan daerah memiliki perbedaan dari jenis pajak yang dikenakan, ada beberapa perubahan dalam kewenangan perpajakan antara pusat dan daerah, dimana pemerintah daerah mendapat tambahan jenis pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 bab 2 pasal 1, tentang pajak daerah dan retribusi daerah. jenis pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua, sebagai berikut :

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

5. Pajak Bumi dan Bangunan

Pengertian pajak bumi dan bangunan menurut Undang-undang Nomor. 28 tahun 2009 dibagian umum Nomor 37 tentang pajak daerah dan retribusi daerah mengartikan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah

pajak yang dikuasai atau dimiliki oleh seseorang yang berada di atas bumi baik yang bertempat di darat maupun perairan.

Bumi adalah tempat yang ada di permukaan bumi baik itu air dan tanah, dan bangunan adalah segala sesuatu yang didirikan diatas bumi yang termasuk masih dalam bangunan, menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 77 adalah seperti jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan menara. Sedangkan pengertian pajak bumi dan bangunan menurut oleh Tarigan (2013:283) pajak bumi dan bangunan memberikan keuntungan merupakan salah satu pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya

Pengertian pajak bumi dan bangunan yang telah dikemukakan oleh ahli dan perundang undangan dapat disimpulkan bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan pajak dikenakan atas bangunan atau tempat di atas bumi yang berdiri dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan keberadaanya dimanfaatkan untuk berbagai keperluan atau aktifitas, dan keberadaanya sangat penting bagi pemasukan Negara

Obyek yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan Menurut darwin (2010:135-136) adalah sebagai berikut :

- a. Objek yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan.
- b. Objek yang digunakan untuk melayani kepentingan umum seperti, tempat ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, yang kberadaa tidak untuk mencari keuntungan dalam penyelenggaraannya.
- c. Objek yang digunakan tempat pemakaman, peninggalan situs purbakala, dalam hal obyek kuburan masih perlu penjelasan yang lebih rinci.

- d. Objek yang merupakan hutan lindung, suaka alam, wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasi oleh pemerintah desa.
- e. Objek yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dari negara lain berdasarkan asas timbal balik.
- f. Objek yang tempatnya digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan.

Objek yang tidak dikenakan pajak merupakan objek yang memiliki posisi strategis yang memiliki kemanfaatan bagi masyarakat secara umum seperti pada bangunan pemerintahan dan fasilitas umum, karena tempat tersebut merupakan tempat yang memiliki kemanfaatan dan nilai bagi masyarakat dan negara, namun dengan syarat tidak mencari keuntungan semata

C. Inovasi

1. Pengertian inovasi

Inovasi merupakan hal baru yang diciptakan untuk memperbaiki dan mengefektifkan kinerja organisasi, dalam pelaksanaannya inovasi identik dengan segala sesuatu yang baru dan berbeda serta memiliki nilai lebih dari sebelumnya, sehingga pengertian inovasi memiliki beragam definisi. Menurut Ancok (2012) sebagaimana dikutip dalam buku Handbook Inovasi Administrasi Negara (2014:17), Inovasi merupakan “suatu proses memikirkan dan mengimplementasikan pemikiran tersebut, sehingga menghasilkan hal baru berbentuk produk, jasa, proses bisnis, cara baru, kebijakan, dan lain sebagainya, kemudian menurut O’Sullivan dan Dooley (2009:4) mengartikan inovasi adalah “proses membuat perubahan terhadap sesuatu yang telah mapan melalui introduksi suatu hal baru yang memberikan nilai tambah bagi konsumen”. Pengertian lain dikemukakan oleh Roger (1983) dalam Noor (2013:84) inovasi

adalah “perubahan yang direncanakan yang bertujuan untuk memperbaiki praktek praktek.” Pengertian lain juga di kemukakan oleh Oslo dalam Zuhail (2013:58) inovasi memiliki aspek yang luas karena dapat berupa barang maupun jasa, proses, metode pemasaran atau metode organisasi yang baru atau telah mengalami pembaharuan yang pernah dihadapi oleh organisasi dari beberapa perbedaan pengertian mengenai inovasi, menurut Noor (2013:87) perbedaan pemahaman mengenai inovasi tidak akan lepas dari:

1. Pengetahuan baru
Sebuah inovasi hadir sebagai sebuah pengetahuan baru bagi masyarakat dalam sebuah sistem sosial tertentu. Pengetahuan baru ini merupakan faktor penting penentu perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.
2. Cara baru
Inovasi juga dapat berupa sebuah cara baru bagi individu atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan atau menjawab masalah tertentu. Cara baru ini merupakan pengganti cara lama yang sebelumnya berlaku
3. Obyek baru
Sebab inovasi merupakan obyek baru bagi penggunanya, baik berbentuk fisik (*berwujud/tangible*), maupun yang tidak berwujud (*intangibile*).
4. Teknologi baru
Inovasi sangat identik dengan kemajuan teknologi. Banyak contoh inovasi yang hadir dari hasil kemajuan teknologi, indikator dari kemajuan dari sebuah produk teknologi yang inovatif biasanya dapat langsung dikenali dari fitur-fitur yang melekat pada produk tersebut
5. Penemuan baru
Hampir semua inovasi merupakan hasil dari penemuan baru. Sangat jarang ada kasus inovasi hadir sebagai sebuah kebetulan. Inovasi merupakan produk dari sebuah proses yang terpenuhnya bekerja dengan kesadaran dan kesengajaan (yogi,2007)

Perbedaan dalam mengartikan inovasi yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah sebuah ide atau gagasan pembaharuan dari cara lama ke cara baru untuk memperoleh kemanfaatan yang lebih besar melalui beberapa perubahan praktek dan kegiatan yang biasanya dilakukan kurang baik dan maksimal, baik perubahan dari internal maupun

eksternal organisasi dengan melakukan penyesuaian penyesuain agar memperoleh hasil yang maksimal.

2. Atribut Inovasi

Inovasi pada dasarnya memiliki sifat kebaharuan, dan sifat kebaharuan itu merupakan ciri dasar dari inovasi dalam menggantikan pengetahuan, cara, obyek, teknologi yang telah ada dan yang sudah berjalan sebelumnya. Pengertian inovasi meskipun cukup beragam, pengertian inovasi tidak memiliki kesepahaman dari para ahli, namun secara umum inovasi memiliki atribut, Menurut Roger sebagaimana yang dikutip oleh dalam Suwarno (2008:17) atribut inovasi terdiri dari, antara lain:

1. *Relative advantage* atau keunggulan Relatif

Sebuah inovasi yang diciptakan harus mempunyai keunggulan dan keunikan tersendiri sebagai ciri khas atau pembeda dari inovasi yang memang sudah ada sebelumnya

2. *Compability* atau kesesuaian

Sebuah inovasi mampu mempunyai sifat kesesuaian dengan inovasi yang telah diganti sebelumnya, artinya inovasi yang baru tidak serta merta mengganti seluruh tatanan inovasi yang lama, justru inovasi yang baru harus menyesuaikan dengan inovasi yang sudah ada sebelumnya. Karena bagaimanapun merubah seluruh tatanan inovasi yang lama selain membutuhkan waktu, juga biaya yang harus dipertimbangkan. Akan lebih baik

jika inovasi yang lama mejadi patokan untuk diperbaiki agar inovasi yang baru menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

3. *Complexity* atau kerumitan

inovasi merupakan hal baru yang dimunculkan untuk memperbaiki permasalahan yang belum bisa terselesaikan dengan cara yang sama, oleh karena itu inovasi identik dengan hal baru yang memang sudah ada sebelumnya namun diperbaiki dengan kemungkinan tingkat kerumitan yang sedikit lebih tinggi dari yang sebelumnya telah ada. Tingkat kerumitan pada inovasi yang muncul tidak menjadi permasalahan penting bagi sebuah inovasi, karena inovasi menyajikan dan menawarkan sesuatu yang lebih baik maka tingkat kerumitan dalam inovasi tidak terlalu penting.

4. *Triability* atau kemungkinan untuk dicoba.

Sebuah inovasi yang diciptakan mempunyai kemudahan untuk diujicoba kualitasnya untuk hal tersebut membuktikan bahwa inovasi yang diciptakan mempunyai keuntungan dan nilai lebih dari inovasi sebelumnya

5. *Observability* atau kemudahan untuk diamati.

Sebuah inovasi yang juga harus mempunyai kemampuan untuk diamati dari segi bagaimana inovasi tersebut berjalan untuk menghasilkan kemanfaatan.

Atribut inovasi merupakan dimensi dari berbagai pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli mengenai apa itu inovasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian inovasi tidak lepas dari keunggulan relatif yang menonjolkan kelebihan atau keuntungan dari inovasi, kesesuaian yang megambarkan apakah inovasi yang ada mempunyai kesesuaian dengan inovasi

yang terdahulu, kerumitan berisikan apakah ada sisi kerumitan ketika inovasi itu terimplementasi, kemungkinan untuk dicoba berisikan apakah ada uji coba sebelum inovasi diluncurkan, dan kemudahan untuk diamati dari sisi apakah bisa diamati dari sisi cara kerjanya.

3. Siklus dan Pengembangan Inovasi

Inovasi muncul karena merupakan jawaban dari permasalahan permasalahan yang timbul dalam atau luar organisasi atau memang inovasi muncul karena sebuah kebutuhan. Namun munculnya inovasi baik itu dari masalah atau memang kebutuhan akan inovasi, menurut Suwarno (2008:19-22) proses pengembangan inovasi yang melewati beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Kebutuhan atau masalah

Inovasi muncul dikarenakan adanya suatu masalah atau kebutuhan yang didalamnya menyangkut masyarakat atau organisasi, baik itu masalah yang terjadi pada saat ini ataupun dimasa yang akan datang guna mengantisipasi atau meminimalisir permasalahan.

2. Riset Dasar dan aplikatif

Inovasi sebagian besar muncul dari masalah dan kebutuhan, namun inovasi teknologi sebagian besar tercipta melalui riset dasar dikarenakan inovasi teknologi berhubungan dengan hal yang bersifat teknis yang tidak bisa berjalan apabila riset dasar tidak dilakukan terlebih dahulu, sedangkan untuk riset aplikatif berkaitan dengan inovasi yang sudah jadi dengan segala

kelengkapannya, untuk mengamankan hasil agar tidak digunakan sembarangan maka diperlukan hak cipta/paten, agar inovasi menjadi aman.

Pengembangan pada dasarnya adalah sebuah kegiatan untuk memperluas sebuah produk agar mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan produk lain, dalam hal inovasi, pengembangan inovasi merupakan proses untuk menjadikan sebuah inovasi agar berkembang dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan, karena pengembangan inovasi juga menjadi pembeda pada saat sebelum dan sesudah dikembangkan

3. Komersialisasi

Komersialisasi merupakan pemroduksian, pemasaran, pengemasan, pendistribusian sebuah produk inovasi untuk dikenalkan atau dijual kepada khalayak umum, agar inovasi mempunyai daya tarik maka diperlukan sebuah strategi agar khalayak umum mengetahui dan mau menerima produk inovasi yang dihasilkan

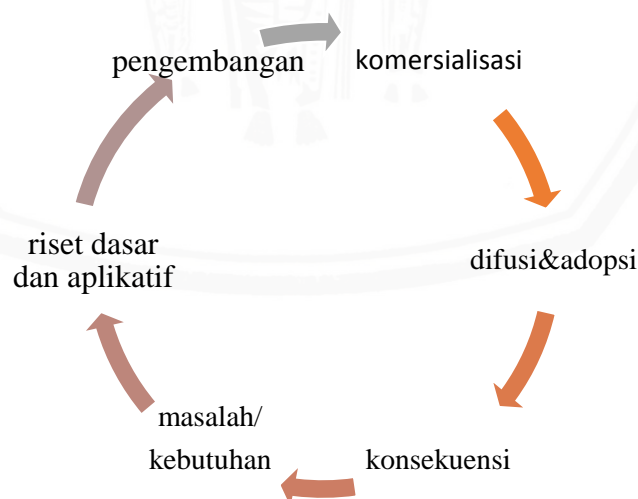
4. Difusi dan adopsi

Pada tahap ini sebuah produk inovasi sudah beredar luas dan dikenal oleh khalayak umum, dan tinggal menentukan pilihan apakah mereka mau menerima atau tidak produk inovasi yang sudah ada tersebut.

5. Konsekuensi

Pada tahapan ini sudah bisa diketahui, apakah masalah atau kebutuhan yang tela diidentifikasi di awal sudah terjawab atau belum. Karena kebanyakan permasalahan atau kebutuhan yang baru muncul disebabkan oleh adanya inovasi baru.

Tahap terakhir pada pengembangan inovasi mempunyai posisi strategis tentang apakah sebuah inovasi yang dihasilkan mampu memberikan perubahan atau dampak kepada khalayak umum terkait dengan permasalahan yang timbul. Keberhasilan sebuah inovasi dilihat dari berapa lama sebuah produk inovasi mampu bertahan dalam waktu tertentu dalam menjawab permasalahan. Namun bukan jaminan bahwa inovasi yang berhasil dan mampu menjawab berbagai permasalahan dan kebutuhan yang timbul dapat bertahan di waktu yang lama, karena perubahan baik itu dari segi waktu, tempat, persepsi, berkembangnya tuntutan dari kebutuhan masyarakat, dapat mengeser eksistensi sebuah produk inovasi. Sehingga untuk menyesuaikan dan mengikuti perkembangan sebuah inovasi harus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan yang ada sehingga produk inovasi dapat menjawab berbagai permasalahan yang muncul. Sehingga proses yang terjadi adalah siklus inovasi seperti pada gambar 3 sebagai berikut:



Gambar 4. Siklus Pengembangan Inovasi

Sumber: Suwarno (2008:22)

Proses inovasi pada gambar 3 diatas menjelaskan bahwa inovasi bukanlah sebuah proses yang berhenti pada satu titik, melainkan inovasi terus bergerak seiring dengan berjalannya waktu dan berkembang masalah atau kebutuhan yang terjadi dalam kehidupan dan lingkungan dalam masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses pengembangan inovasi menurut Suwarno (2008:22) terdiri dari masalah/kebutuhan, riset dasar dan aplikatif, pengembangan, komersialisasi, difusi, adopsi, dan konsekuensi.

4. Tipologi Inovasi

Inovasi merupakan hal baru yang memiliki nilai dan dampak lebih, sehingga inovasi bisa menjadi senjata bagi organisasi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam organisasi, karena organisasi tidak akan terlepas dengan permasalahan, baik permasalahan di internal maupun eksternal organisasi, untuk itu perlu ada perubahan cara yang lama ke cara yang baru dibutuhkan dalam menyelesaikan kebuntuan dan permasalahan dalam organisasi, menurut Muluk (2008:44-45) berpendapat bahwa ada tipologi Inovasi sektor publik sebagai berikut:

a. Inovasi produk/layanan

Merupakan modifikasi barang atau jasa untuk meningkatkan kualitas barang atau jasa tersebut.

b. inovasi proses pelayanan

Merupakan upaya untuk peningkatan kualitas proses kerja baik internal dan eksternal yang lebih efisien dan sederhana..

c. Inovasi metode pelayanan

merupakan pembaharuan strategi, cara, dan teknik baru dalam pelayanan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

d. Inovasi dalam strategi atau kebijakan

Perubahan strategi atau kebijakan dari visi, misi, tujuan dan strategi, untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada saat itu, karena perkembangan bisa terus berubah dan bersifat dinamis sehingga perlu penyesuaian .

e. Inovasi sistem

Perubahan tentang bagaimana cara pemerintah dalam berhubungan dengan pihak lain dalam menjalin hubungan, karena hal tersebut jalan yang dapat memperlancar jalannya inovasi

5. Level Inovasi

Besarnya dampak yang timbulkan dari pelaksanaan inovasi memiliki beberapa tingkatan yang menggambarkan kekuatan inovasi ketika diterapkan dalam organisasi, level inovasi dijelaskan oleh Mulgan dan Albury (Dalam Muluk, 2008:46) terdiri dari tiga level mulai dari *incremental*, *radikal*, dan *transformatif*, sebagai berikut:

1. Inovasi *incremental* berarti inovasi yang terjadi membawa perubahan perubahan kecil terhadap proses atau layanan yang ada. Umumnya sebgayaan besar inovasi berada dalam level ini dan jarang sekali membawa perubahan terhadap struktur organisasi dan hubungan keorganisasian. Walaupun demikian, inovasi *increamental* memainkan peran penting dalam pembaharuan sektor publik karena dapat melakukan pembaharuan kecil yang dapat diterapkan secara terus menerus dan mendukung rajutan

- pelayanan yang responsive terhadap kebutuhan lokal dan perorangan, serta mendukung nilai tambah keuangan (*value for money*).
2. Inovasi radikal merupakan perubahan mendasar dalam pelayanan publik atau pengendalian cara cara yang sama sekali baru dalam proses keorganisasian dan pelayanan. Inovasi jenis ini jarang sekali dilakukan karena memerlukan dukungan politik yang sangat besar karena umumnya memiliki resiko yang sangat besar pula. Inovasi radikal diperlukan untuk membawa perbaikan yang nyata dalam kinerja pelayanan publik dan memenuhi harapan pengguna layanan yang lama terabaikan
 3. Inovasi transformatif atau sistemis membawa perubahan dalam struktur angkatan kerja dan keorganisasian dengan mentransformasi semua sektor dan secara dramatis menguak keorganisasian. Inovasi jenis ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memperoleh hasil yang diinginkan dan membutuhkan perubahan mendasar dalam susunan sosial, budaya, dan organisasi.

Kesimpulan dari level inovasi yang dijelaskan diatas bahwa level inovasi merupakan tingkatan seberapa besar pengaruh inovasi terhadap lingkungan internal maupun eksternal organisasi, dan juga dari sisi pelayanan kepada masyarakat, seiring dengan bagaimana pengaruhnya juga membutuhkan prasarat pada setiap level inovasi juga membutuhkan resiko dan prasarat agar sebuah inovasi dapat berjalan dengan baik, level inovasi tersebut terdiri dari inovasi incremental, radikal dan transformatif.

6. Faktor pendukung inovasi

Berjalanya sebuah inovasi pasti ada faktor yang dapat mempercepat laju tumbuhnya inovasi dan keberhasilan sebuah inovasi, Sumarto (2009:100) mengemukakan bahwa ada tujuh faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu inovasi dalam mendorong terwujudnya good governance yaitu:

1. Faktor lingkungan yang meliputi krisis, demokrasi, dan kesempatan politik yang lebih kondusif terhadap perubahan. Faktor lingkungan baik itu faktor di

dalam maupun diluar organisasi dalam hal pengembangan sebuah inovasi mempunyai dampak yang besar, dan faktor lingkungan dapat menentukan apakah sebuah inovasi dapat berhasil atau tidak berhasil, karena faktor lingkungan bergerak sangat dinamis dan tidak dapat ditebak, baik arahnya maupun keberadaannya.

2. Keberadaan arsitek inovasi dan pemimpin bervisi. Keberadaan aktor yang mempunyai komitmen tinggi pada inovasi akan dapat mempengaruhi muncul dan berhasil tidaknya sebuah inovasi, karena dengan adanya arsitek inovasi akan lebih mudah dalam menciptakan sebuah inovasi di dalam organisasi serta dia dapat mendorong dan mempercepat terwujudnya pembentukan inovasi
3. Dukungan dari komunitas internasional maupun dukungan dari pemerintah. Keberhasilan sebuah gagasan inovasi tidak akan lepas dari adanya dukungan, dengan munculnya dukungan sebuah inovasi akan dapat berjalan dengan baik, dan dengan adanya dukungan menandakan bahwa adanya sebuah inovasi dapat memperbaiki sesuatu yang kurang maksimal dan optimal di dalam organisasi, dukungan tersebut bisa berasal dari luar negeri maupun dalam negeri.
4. Partisipasi warga. Adanya partisipasi masyarakat dalam implementasi atau pelaksanaan inovasi merupakan harapan bagi arsitek inovasi, bahwasanya inovasi memang dimunculkan agar masyarakat dapat melihat dan merasakan dampak dari adanya inovasi, dan tanpa adanya dukungan dari masyarakat sebuah inovasi mempunyai kemungkinan gagal skala besar.

5. Dukungan dan pertukaran rekan sejawat. Dukungan dari orang disekitar terutama saling tukar pikiran bagaimana menciptakan sebuah inovasi yang baik, memutar otak dan saling berintraksi antar teman sejawat merupakan sebuah langkah awal agar sebuah inovasi dapat diketahui oleh orang terdekat sebelum kemasyarakat yang lebih luas, dan dimungkinkan pertukaran teman sejawat dapat membuahkan sebuah saran yang membangun.
6. Struktur manajemen, sesuatu yang terdapat di dalam organisasi terutama struktur manajemen mempunyai pengaruh kepada karyawan yang bekerja dan eksistensi organisasi, struktur manajemen yang menghambat sebuah inovasi merupakan struktur yang manajemen yang berbelit belit dan tidak sederhana, yang membuat sebuah prosedur didalam organisasi terlalu panjang dan tidak efektif serta efisien, sehingga sebuah inovasi akan sulit dapat berkembang
7. Intensif. Pemberian sebuah reward kepada pegawai penggagas inovasi perlu dilakukan sebagai bentuk apresiasi atas karya yang telah dibuat, sehingga dengan adanya apresiasi orang atau pengagagas inovasi tersebut merasa karyanya dihargai, dengan adanya intensif orang itu akan merasa percaya diri dan semangat untuk kedepanya, dan diharapkan dengan adanya reward orang tersebut dapat menciptakan inovasi inovasi lain yang lebih baik lagi kedepanya bagi organisasi.

Faktor pendukung inovasi merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan inovasi yang ada dapat terlaksana dengan baik, menurut pendapat lain yang dikemukakan oleh Ancok (2012:58) ada tiga komponen yang dapat dijadikan

sebagai pendukung inovasi, yakni modal manusia, modal kepemimpinan, dan modal struktur organisasi, sebagai berikut:

1. Modal manusia

Ada tujuh aspek modal manusia menurut Jim Collin (2002) yang dikutip oleh Ancok (2012:58) sebagai berikut:

- a) Modal kreatifitas yang melekat pada diri individu yang menghasilkan banyak gagasan baru.
- b) Modal intelektual yang diwujudkan dalam luasnya pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dengan proses belajar terus menerus. Selain kreatifitas individu pekerja, sumber inovasi juga diperoleh dengan proses belajar terus menerus.
- c) Modal emosional membuat suasana kerja menjadi enak karena emosi yang selalu positif dapat memicu munculnya gagasan inovatif yang akan dihargai oleh rekan kerja sekerja maupun atasan.
- d) Modal sosial yang berupa *network* kerjasama para pekerja yang didasari oleh rasa saling percaya. Modal sosial yang baik akan memungkinkan peningkatan pengetahuan (*knowledge acquisition*) melalui proses berbagai pengetahuan (*knowledge sharing*).
- e) Modal keuletan (*adversity*) yang wujudnya adalah ketabahan pekerja dalam menghadapi tantangan pekerjaan. Inovasi menuntut kerja keras dan ketabahan dalam menghadapi hambatan dalam proses inovasi.
- f) Modal moral dan integritas. Inovasi menuntut adanya orisinalitas. Oleh karena itu, kejujuran harus dimiliki agar pekerja tidak mencuri gagasan orang lain secara mentah tanpa diolah dengan kemurnian gagasan sendiri.
- g) Model kesehatan, fisik adalah wadah yang mendukung semua modal modal lainnya.

2. Modal kepemimpinan

Keberadaan seorang pemimpin di dalam organisasi mempunyai pengaruh cukup besar dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi termasuk ada dan tidaknya inovasi yang terbentuk, seorang pemimpin yang baik juga harus mau menerima berbagai gagasan inovasi dari bawah, sehingga keberadaan seorang pemimpin disini sangat penting.

Keberadaa pemimpin yang mempunyai kempuan untuk mengajak dan mendorong bawahan agar dapat bekerja dengan baik, berdasarkan teori transformasional menurut Bass dan Avolio (2007) dalam Ancok (2012:60) bahwa pemimpin transformasional adalah memiliki kemampuan untuk menginspirasi pekerja. Pemimpin yang inspirational mengajak orang untuk memajukan perusahaan melalui gagasan inovatif agar menjadi lebih baik dan memberi manfaat pada semua lapisan yang berkepentingan.

3. Modal struktur organisasi

Organisasi mempunyai peran sebagai tempat dimana berbagai aktivitas muncul dan tumbuh serta berkembang, termasuk dalam pengembangan inovasi, oleh karena itu agar inovasi dapat berkembang membutuhkan struktur dan manajemen organisasi yang sederhana, organisasi yang kaku, berkotak kotak dan hierarkis akan menghambat proses inovasi. Inovasi memerlukan ruang gerak, dan salah satu ruang gerak agar inovasi dapat berjalan adalah mengenai persetujuan inovasi dari atasan, dimana persetujuan biasanya melalui beberapa level di atasnya serta hal tersebut erat kaitanya dengan struktur organisasi.

Faktor pendukung dari keberadaan inovasi tidak hanya terdapat di internal organisasi saja namun terdapat di eksternal, faktor eksternal pendukung inovasi adalah dari masyarakat, karena partisipasi masyarakat dalam inovasi sangat penting, keberadaannya merupakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan inovasi, apakah dapat diterima atau tidak, ada 4 jenis partisipasi menurut Sumarto (2009:153) yaitu partisipasi dalam

pembuatan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam menerima manfaat, dan partisipasi dalam evaluasi.

7. Faktor Penghambat Inovasi

Inovasi merupakan sebuah langkah maju untuk memperbaiki sesuatu yang kurang maksimal didalam suatu organisasi, oleh karena itu inovasi dianggap penting untuk dilaksanakan terutama dalam organisasi pemerintahan. Namun dalam melaksanakannya tidaklah mudah, ada hambatan-hambatan yang siap menghambat dalam tumbuh kembangnya inovasi.

Inovasi bukan produk yang dalam melaksanakanya tanpa hambatan, banyak ditemui permasalahan dalam melaksanakanya, “kendala terbesar dari inovasi itu sendiri dari faktor internal organisasi seperti budaya organisasi” Suwarno (2008:54). Sebagaimana menurut Albury (2003:31) yang dikutip oleh Suwarno (2008:54-55), ada 8 faktor penghambat inovasi dapat dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 5. Faktor Penghambat inovasi

Sumber: Albury, 2003 Halaman 31

Hambatan inovasi diidentifikasi ada delapan jenis sebagaimana gambar 4 diatas, yang pertama keengganan menutup program yang gagal diartikan sebagai program yang telah gagal dalam pelaksanaan sebaiknya tidak diteruskan atau ditutup saja, karena sudah tidak memiliki kemanfaatan yang diharapkan, sebuah program mengalami kegagalan merupakan hal yang wajar terjadi namun akan lebih buruk lagi dampaknya jika diteruskan, yang kedua ketergantungan lebih pada *high performer*, ini terjadi ketika beranggapan ada figur yang dapat menjadi penggerak yang memiliki konsistensi tinggi berinovasi dalam organisasi, sehingga ketika figur tersebut tidak ada maka hilanglah inisiatif diorganisasi untuk melakukan inovasi. Hal tersebut perlu ditanamkan sebuah pemahaman agar tidak bergantung pada seorang figur yang didambakan. Ketiga, adalah teknologi ada namun

terkendaam oleh budaya dan penataan organisasi, kegagalan mewujudkan inovasi seringkali tidak datang dari dukungan teknologi namun budaya dalam organisasi menjadi penghambat dan menjadi bumerang dalam tumbuh kembangnya inovasi didalam lingkungan organisasi. Keempat merupakan tidak adanya apresiasi terhadap karya yang dihasilkan pada seseorang penggagas inovasi sehingga pegawai menjadi enggan untuk mengeluarkan ide inovasi yang sebenarnya ada dan tertanam untuk dikembangkan kedalam bentuk pengaplikasian inovasi, dibutuhkan apresiasi berbentuk reward bagi penggagas itu akan dapat memacu pegawai untuk terus memberikan karya yang terbaik bagi organisasi.

Hambatan yang kelima merupakan hambatan ketidak mampuan menghadapi resiko dan perubahan, dalam hal ini keterampilan seorang pegawai dibutuhkan agar inovasi dapat berjaan. Sebesar apapun dukungan dalam organisasi kalau pegawai tidak memiliki skill maka inovasi terhenti dan tidak berhasil. Keenam, keberadaan aspek anggaran merupakan aspek penting dalam tumbuh kembangnya inovasi, tanpa anggaran inovasi tidak berjalan baik itu jangka pendek maupun jangka menengah. Ketujuh merupakan hambatan yang bersifat administratif yang menghambat laju inovasi, hal yang bersifat administratif yang berlebihan akan berdampak pada semakin lamanya proses sebuah urusan. Sehingga menyurutkan keinginan bagi yang ingin berinovasi. Dan hambatan terkahir atau Kedelapan adalah hambatan ketidakberanian untuk menanggung dampak yang ditimbulkan dari sebuah pilihan yang dipilih, sehingga hal tersebut mengambat kemajuan dari terbentuknya inovasi. Resiko merupakan hal yang wajar ketika menetapkan pilihan, meskipun ada sedikit resiko kedepanya.

D. Pelayanan Publik

1. Devinisi pelayanan publik

Inovasi dapat dipahami sebagai sebuah pembaharuan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam hal pemberian layanan kepada masyarakat. Perkembangan permasalahan dari masa ke masa tentu membutuhkan sebuah penanganan yang berbeda pula, karena permasalahan yang ada disuatu tempat dapat berbeda dengan permasalahan yang ada di tempat lain dan penyelesaian permasalahan yang ada di suatu tempat itu juga dapat berbeda dengan penyelesaian di tempat lain. Oleh karena itu perlu dimunculkan pelayanan kepada masyarakat yang baru dan berbeda untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Pelayanan publik memiliki pengertian yang beragam namun masih memiliki substansi yang sama, pengertian pelayanan publik menurut Pasolong (2010:128) pelayanan publik pada dasarnya adalah “sebagai aktifitas seseorang, kelompok dan atau organisasi tertentu yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan”, dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan adalah sebuah aktifitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan pengertian lain menurut Sinambela (2008:5) pelayanan publik adalah “pemberian pelayanan oleh organisasi kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditentukan”. Pengertian lain mengenai pelayanan publik juga terdapat pada peraturan negara yakni di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 tentang pelayanan publik yang mengartikan bahwa:

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”

Pendapat dari ahli dan Undang-undang di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan publik adalah penyediaan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik itu berupa barang atau jasa yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan peraturan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Inovasi pelayanan publik

Inovasi pelayanan publik merupakan sebuah pemberian pelayanan yang memiliki bentuk yang berbeda daripada bentuk pelayanan yang lama, artinya disini ada sisi kebaruan dalam pemberian pelayanan, menurut Suwarno (2008:2) inovasi pada sektor publik adalah “Sebuah jalan untuk mengatasi kemacetan dan kebutuhan organisasi di sektor publik”. Karakteristik sebuah organisasi yang masih kaku bisa dicairkan dengan melakukan sebuah inovasi karena sebuah inovasi dapat membuat jalan keluar dari sebah kebuntuan yang melanda organisasi oleh sebab itu inovasi memiliki sifat kebaruan yang berbeda dari sebelumnya, hal yang berbeda itulah yang dapat memecah kebuntuan dari permasalahan sebuah organisasi organisasi.

Inovasi pelayanan publik dalam organisasi ada untuk memperbaiki sistem lama yang dalam pelaksanaannya tidak efektif dan tidak efisien, menurut Suwarno (2008:10) ditinjau secara lebih khusus, pengertian dari inovasi pelayanan publik

bisa diartikan sebagai “prestasi dalam meraih, meningkatkan dan memperbaiki efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik yang dihasilkan oleh inisiatif pendekatan, metodologi dan atau alat baru dalam pelayanan kepada masyarakat”. Dari pengertian inovasi pelayanan publik yang dikemukakan oleh ahli diatas menjadi lebih jelas bahwa inovasi pelayanan publik merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan mutu dari sebuah layanan layanan dengan melakukan pendekatan yang dihasilkan dari pendekatan yang relevan dalam masyarakat, sehingga kesesuaian pelayanan dapat terwujud. Oleh karena itu Suwarno (2008:78) menyatakan bahwa “penyelenggaraan inovasi pelayanan publik harus mendapat dukungan dari masyarakat” yang berupa dukungan nyata dengan membantu secara langsung proses proses penyelenggaraan pelayanan umum, karena inovasi pelayanan publik adalah upaya untuk menyesuaikan atau menafsirkan keadaan yang sedang ada di dalam masyarakat.

Inovasi pelayanan publik yang dikemukakan ahli diatas dapat disimpulkan bahwa inovasi pelayanan publik ada hal/ide.gagasan yang dimunculkan untuk mengatasi permasalahan di dalam sektor publik dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat dan supaya sebuah inovasi pelayanan dapat berjalan dengan efisien dan efektif maka dibutuhkan partisipasi dari masyarakat.

3. Prinsip Pelayanan publik

Pemberian pelayanan kepada publik selain diukur kualitasnya berdasarkan indikator indkator tertentu, pemberian pelayanan publik juga mempunyai prinsip prinsip sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Menurut Sulistyo dan

Budi (2009:39) pelayanan publik yang dilakukan oleh sebuah negara hendaknya berdasarkan prinsip prinsip dasar sebagai berikut:

1. Rasional, efektif dan efisien yang dilakukan melalui manajemen terbuka.
2. Ilmiah berdasarkan kajian dan penelitian serta didukung oleh cabang cabang ilmu pengetahuan lainnya.
3. Inovatif, pembaharuan yang dilakukan terus menerus untuk menghadapi lingkungan yang dinamis, berubah dan berkembang.
4. Produktif, berorientasi kepada hasil kerja yang optimal.
5. Profesionalisme, penggunaan tenaga kerja profesional, terampil dalam istilah *"The Right Man in The Right Place"*.
6. Penggunaan teknologi modern yang tepat guna.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik harus dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah berdasarkan pada asas-asas yang terdiri dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Kondisional
4. Partisipatif
5. Kesamaan Hak
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Prinsip prinsip pelayanan diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip pelayanan publik adalah prinsip yang harus dipenuhi ketika melakukan sebuah pelayanan, prinsip prinsip tersebut meliputi rasional, ilmiah, inovative, produktif, profesionalisme, serta penggunaan teknologi tepat guna. Sedangkan untuk indikator asas pelayanan publik terdiri dari transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban.

E. Sampah

1. Pengertian sampah

Sampah merupakan barang yang sudah tidak digunakan lagi oleh pemiliknya baik berupa padat maupun cair, dan dihasilkan dari berbagai aktifitas baik itu di pasar, kantor, pertokoan, rumah tangga dan apabila tidak dikelola dengan baik akan mengganggu kebersihan, kesehatan dalam sebuah tempat. Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 tentang pengelolaan sampah menjelaskan bahwa sampah adalah “sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”, sedangkan pengertian sampah menurut menurut Abas dkk (2010:153) menyatakan bahwa “sampah merupakan sisa atau sesuatu hal yang dibuang atau seringkali tidak dikehendaki keberadaanya, sampah dianggap sebagai benda yang mencemari lingkungan dan tidak memiliki nilai ekonomis”, pengertian lain menurut Tanjung dalam (Alex, 2012:3) mengartikan sampah adalah “suatu yang tidak berguna lagi dibuang oleh pemiliknya dan tidak dipakai lagi”. Pengertian sampah menurut ahli diatas dapat disimpulkan bahwa sampah merupakan barang yang dihasilkan dari aktifitas manusia yang tidak dipakai dan tidak dikehendaki lagi oleh pemiliknya serta tidak memiliki nilai ekonomis.

2. Sumber sampah

Sampah bersumber dari berbagai tempat khususnya tempat yang digunakan untuk beraktifitas oleh manusia, sumber sampah berasal dari berbagai tempat, menurut Gilbert, (1996:23-24), sumber-sumber timbunan sampah sebagai berikut:

- 1). Sampah dari pemukiman penduduk Pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal disuatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya cenderung organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik dan lainnya.
- 2). Sampah dari tempat – tempat umum dan perdagangan Tempat- tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat – tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng- kaleng serta sampah lainnya.
- 3). Sampah dari sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah Yang dimaksud di sini misalnya tempat hiburan umum, pantai, masjid, rumahsakit, bioskop, perkantoran, dan sarana pemerintah lainnya yang menghasilkan sampah kering dan sampah basah.
- 4). Sampah dari industri dalam pengertian ini termasuk pabrik – pabrik sumber alam perusahaan kayu dan lain – lain, kegiatan industri, baik yang termasuk distribusi ataupun proses suatu bahan mentah. Sampah yang dihasilkan dari tempat ini biasanya sampah basah, sampah kering abu, sisa -sisa makanan, sisa bahan bangunan
- 5). Sampah Pertanian Sampah dihasilkan dari tanaman atau binatang daerah pertanian, misalnya sampah dari kebun, kandang, ladang atau sawah yang dihasilkan berupa bahan makanan pupuk maupun bahan pembasmi serangga tanaman

Sampah berasal dari berbagai tempat, dimana ada manusia disitu ada sampah, dan sumber dimana sampah dihasilkan merupakan hasil dari berbagai aktifitas manusia, beragamnya sumber sampah membuktikan bahwa kehidupan ini tidak terlepas dengan yang namanya sampah. Sehingga dengan banyaknya sumber sampah, membuat masyarakat harus sadar dan tetap menjaga lingkungannya agar lingkungan dapat bersih dan sehat serta tidak mengganggu lingkungan sekitar.

3. Jenis sampah

Sumber sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam, ada yang dari sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, sampah institusi/kantor/sekolah, dan sebagainya. Menurut Gilbert dkk dalam Artiningsih (2008) berdasarkan asalnya sampah digolongkan menjadi dua yaitu, sebagai berikut:

1. Sampah Organik

Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan plastik), tepung, sayuran, kulit buah, daun dan ranting.

2. Sampah Anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan Non hayati, tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi: sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar anorganik tidak dapat diurai oleh alam/mikroorganisme secara keseluruhan (*unbiodegradable*). Sementara, sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa sampah organik adalah bersumber dari sampah rumah tangga yang bersumber dari alam, sedangkan sampah anorganik

adalah sampah yang berasal dari bahan oalahan yang sulit terurai oleh alam,dan membutuhkan waktu lama untuk dapat terurai.

4. Program Bayar Pajak Dengan Sampah

Program bayar pajak dengan sampah merupakan program yang diluncurkan oleh BPPKA bekerjasama dengan DLH dan bank sampah, program tersebut diluncurkan pada akhir November 2016 dan program baru berjalan pada awal tahun 2017, dimana tujuan dengan adanya program tersebut tidak hanya untuk mempercepat dan meningkatkan realisasi penerimaan PBB, tapi juga membuat lingkungan menjadi bersih, karena sumber sampah yaitu dari skala rumah tangga atau dari hulu sudah dikelola dengan cara dipisah kemudian digunakan untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

Masyarakat yang mengikuti Program bayar pajak dengan sampah menjadi semakin mudah dan ringan dalam membayar pajaknya, karena masyarakat hanya tinggal mengumpulkan sampah saja yang terdapat atau dihasilkan dirumah tangga, pajak bisa terbayarkan. Masyarakat yang mengikuti program bayar pajak dengan sampah cukup mendaftarkan diri ke bank sampah yang ada di RT/RW masing masing di kelurahan, setelah itu masyarakat dapat mengumpulkan sampah dibank secara berkala untuk digunakan membayar pajak yang akan dilakukan sesuai kesepakatan bersama dengan kader bank sampah. Pada saat pembayaran apabila hasil dari tabungan sampah dari masyarakat tidak mencukupi atau kurang, maka masyarakat bisa menambahkan dengan uang secara langsung.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan sebuah kegiatan untuk mengetahui fenomena lebih dalam, yang memerlukan gambaran yang jelas dari sesuatu atau obyek yang diteliti, maka data atau informasi yang diperoleh harus benar benar sesuai dengan kondisi nyata yang ada dilapangan, untuk melaksanakan hal tersebut diperlukan kumpulan data untuk mendukung jalanya penelitian seperti dari pidato, tulisan, dan rekaman wawancara. Penelitian ini merupakan penelitian ang dilakukan untuk mengetahui bagaimana inovasi bayar pajak dengan sampah sebagai upaya meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan perkotaan di Kota Mojokerto

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2014:1) adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivme dan digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Sedangkan menurut Moleong (2011:6) pendekatan kualitatif merupakan penelitian untuk memahami fenomena dengan cara medeskripsikan dalam bentuk kata kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Metode deskriptif menurut Hamdi dan Bahrudin (2014:5) merupakan metode yang ditujukan

untuk menghamburkan fenomena fenomena yang ada berlangsung pada saat ini atau saat lampau.

Pendekatan kualitatif yang telah didefinisikan oleh ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif bertujuan untuk menjelaskan dengan cara mendeskripsikan fenomena yang terjadi dilapangan dengan kata-kata, maka dari itu penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai inovasi bayar pajak dengan sampah sebagai upaya meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan di Kota Mojokerto, serta memfokuskan pada proses pencarian makna dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian agar informasi yang dikaji lebih bersifat komprehensif dan mendalam.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini untuk membatasi peneliti sehingga terhindar dan tidak terjebak dalam pengumpulan data pada bidang yang sangat umum dan luas atau kurang relevan dengan apa yang sudah ada dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian. Fokus penelitian berguna sebagai sarana untuk memfokuskan proses jalanya penelitian yang dilakukan. Untuk dapat memahami lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian. Menurut Spredly dalam Sugiono (2006:234) Fokus dapat ditetapkan melalui 4 alternatif yaitu berdasarkan permasalahan lapangan yang disarankan oleh informan, berdasarkan domain domain tertentu, berdasarkan nilai temuan untuk mengembangkan iptek serta berdasarkan

permasalahan yang terkait dengan teori yang ada. Fokus penelitian merupakan tahapan awal pelaksanaan penelitian, sehingga penelitian akan memperoleh gambaran umum tentang obyek yang diteliti adapun fokus dari penelitian ini yaitu:

1. Inovasi bayar pajak dengan sampah sebagai upaya meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan perkotaan di Kota Mojokerto. (Menurut Atribut inovasi dari Roger yang dikutip oleh Suwarno (2008).
 - a. *Relative advantage* (Keuntungan Relatif)
 - b. *Compatibility* (Kesesuaian)
 - c. *Complexity* (kerumitan)
 - d. *Triability* (kemungkinan dicoba)
 - e. *Observability* (kemudahan diamati)
2. Faktor pendukung dan penghambat Inovasi bayar pajak dengan sampah sebagai upaya meningkatkan pajak bumi dan bangunan perkotaan di kota Mojokerto
 - a. Faktor pendukung
 1. Peran pemimpin dan pihak terkait (DLH dan bank sampah)
 2. Keberadaan bank sampah
 3. Harga sampah lebih mahal
 4. Hadiah umroh wisata religi
 5. Peningkatan PBB perkotaan di Kota Mojokerto
 - b. Faktor penghambat
 1. Respon masyarakat kurang
 2. Keberadaan bank sampah belum merata.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melaksanakan kegiatan penelitian guna mengumpulkan data yang menunjang dengan topik penelitian, Sedangkan situs penelitian merupakan tempat sebenarnya peneliti melaksanakan penelitian guna mendapatkan data yang valid, akurat, dan terpercaya yang dibutuhkan dalam penelitian. Penetapan lokasi penelitian sangat penting bagi penelitian kualitatif karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian maka dapat mempermudah peneliti dalam pencarian informasi. Dengan pertimbangan lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Mojokerto, dengan alasan karena di Kota Mojokerto baru saja mendapatkan penghargaan kota adipura, dimana kota mojokerto sudah terdapat banyak bank sampah yang digunakan untuk menjaga kebersihan lingkungan kota yang mempunyai potensi bagus untuk digunakan untuk membayar pajak dengan sampah.

Situs penelitian adalah tempat peneliti untuk mengungkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti, situs penelitian dalam penelitian ini agar dapat diperoleh gambaran mengenai program bayar pajak dengan sampah antara lain:

1. Badan pengelolaan pendapatan keuangan dan aset Kota Mojokerto
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto
3. Bank sampah Induk Kota Mojokerto

D. Sumber Data

Sumber data merupakan keberadaan dimana informasi digali dari pihak-pihak yang mengetahui dan dari dokumen yang masih ada sangkut pautnya dengan topik

untuk dijadikan alat analisis yang akan dilakukan terhadap obyek atau sasaran penelitian yang diteliti. Oleh karena itu dibutuhkan sumber data, dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari sumber utamanya. Sumber data primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada:

1. Kabid Pendataan Badan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
2. kasubid Pendataan Dan Penetapan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
3. Staff bidang Penataan Dan Pentaatan Lingkungan Hidup DLH
4. Masyarakat yang mengikuti program bayar pajak pakai sampah
5. Masyarakat yang mengikuti program bayar pajak pakai sampah
6. Masyarakat yang mengikuti program bayar pajak pakai sampah
7. Masyarakat pemenang undian hadiah umroh gratis

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber langsung dari sumber bukan asli memuat informasi secara langsung kepada pengumpul data .misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2015:225). Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh baik wawancara maupun observasi langsung ke lapangan. Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data

primer baik wawancara maupun observasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perda Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
- b. Renstra Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2014-2019
- c. Buku Profil BPPKA 2015
- d. Kota Mojokerto Dalam Angka, Dokumen BPS Kota Mojokerto Tahun 2017.
- e. Warga Kota Mojokerto Antusias Bayar Pajak Pakai Sampah, Berita harianbhirawa.co.id. 15 Februari 2017
- f. Berkat Program Umroh dan Kasih Setia, Pemkot Mojokerto Berpeluang Raih Adipura, berita Global-news.co.id. 15 Juni 2017

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengali informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan, maka dari itu teknik pengumpulan data penting untuk dilakukan karena dapat mempermudah peneliti dalam proses penelitian lapangan. Menurut Sugiono (2005:62) teknik pengumpulan data merupakan merupakan langkah paling strategis dalam penelitian karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data memiliki posisi penting karena pada dasarnya penelitian adalah mengungkap fenomena atau kejadian yang memerlukan data untuk membuktikannya. Adapun teknik pengumpulan data yang diambil oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah dengan cara:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan teknik mencari data atau informasi yang ditujukan kepada responden secara lisan, didalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, yaitu melakukan wawancara secara mendalam dengan pihak pihak yang terkait dengan inovasi bayar pajak dengan sampah sebagai upaya meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan, yang berguna bagi peneliti untuk mencari kejelasan mengenai bidang topik dalam penelitian. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara maupun wawancara bebas dengan observasi, instrumen yang dilakukan dalam wawancara ini adalah dengan *tape recorder*/sejenisnya, yang dilengkapi dengan catatan-catatan kecil oleh peneliti untuk mempermudah menelusuri dalam hal memperoleh data yang berhubungan dengan topik penelitian. Wawancara ditujukan kepada responden atau pihak terkait dalam sesuai dengan topik penelitian. Wawancara mendalam dilakukan kepada, antara lain:

1. Ibu Siti Nur Komarijati
2. Bapak Arifani Yahya
3. Edi
4. Ibu Nurul
5. Ibu Isma
6. Ibu Suryani
7. Bapak Radi

2. Observasi (*Observation*)

Teknik observasi digunakan mengamati berbagai peristiwa atau situasi yang berada di lokasi penelitian, yang berhubungan dengan fokus penelitian. Instrumen yang digunakan adalah dengan catatan lapangan yaitu dengan melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung pada obyek yang sedang diteliti, sehingga apa yang ada di lapangan dapat terekam dengan jelas dan menghasilkan data penunjang penelitian. Observasi dilakukan kepada pihak yang menangani dan terlibat program bayar pajak dengan sampah yaitu di kantor BPPKA, DLH, dan Bank Sampah induk serta di rumah masyarakat yang sedang mengikuti program bayar pajak dengan sampah dan terdaftar menjadi anggota bank sampah dengan mengumpulkan sampah di bank sampah pada tahun 2017 dan tidak melakukan pembayaran pajak selain di bank sampah di masing-masing RT/RW. Bukti bahwa peneliti sudah melakukan observasi bisa dilihat pada lampiran 1

3. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan kegiatan mengumpulkan data dan telaah pustaka, dengan menghimpun dokumen yang dianggap penting dan menunjang serta relevan dengan permasalahan yang diteliti baik berupa buku, jurnal, dokumen peraturan pemerintah berupa Undang-undang ataupun perda, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Dilakukan dengan cara dipelajari, dikaji, dan disusun atau dikategorikan sedemikian rupa sesuai dengan topik penelitian dan fokus penelitian, sehingga nantinya dapat memperoleh data penunjang ataupun pelengkap mengenai penelitian yang dilakukan. Studi Dokumen tidak terbatas oleh waktu,

sehingga memberikan peluang kepada peneliti untuk mengetahui kejadian diwaktu silam. Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Peta Administrasi Kota Mojokerto. Pada halaman 72
2. Perbandingan luas wilayah menurut kecamatan di Kota Mojokerto. Pada halaman 73
3. Jumlah penduduk Kota Mojokerto menurut kecamatan dan jenis kelamin. Pada halaman 75
4. Struktur Organisasi BPPKA. Pada halaman 80
5. Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan BPPKA Pada halaman 87
6. Mekanisme Bayar Pajak Pakai Sampah. Pada halaman 93
7. Iklan Program Bayar Pajak dengan Sampah di Samping Jalan. Pada halaman 105
8. Daftar Seluruh Bank Sampah Di Kota Mojokerto. Pada halaman 107
9. Daftar Harga jual Sampah. Pada halaman 113
10. Penerima Hadiah Umroh Gratis Dari Pembayaran Pajak Dengan Sampah Tahun 2017. Pada halaman 115
11. Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kota Mojokerto Tahun 2014-2017. halaman 117
12. Rekapitulasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Bank Sampah Tahun 2017. Pada halaman 118

13. Rekapitulasi Jumlah Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Dengan Sampah.

Pada halaman 122

14. Rekapitulasi 31 Bank Sampah Yang Aktif Dengan Sampah Pada Tahun 2017.

Pada halaman 124

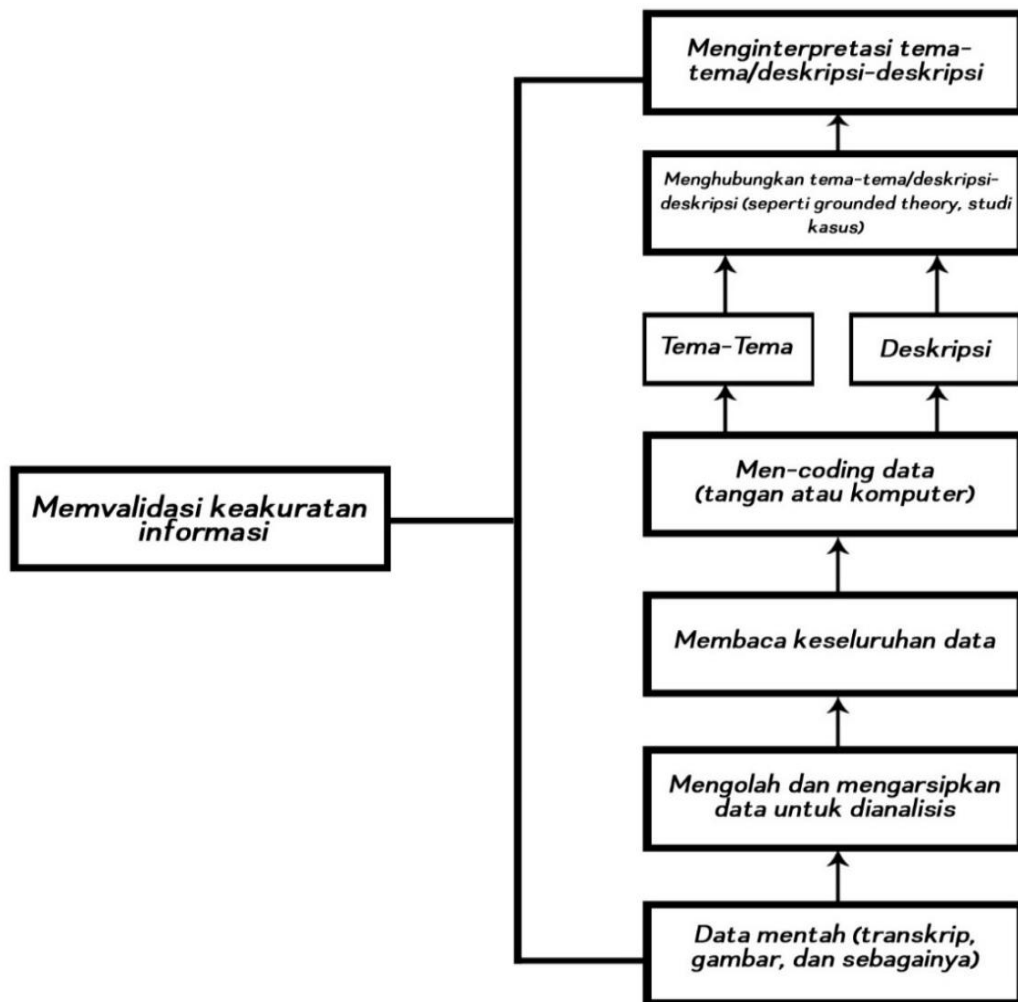
F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data terkait dengan topik yang diteliti, sehingga ketika penelitian berlangsung tidak mengalami kesulitan dan peneliti mendapatkan hasil yang diharapkan, dalam arti lebih lengkap dan sistematis sehingga data yang didapat mudah untuk diolah, adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian sendiri dalam mengamati gejala gejala yang berkaitan dengan fokus penelitian, sehingga dapat ditemukan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti secara representatif yang berguna sebagai bahan analisis dalam penelitian.
2. Pedoman wawancara yaitu serangkain pertanyaan yang diberikan dari peneliti kepada pihak pihak yang mengetahui dan terlibat dalam pelaksanaan program bayar pajak dengan sampah dengan memfokuskan pada permasalahan penelitian yang digunakan sebagai pedoman penelitian dalam melakukan wawancara, agar memperoleh hasil yang diharapkan.
3. Catatan lapangan, buku catatan lapangan yang berguna untuk mencatat informasi utama yang bersifat verbal yang diperoleh selama penelitian berlangsung.

G. Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data diperoleh berupa rangkaian kata kata dan bukan berupa rangkaian angka yang tidak dapat disusun dalam struktur klasifikasi, data yang diperoleh berasal dari berbagai cara seperti observasi, wawancara, dokumen, dan rekaman, dan sebelum digunakan diproses terlebih dahulu. Analisis data kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan menelaah data dari berbagai sumber yang telah tersedia yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan dan dokumen. Menurut Creswell (2012:276-284) menjelaskan langkah langkah dalam analisis data sebagai berikut:



Gambar 6. Model Analisis Data Creswell

Sumber: Creswell (2012:277)

1. Mengolah dan menyiapkan data untuk dianalisis, dalam langkah ini dilakukan transkrip wawancara yang telah diperoleh peneliti dari narasumber diantaranya kbid pendataan dan penetapan, kasubbid pendataan BPPKA, dan staff bidang penataan dan pentaatan dinas lingkungan hidup program yang menangani inovasi

bayar pajak dengan sampah, serta dari masyarakat yang mengikuti pembayaran pajak dengan sampah. Selanjutnya adalah mengetik data yang telah diperoleh dari hasil observasi di lokasi penelitian, kemudian melakukan pemilihan dan menyusun data tersebut ke dalam jenis yang berbeda sesuai dengan sumber informasi yang telah didapat,

2. Membaca keseluruhan data, dalam tahap ini membaca catatan umum tentang data atau informasi yang telah diperoleh mengenai bayar pajak dengan sampah dari pihak yang terlibat dan sekaligus merefleksikan maknanya secara keseluruhan, hal tersebut supaya peneliti memahami tema yang diangkat dalam penelitian
3. Menganalisis data dengan mengkode data. Kode merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen sebelum memaknainya, langkah ini memberikan semacam tanda untuk menandai informasi atau data yang telah diperoleh, sebelum akhirnya data yang diperoleh mengenai program bayar pajak dengan sampah dimaknai
4. Menerapkan proses kode untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Pada langkah ini peneliti memberikan kode-kode untuk mendeskripsikan informasi yang telah didapatkan baik itu mengenai informasi tempat, narasumber, dan mengenai tema yang diangkat yaitu program bayar pajak dengan sampah supaya tidak ada kesalahan dalam mengelompokkan informasi atau data

5. Mendeskripsikan dari tema yang akan disajikan kembali dalam laporan narasi atau laporan kualitatif, tahap ini peneliti mendeskripsikan kembali informasi atau data yang telah diperoleh secara ringkas mengenai program bayar pajak dengan sampah
6. Langkah terakhir adalah Memaknai data, pada tahap ini peneliti mengartikan data atau informasi dari program bayar pajak dengan sampah di kota Mojokerto dan menghubungkannya serta menganalisis dengan teori dan literatur yang berkaitan dengan inovasi bayar pajak dengan sampah di Kota Mojokerto.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa langkah pertama menyiapkan data yang diperoleh yakni transkrip wawancara, kedua adalah dengan membaca data keseluruhan dari informasi yang telah didapat, ketiga adalah dikelompokkan data agar dapat dengan mudah memaknainya, keempat adalah menerapkan koding dari data yang sudah diperoleh, kelima mendeskripsikan dari tema penelitian, dan yang terakhir memaknai data yang sudah terkumpul seperti dari teori yang relevan.

H. Keabsahan Data

Pegunaan keabsahan data dalam penelitian digunakan untuk menepis tuduhan yang dilontarkan dalam penelitian kualitatif, oleh karena itu pengujian keabsahan data menggunakan empat kriteria sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2009: 269-277), yaitu kepercayaan (*credibility*), Keteralihan (*transferability*), Kebergantungan (*dependability*), dan Kepastian/dapat dikonfirmasi (*confirmability*)

1. kepercayaan (*credibility*)

Penetapan criteria derajat kredibilitas pada dasarnya validitas internal pada penelitian kualitatif. Kriteria ini berfungsi melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang diteliti. Untuk memperoleh data yang sah dalam penelitian ini, peneliti melakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, analisis kasus negatif, teknik triangulasi, menggunakan bahan referensi dan menggunakan Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data (Sugiyono, 2009: 270).

Wiersman dalam Sugiyono (2009: 273), mengemukakan triangulasi adalah teknik pengecekan data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik adalah menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama, tetapi dengan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu adalah menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama, dengan waktu yang berbeda (Sugiyono, 2009: 273-274).

2. Keteralihan (*transferability*)

Keteralihan pada dasarnya merupakan validitas eksternal pada penelitian kualitatif. Dapat terpenuhi dengan memberikan deskripsi secara rinci dan mendalam tentang hasil dan konteks penelitian. Keteralihan

bergantung pada kesamaan konsep antar konteks pengirim dan penerima. Tujuan dari keteralihan ini agar orang lain dapat memahami hasil penelitian, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya (Sugiyono, 2009: 276).

3. Kebergantungan/reliabilitas (*dependability*)

Dependability dalam penelitian kualitatif disebut reliabilitas. Suatu penelitian dikatakan dependability apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan 61 proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian (Sugiyono, 2009: 277)

4. Kepastian/dapat dikonfirmasi (*confirmability*)

Pengujian confirmability dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji obyektifitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif apabila hasil penelitian disepakati oleh banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Uji confirmability adalah menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Apabila hasil penelitian yang dilakukan merupakan fungsi dan proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Uji kepastian dapat diperoleh dengan cara mencari persetujuan beberapa orang termasuk dosen pembimbing

terhadap pandangan, pendapat tentang hal-hal yang berhubungan dengan fokus penelitian, dalam hal ini adalah data-data yang diperlukan (Sugiyono, 2009: 277).

Dalam penelitian ini keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut dapat dicapai dengan jalan antara lain:

1. Membandingkan data hasil pengamatan lapangan dengan data hasil wawancara kepada pihak yang terlibat dalam program bayar pajak dengan sampah
2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terdapat di lokasi penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan program bayar pajak dengan sampah
3. Membandingkan apa yang dikatakan oleh pihak yang menangani program bayar pajak dengan sampah tentang situasi penelitian dengan apa yang dilihat sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang., hal ini dilakukan dengan membandingkan pandangan pihak yang menangani dan yang mengikuti program bayar pajak dengan sampah, sehingga data yang diperoleh memiliki menjadi valid.

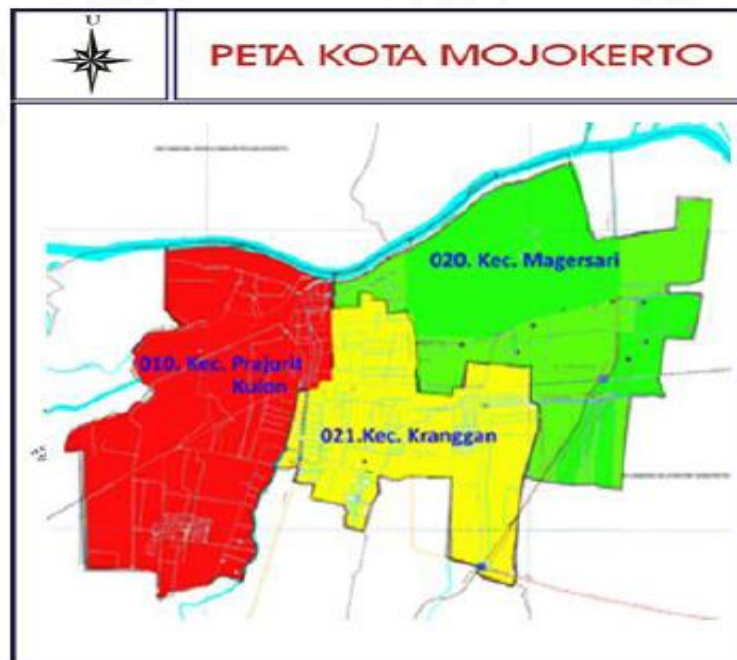
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Mojokerto

a. Letak Geografis

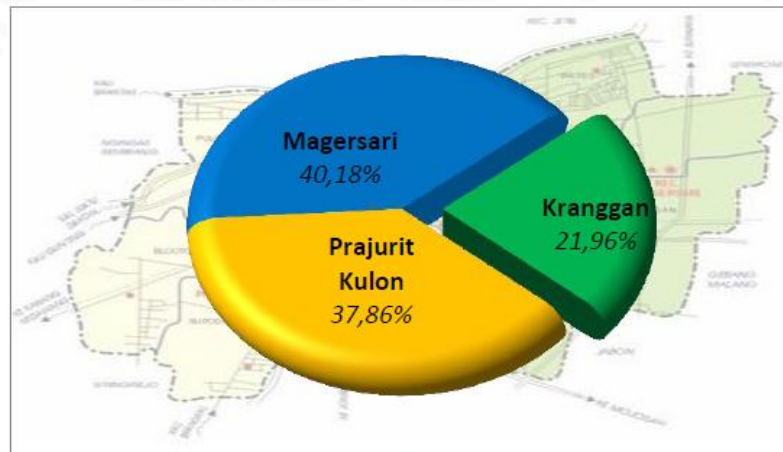


Gambar 7. Peta Kota Mojokerto

Sumber: Data sekunder hasil penelitian, 2018 (BPS Kota Mojokerto 2017)

Kota Mojokerto merupakan salah satu Kota di Jawa Timur yang memiliki julukan sebagai kota onde-onde, karena di kota Mojokerto banyak terdapat industri onde onde. Kota Mojokerto terletak di tengah-tengah Kabupaten Mojokerto, terbentang pada $7^{\circ} 33'$ Lintang Selatan dan $112^{\circ} 28'$ Bujur Timur.

Wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata - rata 22 m diatas permukaan laut dengan kondisi permukaan tanah yang agak miring ke Timur dan Utara antara 0- 3%. Batas-batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan sungai brantas yang membentang sebagai tanda pemisah kedua daerah yaitu antara wilayah Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto, disebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, dan disebelah barat dan selatan berbatasan dengan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.



Gambar 8. Perbandingan luas wilayah menurut kecamatan di Kota Mojokerto

Sumber: Data sekunder hasil penelitian, 2018 (BPS Kota Mojokerto 2017)

Wilayah Kota Mojokerto terbagi menjadi 3 kecamatan, kecamatan prajurit kulon di sebelah timur, kecamatan kranggan berada di tengah wilayah kota, sedangkan kecamatan magersari terletak di sebelah barat, dengan luas wilayah secara keseluruhan sebesar 16,47 km², dimana kecamatan magersari

mempunyai luas wilayah terbesar apabila dibandingkan dengan kecamatan lain, yaitu sebesar 40,18 % dari luas wilayah kota Mojokerto, kecamatan prajurit kulon sebesar 37, 86%, sedangkan kecamatan kranggan memiliki wilayah terkecil apabila dibandingkan dengandua kecamata lainya 21,96%. (BPS Kota Mojokerto, 2017)

b. Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Mojokerto menurut data BPS Kota Mojokerto tahun 2017 berjumlah sebesar 126.404 jiwa pada tahun 2016 berdasarkan proyeksi penduduk pada tahun 2010-2035, dengan besaran jenis kemin laki laki sebanyak 62.196 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 64.208 jiwa, dimana kepadatan penduduk di Kota Mojokerto sebesar 8.511 jiwa/km² dengan luas wilayah sebesar 16,47 km. pda tahun 2016 kepadatan penduduk paling tinggi berada di wilayah mentikan yatu sebesar 39.757 jiwa per km², dan wilayah Kelurahan Miji sebesar 23.460 jiwa per km²; selanjutnya Kelurahan Jagalan sebesar 19.627 jiwa per km².

Kota Mojokerto dapat dikategorikan sebagai kota sedang, dimana berdasarkan keriteria badan pusat statistik (BPS) berdasarkan kelas kota, kota mojokerto adalah kota dengan jumah penduduk antara 100.00-500.000 jiwa, berikut adalah jumlah penduduk kota mojokerto di kelurahan dan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Mojokerto Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin

| Kecamatan <i>Subdistrict</i> | Jenis Kelamin/Gender | | | Persentase <i>Percentage</i> |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| | Laki-laki <i>Male</i> | Perempuan <i>Female</i> | Jumlah <i>Total</i> | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 010. Prajurit Kulon | 20 498 | 20 788 | 41 286 | 29,46 |
| 001. Surodinawan | 4 178 | 4 227 | 8 405 | 6,00 |
| 004. Prajurit Kulon | 4 129 | 4 024 | 8 153 | 5,82 |
| 005. Blooto | 3 107 | 3 076 | 6 183 | 4,41 |
| 006. Mentikan | 3 645 | 3 869 | 7 514 | 5,36 |
| 007. Kauman | 1 564 | 1 718 | 3 282 | 2,34 |
| 008. Pulorejo | 3 875 | 3 874 | 7 749 | 5,53 |
| 020. Magersari | 29 788 | 30 270 | 60 058 | 42,85 |
| 002. Gunung Gedangan | 3 660 | 3 633 | 7 293 | 5,20 |
| 003. Kedundung | 7 919 | 7 699 | 15 618 | 11,14 |
| 004. Balongsari | 3 937 | 3 988 | 7 925 | 5,65 |
| 008. Gedongan | 1 116 | 1 194 | 2 310 | 1,65 |
| 009. Magersari | 2 943 | 3 099 | 6 042 | 4,31 |
| 010. Wates | 10 213 | 10 657 | 20 870 | 14,89 |
| 021. Kranggan | 19 201 | 19 616 | 38 817 | 27,69 |
| 001. Kranggan | 6 475 | 6 629 | 13 104 | 9,35 |
| 002. Meri | 4 340 | 4 348 | 8 688 | 6,20 |
| 003. Jagalan | 1 580 | 1 678 | 3 258 | 2,32 |
| 004. Miji | 4 606 | 4 684 | 9 290 | 6,63 |
| 005. Sentanan | 1 181 | 1 275 | 2 456 | 1,75 |
| 006. Purwotengah | 1 019 | 1 002 | 2 021 | 1,44 |
| Mojokerto | 69 487 | 70 674 | 140 161 | 100,00 |

Sumber: Data sekunder hasil penelitian, 2018 (BPS Kota Mojokerto 2017)

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa dari hasil registrasi penduduk, pada akhir tahun 2016 di Kota Mojokerto memiliki jumlah penduduk sebanyak 140.147 jiwa yang terbagi dalam tiga kecamatan dan 18 kelurahan, dengan jumlah penduduk laki laki sebesar 69.480 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 70.667 jiwa sedikit lebih besar dari pada penduduk laki-laki, kecamatan berpenduduk terbesar ada di kecamatan

magersari, kemudian diikuti oleh kecamatan prajurit kulon kemudian kecamatan keranggan (BPS Kota Mojoketo, 2017)

c. Perekonomian

Jumlah penduduk Kota Mojokerto Data Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto tahun 2017 sebanyak 140.161 jiwa dengan pembagian jumlah penduduk laki-laki sebesar 69.487 jiwa sedangkan penduduk perempuan sebanyak 70.674 jiwa, dan untuk masalah tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Mojokerto dari penduduk berjenis kelamin Laki-laki sebesar 85,02 persen sedangkan penduduk perempuan sebesar 55.60, ini artinya penduduk Laki-laki memegang atau menduduki mayoritas lapangan pekerjaan di Kota Mojokerto.

Data Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto tahun 2017 mengenai kependudukan telah mengelompokkan pekerjaan yang dilakukan oleh mayoritas penduduk Kota Mojokerto, yaitu berkerja pada bidang industri, perdagangan dan perhotelan. Pada bidang industri besar, sedang, kecil, mikro pada tahun 2016 sebanyak 11.398 tenaga kerja yang sudah terserap, jumlah tersebut mengalami kenaikan apabila dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 pekerja yang terserap sebanyak 8.974 pekerja, dari jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 2.424 pekerja yang terserap. Sehingga sektor industri menjadi sektor unggulan yang banyak menyerap pekerja, sedangkan untuk tenaga kerja yang terdapat pada sektor perdangan sebanyak 2.968 tenaga kerja dan untuk tenaga kerja yang terserap dalam sektor perhotelan sebesar tenaga kerja dengan klasifikasi tingkat pendidikan mulai dari SMP, SMA

sampai jenjang Perguruan Tinggi. Keberadaan industri di Kota Mojokerto selain dapat menyerap tenaga kerja dan mengatasi kemiskinan, juga berkontribusi dalam pemasukan daerah dalam hal ini adalah PAD yang bersumber dari pajak.

Penyerapan tenaga kerja dari sektor industri, perdagangan, dan perhotelan, di Kota Mojokerto masih banyak terdapat masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan atau bisa disebut dengan orang pengangguran, dari data badan pusat statistik Kota Mojokerto tingkat partisipasi angkatan bekerja di kota Mojokerto dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja sebesar 46.584 orang, dengan 85.055 % tingkat partisipasi kerja dan tingkat pengangguran sebesar 4.58 % untuk jenis kelamin Laki-laki, sedangkan 55.60 % tingkat partisipasi angkatan kerja dengan tingkat pengangguran sebesar 5.31% untuk jenis kelamin perempuan, tingkat partisipasi angkatan kerja tidak lepas dari kebijakan pemerintah kota dalam hal memberikan dorongan dan kemudahan fasilitas untuk para pencari kerja, karena sekecil apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota terkait dengan ketenagakerjaan akan berdampak pada para pencari kerja. Apabila hal tersebut tidak ditangani dengan baik maka keluarga pra sejahtera akan terus bertambah, dari data badan pusat statistik 2016 masih banyak terdapat keluarga prasejahtera yang tersebar di 3 kecamatan, kecamatan prajurit kulon sebesar 1.371 keluarga, kecamatan magersari sebesar 1.161 keluarga, dan yang terakhir kecamatan kranggan sebesar 867 keluarga.

Ketersediaan lapangan pekerjaan di Kota Mojokerto cukup beragam mulai dari sektor perdagangan, industri, dan perhotelan, namun untuk sektor pertanian sudah mulai berkurang disebabkan sudah berkurangnya lahan pertanian yang ada di Kota Mojokerto, berkurangnya lahan menurut data BPS Kota Mojokerto 2017 banyak dialih fungsikan untuk bangunan sejak 3 tahun terakhir banyak yang sudah bergeser kegunaan untuk perumahan, perkantoran, dan ruko-ruko. Apada tahun 2015 tanah yang bukan sawah tersebut memiliki luasan 1.472.88 hektar dan sebanyak 1.234.84 digunakan untuk bangunan, perumahan, pekarangan dan selebihnya berupa kebun, tegal dan lainnya.(BPS, 2017)

d. Visi misi Kota Mojokerto

Visi merupakan cita cita atau rencana kedepan yang akan dilakukan pemerintah daerah, untuk mewujudkan visi tersebut dibutuhkan strategi atau cara cara agar sebuah misi yang ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan rencana yang sebelumnya disusun, maka dibutuhkan sebuah misi guna mendukung dari visi yang sudah ada, adapun visi Kota Mojokerto, sebagai berikut:

Visi: "Terwujudnya Kota Mojokerto Sebagai Service City Yang Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera Dan Bermoral"

Misi:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- 2) Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi.

- 3) Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik dan memindai.
- 4) Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram (Mojokerto.go.id)

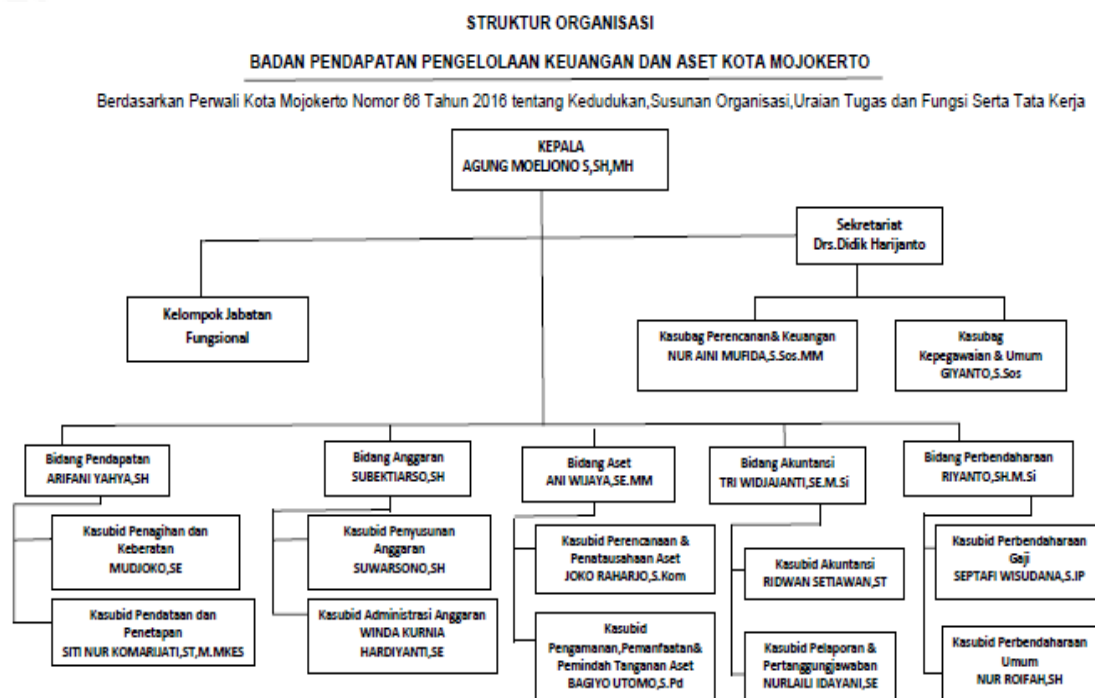
2. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset

a. Profil BPPKA Kota Mojokerto

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto merupakan salah satu Lembaga teknis pada Pemerintah Kota Mojokerto yang beralamatkan di Jalan Letkol Sumarjo No. 62 Kota Mojokerto, telp. (0321- 395945), dimana Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset ini mempunyai Tugas Pokok menyelenggarakan sebagian urusan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan anggaran daerah, pendapatan dan investasi daerah, dana perimbangan serta akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan asset Kota Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dinas – dinas Kota Mojokerto. Pembentukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto sebagai salah satu lembaga teknis daerah ini dilatar belakangi oleh Pelaksanaan Undang-undang No.32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dimana Kepala Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri dari laporan realisasi APBD, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, dan catatan atas laporan keuangan. Konsekuensi logis dari perubahan pertanggungjawaban tersebut maka dibentuklah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto guna terintegrasinya pengelolaan keuangan yang meliputi pencatatan dan pertanggungjawaban penerimaan kas dan pengeluaran kas, serta aset / barang daerah (Buku profil BPPKA Tahun 2015)

b. Struktur organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset



Gambar 9. Struktur organisasi BPPKA Kota Mojokerto

Sumber: Dokumen hasil penelitian tahun 2018 (Renstra BPPKA Kota Mojokerto 2014-2019)

c. Tugas pokok dan fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto. Dan sesuai dengan perkembangannya telah dirubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto. Kemudian dirubah di perwali no 66 tahun 2016 tentang kedudukan dan tugas pokok dan fungsi, Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Dinas dibantu oleh :

1. Sekretariat

Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(1) Tugas

Menyelenggarakan pengelolaan, penyusunan perencanaan program, urusan keuangan, kepegawaian, urusan umum dan mengkoordinasikan secara teknis maupun administratif pelaksanaan kegiatan dinas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Fungsi

1. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Kota Mojokerto;
 2. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
 3. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
 4. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan
 5. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
 6. Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi;
 7. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan dinas
2. Bidang pendapatan
- a. Tugas

Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pengelolaan Pendapatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
 - b. Fungsi
 1. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendapatan;
 2. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;

3. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah, khususnya pajak daerah;
4. Pelaksanaan pengendalian pendapatan daerah;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan realisasi hasil penerimaan pendapatan daerah;

3. Bidang anggaran

a. Tugas

Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan, penyusunan dan pembahasan APBD dan Perubahan APBD, pembinaan administrasi Keuangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan penyusunan kebijakan umum APBD;
2. Pelaksanaan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
3. Pelaksanaan Penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
4. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan.

4. Bidang aset

a. Tugas

Melaksanakan penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pengelolaan dan Pengawasan Inventarisasi dan Aset, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Fungsi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tentang Sistem dan Prosedur akuntansi pengelolaan keuangan kota;
2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan laporan keuangan;
4. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan investasi dan aset serta penghapusan barang milik daerah.

5. Bidang akuntansi

a. Tugas

Melaksanakan penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pengelolaan dan Pengawasan Inventarisasi dan Aset, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Fungsi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tentang Sistem dan Prosedur akuntansi pengelolaan keuangan kota;

2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 3. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan laporan keuangan;
 4. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan investasi dan aset serta penghapusan barang milik daerah.
5. Bidang perbendaharaan
- a. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang perbendaharaan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
 - b. Fungsi
 1. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 2. Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau Lembaga Keuangan Lainnya yang telah ditunjuk;
 3. Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah atas beban rekening kas umum daerah;
 4. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan pinjaman, obligasi, Badan Layanan

Umum, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro. (Buku profil BPPKA, 2015)

d. Visi dan Misi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto

Visi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto mempunyai visi:

“ Terwujudnya Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto sebagai Pengelola Pendapatan Daerah, Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dan berkualitas”.

Misi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto mempunyai misi:

- 1) Mewujudkan pendapatan daerah yang optimal dengan peningkatan secara berkelanjutan;
- 2) Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis Teknologi Informasi yang efisien dan efektif;
- 3) Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi manajemen keuangan dan aset.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto untuk mewujudkan misi tersebut diatas diperlukan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam program dan kegiatan untuk masing- masing misi dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

Tabel 3. Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan BPPKA

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| Visi | : | Terwujudnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Mojokerto sebagai Pengelola Pendapatan Daerah, Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang Akuntabel dan berkualitas. | | |
| Misi I | : | Mewujudkan Pendapatan Daerah yang Optimal dengan Peningkatan secara berkelanjutan | | |
| Tujuan | | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| Meningkatkan Pendapatan Daerah | | Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah | Optimalisasi penggalan sumber-sumber penerimaan Pajak Daerah secara intensifikasi dan ekstensifikasi | Optimalisasi Penyusunan Peraturan – Peraturan Daerah yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah |
| Misi II | : | Meningkatkan Sistem Pendapatan, Pengelolaan Keuangan daerah berbasis Teknologi Informasi yang efisien dan efektif | | |
| Tujuan | | sasaran | strategi | kebijakan |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| Terwujudnya Sistem Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset yang berbasis Teknologi Informasi | | Tersedianya Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dengan berbasis Teknologi Informasi yang optimal | Optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi sebagai sarana Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Mojokerto | Melakukan kerjasama dengan Pihak ke III dalam Penyediaan Sistem Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset yang berbasis Teknologi Informasi |

| | | | |
|--|---|---|--|
| Misi III | : | Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Manajemen Keuangan dan Asset | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Meningkatnya akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Manajemen Keuangan dan Asset | Meningkatnya Pelaporan Keuangan dan Asset secara benar sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan tepat waktu | Melakukan pengkajian RAPBD/PAPBD dalam rangka mewujudkan Pengelolaan APBD/PAPBD yang transparan dan Akuntabel | Melakukan koordinasi dalam penyampaian laporan yang benar dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan seluruh SKPD yang ada serta dilakukan pembahasan dengan Legistlatif |

Sumber: Dokumen hasil penelitian, 2018 (Renstra BPPKA 2014-2019, 2016)

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Inovasi Bayar Pajak Dengan Sampah Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Mojokerto

a. *Relative Advantage* (Keuntungan Relatif)

Pelaksanaan program bayar pajak dengan sampah di Kota Mojokerto memberikan kemudahan serta keuntungan dan kemudahan bagi masyarakat yang mengikuti program bayar pajak dengan sampah, hal tersebut seperti keterangan dari Ibu Nur selaku kasubbid pendataan dan penetapan BPPKA, bahwa :

“Program bayar pajak pakai sampah dapat meringankan beban masyarakat atas tekanan ekonomi, kemudian memudahkan

masyarakat untuk membayar pajaknya. Kita juga ada program jemput bola, artinya kita mendatangi bank sampah. Dari BPPKA tim pajaknya itu mendatangi warga, kemudian warga disitu bisa membayar pajak hanya dengan menunjukkan buku tabungannya saja pajak bisa terbayar. Misalnya disitu tagihan pajaknya lebih tinggi dari tabungannya, mereka bisa menambahkan dengan uang cash atau tunai. Kemudian dari sisi lingkungan hidup, kebersihan sanitasinya lebih terjaga, lingkungan menjadi semakin bersih green and clean, karena sampah yang diproduksi dirumah tangga itu sudah direduksi dan dipisahkan, jadi produksi sampah itu bisa diminimalisir.”(Tanggal 17 November 2017, di Kantor BPPKA)

Menguatkan keterangan kasubid pendataan dan penatan BPPKA, keterangan dari Pak Yahya selaku kabid pendataan BPPKA menerangkan, bahwa:

“adanya program bayar bayar pajak pakai sampah ini itu untuk meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak, karena masyarakat tinggal mengumpulkan sampah pajak juga bisa terbayar dan hal tersebut sederhana, dan juga dengan adanya program ini kan secara juga dapat menjadikan lingkungan sekitar bersih. (Tanggal 28 Februari 2018, di kantor BPPKA)

Bagi masyarakat yang mengikuti program bayar pajak dengan sampah tidak perlu mengeluarkan uang, artinya uang tidak menjadi alat pembayaran pajak PBB, melainkan masyarakat pembayaran pajaknya dari aktifitas mengumpulkan sampah secara berkala hingga ditentukan pembayaran pajak oleh masing masing bank sampah, pembayaran pajak yang identik dengan uang secara tunai berubah, perubahan tersebut pada sisi alat pembayaran, dimana masyarakat dalam program bayar pajak dengan sampah mengumpulkan sampah terlebih dahulu, dengan aktifitas mengumpulkan sampah untuk membayar pajak, secara otomatis

lingkungan sekitar masyarakat juga semakin bersih, dan membuat masyarakat sadar akan lingkungnya.

Keberadaan program bayar pajak dengan dengan sampah dapat membantu meringankan besaran pajak yang ditanggung oleh masyarakat, karena hanya dengan mengumpulkan sampah yang tidak terpakai pajak bisa terbayar, dalam program bayar pajak masyarakat memakai sistem menabung, artinya masyarakat dapat menabung sedikit demi sedikit dengan mengumpulkan sampah ke bank sampah.

Keterangan di atas diperkuat dengan penjelasan dari bu Nurul masyarakat yang mengikuti program bayar pajak dengan sampah yang mengungkapkan bahwa:

“ya bagaimana ya, biar tidak menyimpan sampah dirumah, bahwa ada yang lebih praktis dalam membayar pajak, sebelum ada program bayar pajak pakai sampah ya sampah kadang dijual ke pemulung kadang dibuang begitu saja di tempat sampah, sekarang kan enak sampah dikumpulkan untuk bisa membayar pajak, bisa dibuat nabung, kalau semisal tidak punya uang buat bayar pajak kan sudah ada persediaan, seperti simpanan jadi bayar pajaknya lebih ringankan kan karena bayarnya pakai sampah. (Tanggal 1 Februari 2018, di rumah bu Nurul, alamat Suromulang gang 3 Kota Mojokerto)

Keterangan senada juga diungkapkan oleh bu Isma, yang mengungkapkan bahwa:

“ini kan juga untuk mengurangi sampah yang berserakan, juga supaya lingkungan lebih bersih, dan supaya ringan ketika membayar pajaknya karena hanya mengumpulkan sampah.” (Tanggal 4 februari 2018, di rumah bu Isma alamat kedungkwali gang 3 Kota Mojokerto)

Keterangan senada juga diungkapkan oleh bu Suryani, yang mengungkapkan bahwa:

“kalau yang saya rasakan saya merasa jadi ringan membayar pajak mas, karena tinggal mengumpulkan sampah kemudian bisa ditabung juga, dan juga membuat sampah yang biasanya saya buang menjadi lebih bermanfaat karena bisa dijual ke bank sampah dekat sini untuk membayar pajak. (tanggal 18 Februari 2018, lokasi rumah ibu Suryani jalan kawi Kota Mojokerto)

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa program bayar pajak dengan sampah dapat meringankan beban masyarakat mengenai besaran pajak yang ditanggungnya, dan pembayaran pajak semakin ringan karena masyarakat dalam membayar tidak perlu mengeluarkan uang secara tunai, melainkan dengan mengumpulkan sampah di bank sampah dengan cara ditabung secara berkala sedikit demi sedikit dengan mengumpulkan sampah di bank sampah maka pajak dapat terbayarkan, serta dapat membuat lingkungan menjadi bersih.

b. *Compatibility* (kesesuaian)

Pembayaran pajak dalam program bayar pajak dengan sampah dilakukan di RT/RW setempat dengan didatangi oleh mobil keliling dari BPPKA atau melalui pengurus bank sampah ke kantor BPPKA , dimana mobil tersebut keliling ke bank sampah bank sampah yang ada di Kota Mojokerto pada saat pembayaran pajak. Secara otomatis mekanisme pembayaran pajak khususnya pajak bumi dan bangunan ada sedikit

perubahan yang dari mekanisme biasanya, Menurut ibu Nur selaku kasubbid pendataan dan penetapan di BPPKA mengungkapkan bahwa:

“jadi kalau kita lihat spanduk atau apa yang ada di jalan itu yang ada tulisan bayar pajak pakai sampah, rasanya gimana sih caranya, kan begitu. Jadi ada mekanismennya, mekanismenya itu warga/masyarakat menghimpun sampahnya itu melalui bank sampah itu melalui RT/RW, mereka punya kelompok kelompok itu namanya bank sampah, dimana bank itu mengelola sampah disekitarnya jadi pertama mereka masuk sebagai anggota bank sampah, kemudian mereka setor sampah kemudian bisa dijadwal entah 1 hari sekali atau 2 hari sekali tergantung kesepakatan dari hasil sampah yang timbun, kemudian dipisahkan dulu kemudian mereka timbang, kemudian dari timbangan itu masyarakat akan menerima besaran harganya, mereka setor ke bank sampah induk. Setelah ditimbang mereka akan menerima besaran harga, misalnya jenis sampah plastik 1 kilonya berapa nanti diganti dengan uang, kemudian uang itu dimasukkan ke dalam buku tabungan. Kemudian pada saat pembayaran hanya menunjukkan sppt dan buku tabungan saja pajak sudah bisa terbayarkan” (tanggal 17 November 2017, di Kantor BPPKA)

Penjelasan diatas diperkuat dengan keterangan dari pak yahya selaku kasubbid pendataan BPPKA, mengungkapkan bahwa:

“Karena ini kan masih berupa berupa sampah ya, ketika anggota bank sampah itu mengumpulkan rumah tangga kemudian memilah mana yang plastik mana yang kertas, mana yang bisa didaur ulang mana yang tidak bisa didaur ulang, mungkin ada yang bersih atau gimana kemudian dipilah dahulu, kemudian disetorkan ke kelompok bank sampahnya, kemudian ditimbang disana, kemudian dari kelompok bank sampahnya ini diuangkan menjadi tabungan masih masih anggota, ketika sudah mencukupi untuk pembayaran PBB mereka akan mengambil uang dari masing masing anggota, kemudian pada saat pembayaran petugas pembayaran petugas juga bisa mendatangi kelompok bank sampah, kemudian masyarakat bisa menunjukkan buku tabungan, dan kemudian dikasih bukti pembayaran sah atau dari kelompok bank sampahnya datang ke BPPKA untuk membayarkan pajak dari anggotanya” (Tanggal 28 Februari 2018, di kantor BPPKA)

Adapun teknis pembayaran pajak PBB sebagai berikut :



Gambar 10. Mekanisme Pembayaran Pajak Dengan Sampah

Sumber: Dokumen hasil penelitian, 2017 (materi presentasi BPPKA, 2017)

Tempat pembayaran ketika adanya program bayar pajak dengan sampah dilakukan semakin dekat dan terjangkau oleh masyarakat, memang saat ini pembayaran pajak bisa dilakukan di kelurahan, bank jatim, kantor BPPKA, mobil keliling yang mendatangi tempat keramaian, Menurut Ibu Nur selaku kasubbid pendataan dan penetapan yang mengungkapkan bahwa:

“Pembayaran pajak selama ini bisa dilakukan oleh masyarakat di kelurahan, kantor BPPKA, mobil keliling yang hadir dalam keramaian misalnya pada waktu cfd, alun alun dengan cara menunjukkan sppt kemudian dikasih bukti pembayaran.” (tanggal 17 November 2017, di Kantor BPPKA)

Kemudian diperkuat dengan keterangan dari Pak Yahya selaku kabit pendataan dan penetapan BPPKA, bahwa:

“pembayaran pajak PBB saat ini masyarakat bisa melakukannya di kantor kita, bank jatim, kelurahan, yang pastinya sama membawa sppt masing masing setelah itu baru diberi bukti pembayaran pajak” (Tanggal 28 Februari 2018, di kantor BPPKA)

Berdasarkan keterangan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa mekanisme pembayaran pajak dalam program bayar pajak dengan sampah sama saja seperti pembayaran pajak PBB seperti biasanya yaitu dengan membawa sppt kemudian diberi bukti pembayaran pajak PBB, hanya memiliki perbedaan tempat pembayaran dan cara pembayaran pajak saja, dimana masyarakat yang biasanya bisa membayar pajak di kelurahan, bank jatim, mobil keliling pajak, bagi masyarakat yang mengikuti program bayar pajak dengan sampah, masyarakat dapat membayar pajaknya di RT/RW/ tempat dimana bank sampah berada, ketika pembayaran pajak masyarakat hanya tinggal menunjukan buku tabungan dan sppt saja atau pengurus bank sampahnya yang pembayaran pajak dari masyarakat dengan mendatangi BPPKA dengan menyetorkan uang dari anggota bank sampah yang sudah terkumpul beserta membawa SPPT anggota bank sampah yang mengikuti program bayar pajak pakai sampah, kemudian bukti pembayaran PBB yang sah dikasih kepada masyarakat. Sedangkan perbedaan dari segi alat pembayaran yang biasanya menggunakan uang secara cash, dalam program pogram bayar pajak dengan sampah alat pembayaran pajak tetap

menggunakan uang, namun caranya masyarakat harus mengumpulkan sampah secara berkala terlebih dahulu kemudian diuangkan untuk digunakan membayar pajak.

c. *Complexity* (kerumitan)

Kerumitan pada sebuah inovasi akan dapat menghambat pelaksanaan apabila tingkat kerumitan yang rumit, Inovasi bayar pajak dengan sampah di Kota Mojokerto dalam pelaksanaannya masyarakat tidak perlu datang ke kelurahan, bank jatim, dan kantor BPPKA, karena khusus masyarakat yang mengikuti program bayar pajak dengan sampah pembayaran dapat dilakukan di RT/RW, menurut Ibu Nur selaku kasubid

Pendapatan dan penetapan di BPPKA mengungkapkan bahwa:

“tidak ada kerumitan, justru adanya program bayar pajak pakai sampah ini mempermudah masyarakat, kalau untuk mengikutinya itu mendaftarkan diri menjadi anggota bank sampah, dan tidak perlu jauh jauh membayarkan pajaknya, membayar pajaknya cukup di RT/RW setempat, karena petugas pajak dari BPPKA juga ada yang datang langsung datang ke bank sampah pada saat pembayaran pajak sesuai permintaan masyarakat/pengurus bank sampahnya. (Tanggal 17 November 2017, di Kantor BPPKA)

Menguatkan keterangan dari kasubid pendataan dan penetapan di BPPKA, menurut keterangan Pak Yahya kabid pendataan menerangkan, bahwa:

“Kalau menurut saya tidak ada kerumitan sebenarnya, justru dari masyarakatnya ini semakin dipermudah karena pembayaran pajak hanya dengan sampah serta pembayaran juga semakin terjangkau karena pembayaran bisa melalui kelompok bank sampah.” (Tanggal 28 Februari 2018)

Kemudahan akses pembayaran pajak justru terselip dalam program bayar pajak dengan sampah, apabila dibandingkan dengan sistem pembayaran pajak yang menggunakan uang secara langsung, memang masyarakat yang mengikuti program bayar pajak pakai sampah ini harus mempunyai kesadaran lingkungan, karena pembayaran pajaknya adalah dari mengumpulkan sampah yang tidak terpakai seperti jenis kertas, plastik, besi yang tidak terpakai. Pendapat tersebut dipekuat dengan pendapat dari masyarakat yang mengikuti program bayar pajak dengan sampah, menurut ibu Nurul mengungkapkan bahwa:

“Sebenarnya ya ngak rumit mas, program itukan memang membutuhkan kesabaran untuk mengumpulkan sampah sedikit demi sedikit, itung itung ya buat kebersihan lingkungan juga, berbeda dengan pembayaran pajak yang biasanya saya lakukan, biasanya saya begitu sppt sudah ada berselang beberapa minggu atau beberapa saya baru bayar pajaknya.”(Tanggal 1 Februari 2018, Jalan Suromulang Gag 3)

Kemudian pendapat ibu Suryani juga mengungkapkan bahwa hal yang senada, mengungkapkan bahwa:

“ngak mas, malah memudahkan saya sebagai masyarakat, karena membayar pajaknya jadi dekat, tinggal ke RT dekat sini aja udah bisa bayar pajaknya, tapi ada persyaratannya itu harus menjadi anggota bank sampah dahulu (tanggal 18 Februari 2018, Jalan kawi raya)

Keterangan senada juga diungkapkan oleh bu Isma selaku masyarakat yang mengikuti program bayar pajak dengan sampah, mengungkapkan bahwa:

“kalau menurut saya sih ngak rumit mas, saya tinggal mengumpulkan sampah ke bank sampah tapi sebelumnya harus menjadi anggota

bank sampah terlebih dahulu, yang rumit cuma pas mengumpulkan sampahnya saja karena produksi sampah saya juga kadang gak menentu.”

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa inovasi bayar pajak dengan sampah tidak memiliki sisi kerumitan, masyarakat yang pertama mendaftarkan diri sebagai nasabah bank sampah terlebih dahulu, setelah itu masyarakat sudah bisa mengumpulkan sampah untuk digunakan membayar pajak, kemudian hasil dari penjualan sampah tersebut ditabung dan dimasukkan buku tabungan masing masing anggota, dan pembayaran semakin mudah, karena pembayaran pajak dalam program bayar pajak dengan sampah semakin dekat dan tidak jauh, hanya di RT/RW terdekat pembayaran pajak sudah bisa dilakukan.

d. *Triability* atau kemungkinan untuk dicoba

Program bayar pajak dengan sampah sebelum dluncurkan dan dikenalkan, ada pelaksanaan uji coba yang dilakukan di bank sampah cabang yang memang sudah terbentuk sebelum program bayar pajak dengan sampah, tujuan dilakukannya uji coba atau uji publik apakah kedepan program bayar pajak dengan sampah dapat berjalan atau tidak karena dengan uji coba maka akan diketahui apakah sebuah inovasi atau program dapat diputuskan untuk dijalankan melihat, seperti yang dungkapkan oleh pak Edi selaku staff bidang pentaatan dan pengendalian lingkungan hidup dinas lingkungan hidup yang menerangkan bahwa:

“pernah dilakukan uji coba, itu pasti, tidak semuanya. Tidak semuanya, ada salah teknis bank sampah yang mungkin sudah mendahului, kita kasih wawasan bersama BPPKA bagaimana sih pembayaran, bagaimana cara untuk bisa didata seperti itu, maksudnya bank sampah yang sudah mendahului itu bank sampah yang sudah berdiri sejak lama dan karena mereka kan secara kontinue sudah melakukan kegiatan secara rutin, itu kita coba kita tawarkan bersama sama, bagaimana sih enakunya. Adanya integrasi program itu kita kasih sampling, bahwa ada potensi bagus sampah untuk bisa membayar pajak. (Tanggal 7 Februari 2018, di kantor DLH)

Keterangan tersebut diperkuat dengan keterangan senada dari Ibu Nur selaku kasubbid pendataan dan penetapan di badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset, beliau menerangkan bahwa:

“uji coba program itu kita memetakan saja, memetakan itu melihat kemungkinan apakah bisa berjalan atau tidak, kita petakan itu seperti disimulasi bagaimana apabila program ini jalan kendala apa yang sesungguhnya menghambat, itu yang paling penting ya, ternyata setelah kita lakukan hampir tidak ada yang menghambat artinya sudah dipastikan program sudah bisa berjalan, dan karena wadah wadah kita yang kita ajak kerjasama itu sudah terbuka, tidak ada permasalahan apapun jadi mereka kita jelaskan sudah tau tujuan dan maksudnya sudah tinggal jalan saja.”(Tanggal 8 Februari, di kantor BPPKA)

Keterangan dari pak Edi selaku staff bidang pentaatan dan pengendalian lingkungan hidup dinas lingkungan hidup dan bu Nur selaku kasubid pendataan dan penetapan BPPKA diperkuat dengan pendapat dari pak Yahya selaku kabid pendataan BPPKA, mengungkapkan bahwa:

“awal kali kita juga eksperimen dulu ya, ada beberapa masyarakat yang kita ajak, kita sosialisasikan, kalau kita punya program seperti ini gimana, ternyata disambut oleh mereka terutama para pegiat pegiat lingkungan, pegiat lingkungan ini sangat antusias sekali ketika kita luncurkan, wah ini gampang dan enak, ternyata pembayaran pajak itu mudah dan tidak membebani perekonomian keluarga dan sebagainya, da mereka sangat mendukung, sehingga kita luncurkan program ini.”

Berdasarkan keterangan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa.(Tanggal 28 Februari 2018, di Kantor BPPKA)

sebelum pelaksanaan program bayar pajak dengan sampah pernah dilakukan uji coba program terlebih dahulu yang dilakukan di beberapa bank sampah cabang yang padasaat itu sudah berdiri dan melakukan aktifitas mengumpulkan sampah dari masyarakat, uji coba dilakukan lebih kepada penawaran, pengenalan atau sosialisasi mengenai tujuan dan maksud program bayar pajak pakai sampah program, oleh BPPKA kepada para kader bank sampah yang sudah berdiri yang sebelumnya sudah melakukan aktifitas pengelolaan sampah dari masyarakat secara rutin di lingkungannya, dan juga pemberian wawasan kepada para kader atau pengurus bank sampah cabang mengenai cara pembayaran pajak serta pendataannya.

e. *Observability* atau kemudahan untuk diamati

Inovasi yang baru agar bisa dilihat oleh masyarakat secara umum harus memiliki sisi bagaimana inovasi tersebut bekerja dan memiliki hasil yang baik yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar, sehingga masyarakat mampu merasakan manfaatnya, menurut keterangan pak Yahya kapid pendataan BPPKA, bahwa:

“masyarakat dalam hal ini akan semakin mudah, dan masyarakat juga apabila mengikuti program ini juga memiliki kontribusi bagi kebersihan lingkungan serta percepatan realisasi penerimaan PBB, jadi tidak memudahkan dalam hal pembayaran saja, disamping pembayaran pajaknya yang semakin ringan karena tidak mengeluarkan uang”(Tanggal 28 Februari 2018, di Kantor BPPKA)

Keterangan kabid pendataan diperkuat dengan keterangan kasubbid pendataan dan penetapan Ibu Nur, bahwa:

“yang jelas dalam program ini sebenarnya memiliki manfaat yang juga kembali ke masyarakatnya juga pembayaran pajak menjadi mudah serta ringan dan kebersihan lingkungan sekitar masyarakat juga secara tidak langsung langsung juga semakin terjaga karena sampah yang bisa dibuang begitu saja sekarang bisa digunakan untuk membayar pajak”(Tanggal 8 Februari 2018, kantor BPPKA)

Berdasarkan keterangan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya program bayar pajak semakin mudah dan ringan karena pembayaran pajak sekarang bisa menggunakan sampah dengan cara mengumpulkan sampah, disamping itu secara tidak langsung membuat lingkungan sekitar menjadi semakin bersih karena sampah yang biasanya diproduksi oleh masyarakat tidak dibuang begitu saja, melainkan sampah menjadi memiliki nilai ekonomis, sehingga manfaatnya kemudahan dalam membayar pajak dan lingkungan juga kembali kepada masyarakat sendiri.

2. Faktor Pendukung dan penghambat inovasi bayar pajak dengan sampah sebagai upaya meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan perkotaan di Kota Mojokerto

a. Faktor pendukung

1. Peran Pemimpin dan pihak terkait (DLH dan Bank Sampah induk)

Program bayar pajak pakai sampah merupakan program yang melibatkan beberapa pihak diantaranya DLH dan bank sampah, dalam Pelaksanaannya

program bayar pajak dengan sampah tidak terlepas dari peran dan keberadaan Walikota Mojokerto yaitu Mas'ud Yunus dan pihak terkait seperti DLH dan bank sampah, menurut bu Nur selaku kasubbid bidang pendapatan dan penetapan mengungkapkan bahwa:

“program bapak walikota ya, artinya dari atas itu sudah ada dukungan pemerintah, dukungan dari dinas dinas terkait sudah saling terhubung, kemudian dari kecamatan dan SKPD terkait juga banyak dukungan kemudian dari kelurahan, RT/RW, juga banyak dukungan, artinya yang menguatkan program ini.”(tanggal 17 November 2017, di Kantor BPPKA)

Inovasi bayar pajak pakai sampah mempunyai dukungan dari atas dalam hal ini adalah dukungan dari bapak walikota Mas'ud Yunus, menurut bu Nur selaku kasubbid pendataan dan penetapan di BPPKA mengungkapkan lebih jelas lagi bahwa: “

“bayar pajak merupakan cerminan didalam visi Walikota Mojokerto yang kedua yaitu Terwujudnya Kota Mojokerto Sebagai Service City Yang Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera Dan Bermoral.”(Tanggal 12 Desember 2017, di kantor BPPKA)

Keterangan dari ibu Nur kasubbid BPPKA diperkuat dengan keterangan dari pak Yahya kapid pendataan, yang menerangkan bahwa:

“Jadi ini kan program dari pak wali, program pak wali kan ingin pelayanan kepada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat tentunya banyak hal salah satunya kalau dari pembayaran pbb pakai sampah memperingan beban masyarakat, sampah aja bisa digunakan untuk membayar pajak”(Tanggal 28 Februari 2018, di kantor BPPKA)

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut salah satunya adalah dengan Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing

tinggi, dan salah satunya untuk mewujudkan visi Kota Mojokerto adalah dengan dikeluarkannya program bayar pajak dengan sampah, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan bekerjasama dengan dinas lingkungan hidup, dan bank sampah induk, didalam program bayar pajak pakai sampah, peran Walikota juga turut andil memberikan contoh kepada masyarakat



Gambar 11. Wali Kota Mas'ud Yunus menimbang sampah di bank Sampah

Sumber: Data sekunder hasil penelitian, 2018 (news.co.id, 2017)

seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nur selaku kasubdib bidang pendapatan dan penetapan mengungkapkan bahwa:

“jadi masyarakat itu dihimbau untuk mengikuti program bayar pajak pakai sampah, untuk mewajibkan sesebenanya belum, himbauan dengan contoh, setiap minggu itu pak walikota atau PSN ya, pada saat ada kegiatan penimbangan sampah itu hadir, secara tidak langsung akan memberikan contoh kepada masyarakat, bahwa seperti inilo yang

seharusnya dilakukan oleh masyarakat.”(Tanggal 8 Februari 2018, di kantor BPPKA)

Selain pak walikota yang setiap minggunya hadir dalam penimbangan sampah di bank sampah di kota Mojokerto, dan juga di bantu oleh pihak yang terlibat dalam program bayar pajak dengan sampah, dimana pihak pihak tersebut juga berupaya menyediakan fasilitas, seperti halnya BPPKA dalam program bayar pajak pakai sampah menyediakan mobil pajak keliling yang akan berkeliling ke bank sampah yang ada di Kota Mojokerto pada saat pembayaran PBB sesuai permintaan dari masyarakatnya atau bank sampah masing masing kelurahan, seperti gambar berikut:



Gambar 12. Pembayaran Pajak PBB dengan sampah Melalui Mobil Keliling Pajak

Sumber: Data sekunder hasil penelitian 2018, (harianbhirawa.co.id, 2018)

sedangkan untuk pihak lainnya ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, dinas lingkungan hidup dalam program bayar pajak pakai sampah memiliki peran

untuk menyediakan sarana dan prasarana pemilah sampah, seperti kantong pemisah sampah, menyediakan angkutan untuk mengangkut sampah yang sudah terkumpul di bank sampah cabang yang ada di Kota Mojokerto sesuai jadwal yang telah ditentukan, memberikan pelatihan khusus kepada kader lingkungan atau pengurus bank sampah induk Kota Mojokerto, serta membantu mempromosikan program bayar pajak dengan sampah melalui iklan dipinggir jalan, berikut adalah iklan yang dipasang DLH di pingir jalan pusat keramaian:





Gambar.13 Iklan Program Bayar Pajak dengan Sampah

Sumber: Data primer hasil penelitian, 2018 (Lokasi Di jalan Sirodinawan, Taman Kehati, Dan Jalan Empunala Kota Mojokerto)

Pihak lain untuk bank sampah induk lebih kepada menyiapkan dan memfasilitasi pembentukan dan pendirian bank sampah cabang yang ada di Kota Mojokerto, menjualkan sampah yang sudah terkumpul dari bank sampah cabang kemudian menjualnya ke pihak ketiga dalam hal ini adalah pabrik, sekaligus memberikan pelatihan pengelolaan sampah kepada para kader bank sampah cabang yang masih baru terbentuk dalam program bayar pajak dengan sampah.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa program bayar pajak dengan sampah tersebut tidak lepas dari peran Walikota, dimana program tersebut didukung dari keberadaan salah satu misinya yaitu, Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi. Dan juga tidak lepas dari peran pihak terkait seperti DLH dan bank sampah juga

memberikan fasilitas yang mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan program bayar pajak dengan sampah.

2. Keberadaan Bank Sampah

Bank sampah merupakan tempat dimana masyarakat dapat mengumpulkan sampah yang sebelumnya sudah dipilah maupun yang belum dipilah dari skala rumah tangga. Keberadaan bank sampah di Kota Mojokerto sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program bayar pajak dengan sampah, menurut Bu Nur selaku kasubid pendataan dan penetapan BPPKA, menjelaskan bahwa:

“jadi yang pertama itu ada bank sampah terlebih dahulu, sebelum ada pembayaran pajaknya, dimana aktifitas bank sampah adalah tempat untuk menabung dan memilah sampah untuk dijadikan uang, setelah itu dipakai untuk membayar pajak pakai sampah. Sehingga posisinya penting dalam program ini.”(Tanggal 4 Desember 2017, di kantor BPPKA)

Keterangan bu Nur kasubid pendataan dan penetapan diperkuat dengan pernyataan Kabid pendataan pak Yahya, Menerangkan bahwa:

“saya kira itu sangat penting ya, karena kelompok bank sampah ini sebagai mitra kita dalam membayarkan pajak dari masyarakat, tidak hanya membayarkan pajak, kelompok bank sampah ini juga sebagai pendorong masyarakat agar mempunyai cara pandang terhadap sampah, bahwa hanya dengan sampah juga bisa dibuat membayar pajak.”(Tanggal 28 Februari 2018, di kantor BPPKA)

Keberadaan bank sampah sebagai pendukung dalam pelaksanaan program bayar pajak dengan sampah, dan keberadanya berkembang cukup baik, hal tersebut terbukti, pada tahun 2017 jumlah bank sampah sudah

mencapai 111 bank sampah. Namun dari 111 banyak bank sampah, masih ada sebagian besar masih baru berdiri, sehingga hanya ada 31 bank sampah yang sudah ada di wilayah di Kota Mojokerto yang sudah benar benar aktif melakukan pembayaran PBB pada tahun 2017. Adapun data akhir rekapitulasi seluruh bank sampah yang ada di Kota Mojokerto, sebagai berikut:

Tabel 4. Daftar Seluruh Bank di Kota Mojokerto Sampah Tahun 2017

| No | Bank Sampah | Alamat | No | Bank Sampah | Alamat |
|----|------------------------|--|----|----------------|----------------------------|
| 1 | Tiga puluh | Jl. Suromulang dlm III/Perum citra sirodinawan estata | 56 | Amat sejahtera | Jl Lombok perum gatoel |
| 2 | Putri ayu | Jl. Galunggung I/ 02 Perum Kedundung, Indah Kedundung | 57 | Banjar | Trenggilis 02. Kel. Blooto |
| 3 | Merbabu alam sejahtera | Jl. Merbabu raya, 026 Perum Griya Kedundung Ndah Kedundung | 58 | Berkah | Perum gatoel rt 03 rw 02 |
| 4 | Resik sejati | Balongsari Gg sawah, lingkungan rw 02 balongsari | 59 | Artha warga | Rw 01 ling.kranggan II 31 |
| 5 | Arjuna | Jl. Arjuno 1 perum wates, | 60 | Setya makmur | sumolepen rw iv |
| 6 | Merpati Gn | gunung anyar lingkungan rt 01/rw 06 gunung gedangan | 61 | Merpati | Sinoman gang 1. Kel miji |
| 7 | Permata meri | Blok A3/18 perum griya meri, meri | 62 | SMPN 4(lombok) | Jl. Lombok No II |
| 8 | lestari | Balongrawe rt 01/re 04 kedundung | 63 | Resik mandiri | Kedungkwali rw 03 kel.miji |
| 9 | Makmur sejahtera | Prajurit kulon Gg 4 No 162 parjurit kulon | 64 | Jagalan lor | Jl. Residence pamuji |
| 10 | Berdikari | Jl. Pulo rejo IV rt 03/rw 02 lingkungan balongcangkng pulorejo | 65 | Burgenvil | Kalimati 4 |
| 11 | Sejahtera | Kedungsari rw 01 gununggedangan | 66 | Spensa | Jl. Gajahmada |

| No | Bank Sampah | Alamat | No | Bank Sampah | Alamat |
|----|--------------------|--|----|-----------------|------------------------------|
| 12 | Alami | Prajurit kulong Gg 4, prajurit kulon | 67 | Arto moro dewe | Karanglo gang baru |
| 13 | B.tri | Bancang Gg IV, rw 03 wates | 68 | Jalah arta | Kedungmulang rw 03 |
| 14 | Hijau berseri | Surodinawan gang 3 | 69 | Kemaning | Asrama korem |
| 15 | Maju jaya | Rw 08 lingkungan keboan gunung gedangan | 70 | Sedap malam | Rt 03 rw 02 sumolepen |
| 16 | Fitrah | Keradenan Gg I rw 03, lingkungan keradenan kauman | 71 | Baru semi | Kalimati gang 1 kel.jagalan |
| 17 | Bunga | Jl. Melati 31 wates rt 02 rw 03 wates | 72 | Barokah | Panderman VII/12 |
| 18 | Sumber arta | Lingkungan rw 02 perum griya, kedundung indah. Kedundung | 73 | Delima | Pulorejo |
| 19 | Arto moro | Lingkungan rw 01 balongkrai pulo rejo | 74 | SMK Paramita | Jl empunala kel. Balongsari |
| 20 | Setunggal | Balongcok Gg wiryo lingkungan rw 01 balongsari | 75 | Anggrek 2 | Jagalan gang 2 rw 2 |
| 21 | Arlang berseri | Kedungmulang lingkungan rw IV, sirocinawan | 76 | Sumubar | Suromulang barat |
| 22 | Cempaka | Jl. KH. Dahlan sentanan | 77 | Sedap malam | Jl. Empunala 177 |
| 23 | Arsa mandiri | Sawunggaling dalam 23 A lingkungan rt 01/rw 04 gedongan | 78 | Kawi sejahtra | Jl. Kawi Gg 10 perum wates |
| 24 | Flamboyan | Lingkungan rw II wates | 79 | Gaposi sejahtra | Gedongan x, rt 03, rw 01 |
| 25 | Gading | Lingkungan rw VII, Gedangan, gunung gedangan | 80 | Princes | Pulorejo |
| 26 | Ertiga | Jl.kawi V perteng wates | 81 | Sejahtra jaya | Rw 02 pekayon kel. Keranggan |
| 27 | Mawar | RW 01 lingkung tringgilis blooto | 82 | Bina manfaat | Rt 31 suromulang barat |
| 28 | Sapu lidi | Wates gang II, wates | 83 | sehati | Rw 02 lingkungan keranggan |
| 29 | Prisma | Jl. Brawijaya 107, mentikan | 84 | Lestari!!! | Rw 03 ling.pekayon |
| 30 | Sahabat lingkungan | Kedungsari rw 01 gunung gedangan | 85 | srikandi | Sinoman gang II RW 01 |
| 31 | Purwo asri | Kelurahan purwo tengah | 86 | Asri | Sinoman III |

| No | Bank Sampah | Alamat | No | Bank Sampah | Alamat |
|----|---------------------|--|-----|---------------------------|------------------------------|
| 32 | Anggrek | Suromulang rt 40/ rw 10 perum cse surodinawan | 87 | Merpati | Sinoman VII |
| 32 | Anggrek | Suromulang rt 40/ rw 10 perum cse surodinawan | 87 | Merpati | Sinoman VII |
| 33 | Rukun mulya | Kemasan rw 01 kel. Blooto | 88 | Mibasa | Miji baru 1 Gg 1 |
| 34 | Koyo kasih | Kedungsari rw 02 Gn. gedangan | 89 | Sodakoh | Miji baru III RW 02 |
| 35 | Mandiri | Surodinawan Gg 5 rt 07/rw 02 sirocinawan | 90 | Lestari II | Miji Gg buntu III |
| 36 | Mekar sari | Mulyosari gang 1 No. 39 kel. Magersari | 91 | Sejahtra | Ngaglik rw 04 |
| 37 | Rapi (ruang merupi) | Jl. Merapi raya RW 03 pertim. Kel. Wates | 92 | Barokah | Penarip II Kel. Keranggan |
| 38 | Mergo asri | Magersari gang 1 No.65 kelurahan magersari | 93 | Pisang | Penarip rw 01 kel.keranggan |
| 39 | Magersari bersatu | Letkol sumarjo 38 kel. Magersari | 94 | Anggur! | Ngaglik rw 04 kel. Keranggan |
| 40 | Magersari sejahtera | Magersari rw 02 kel. Magersari | 95 | Apel | Pekayon II kel.keranggan |
| 41 | Rejo asri | Magersari rw 02, kel magersari | 96 | Cemara indah | Jl cempedek.kel magersari |
| 42 | Artha jaya | Pralon gang III No.33(sabuk) kel. Prajurit kulon | 97 | Nangka tiga | Rw 03 ling.pangerman |
| 43 | 40 cerita | Surodinawan | 98 | Lestari (IV alam lestari) | Penam gatoel jl. Batam |
| 44 | Istiqomah | Rw 01 ling.sidogede kauman | 99 | Apel 2 | Keranggan |
| 45 | Bina putra | Rt 04 rw 04 blooto No.46 | 100 | Rejo mulyo | |
| 46 | Guyup rukun | rt 43 rw 10 residensite | 101 | Armur breen | Murukan rw 05 surocinawan |
| 47 | Kosumo joyo | Jl. Empunala 147 rw 03 sumolepen | 102 | Mojo | Balong cangkring |
| 48 | Sejahtra KW | Kedungwali Gg 03 rw 03 kelurahan miji | 103 | Prima | Lingk. kauman |
| 49 | Tulip | Jagalan gang 02 | 104 | Miji rukun | Link.miji rw 001 kel miji |
| 50 | SMA 2 | Jalan raya ijen | 105 | Makmur | Kedungkrai rw 002 kel miji |
| 51 | Berkah jaya | Kalimati III/10 jagalan | 106 | SMP II permata | II Raya tropodo |

| No | Bank Sampah | Alamat | No | Bank Sampah | Alamat |
|----|---------------------|----------------------------|-----|-----------------|-------------------|
| 52 | Smagrisa55 | Jl. Kaya surodinawan No.55 | 107 | Anggrek mulya 2 | Magersari gang 6 |
| 53 | Magersari sejahtera | Suronatan III Mojokerto | 108 | Sumber rejeki | Tropodo |
| 54 | Mari guyup | RT 01 RW 04 Sumolepen | 109 | Citra asri | Gedongan |
| 55 | SMPN 6 | | 110 | Setia jaya | Balongsari Gg VII |
| | | | 111 | suromurukan | |

Sumber: Dokumen hasil penelitian, 2018 (DLH, 2018)

Keberadaan bank sampah pada tahun 2017 memang memiliki perkembangan yang bagus namun belum merata secara keseluruhan pada saat program sudah berjalan diawal tahun 2017, karena baru ada 31 bank sampah yang sudah siap, dan sampai di akhir ditahun 2017 bank dalam perkembangannya sudah mencapai 111 bank sampah dan hal tersebut sebagai repospon baik dari masyarakat

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam program bayar pajak dengan sampah keberadaan bank sampah memiliki posisi yang penting sebagai pendukung dari pelaksanaan program bayar pajak pakai sampah, karena kelompok bank sampah memiliki sebagai penghubung dalam pembayaran pajak PBB dari masyarakat, dimana beradaanya membuat tempat pembayaran pajak semakin dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat secara umum.

3. Harga Sampah Lebih Mahal

Pembayaran pajak dalam program bayar pajak dengan sampah adalah dengan cara mengumpulkan sampah terlebih dahulu, setelah itu menyeter ke bank sampah terdekat untuk dinominalkan, yang lebih menarik bank sampah menghargai sampah dari masyarakat lebih apabila dibandingkan dengan harga jual di tukang rombeng keliing atau lapak pinggir jalan. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Edi selaku staff bidang pemantauan dan pengaduan pada bidang penataan dan pentaatan Dinas Lingkungan Hidup yang menungkapkan bahwa:

“Iya betul, bahwa harga jual sampah yang dijual dibank sampah memiliki nilai jual yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan dengan yang ada di tukang rombeng atau lapak pinggir jalan, karena kita sudah bekerja sama dengan pengepul besar, mangkanya masyarakat berbondong bondong menjual sampahnya ke bank sampah, kalau biasanya itu bisa selisih lumayan, karena sampah yang dijual di bank sampah oleh masyarakat itu dipilah terlebih dahulu, kalau dulu katakalah kalau dijual di pelapak sampah borongan itu 50 ribu kalau dipilah dikita bisa ketemu sampai 100 ribu lebih”(Tanggal 7 Februari 2018. Di kantor DLH)

Pendapat dari pak Edi staf bidang staff bidang pemantauan dan pengaduan pada bidang penataan dan penataan dinas lingkungan hidup, diperkuat dengan keterangan dari Pak Yahya selaku kabid pendaaan BPPKA, bahwa:

“ya memang karena bank sampah induk menjual sampahnya itu ke pabrik, jadi secara otomatis harganya memang lebih tinggi daripada ditempat lain, seperti lapak yang dipingir jalan. Karena biasanya juga pedagang keliing itu kan dijual lagi, sehingga kalau memberi harga sedikit lebih murah lagi (Tanggal 28 Februari 2018, Kantor BPPKA)

Keterangan tersebut diperkuat dengan keterangan dari masyarakat yang mengikuti program bayar pajak dengan sampah menurut bu Nurul mengungkapkan bahwa:

“Iya mas harga sampahnya lebih mahal, saya pernah bandingkan dengan pembeli barang bekas yang biasanya keliling itu.”(Tanggal 1 februari 2018, di rumah bu Nurul suromulang gang 3)

Pendapat tersebut juga diperkuat dengan Ibu Isma selaku masyarakat yang mengikuti program bayar pajak dengan sampah, mengatakan bahwa:

“Ya mahal di bank sampah mas, kadang di tukang rombeng keliling itu sampahnya banyak kadang 1 karung dihargai murah.”(Tanggal 1 Februari 2018, di rumah ibu isma, kedungkwali gang 3)

Keterangan senada juga diungkapkan oleh Ibu Suryani yang mengikuti program bayar pajak dengan sampah, yang mengungkapkan bahwa:

“sepengetahuan saya ya mas, harga sampah yang dijual di bank sampah itu dihargai sedikit lebih mahal apabila dibandingkan dengan harga dari pembeli sampah yang biasanya keliling itu mas, saya pernah dulu jual itu buku banyak sekitar 2 kiloan dihargai murah.”(Tanggal 18 Februari 2018, di jalan kawi raya Kota Mojokerto)

Harga sampah yang di setor ke bank sampah induk memiliki harga yang yang tidak menentu dan setiap saat mengikuti pergerakan harga sampah, Adapun daftar harga sampah yang dijual atau di setor ke bank sampah dari bank sampah cabang sebagai berikut:

| BANK SAMPAH INDUK "KOTA MOJOKERTO" | | |
|--|-----------|---------|
| Sekretariat : Jl. TPA Randegan, Kedundung, Kota Mojokerto. Telp 081330325911 | | |
| DAFTAR HARGA DAN JENIS SAMPAH Bulan : Februari 2018 | | |
| I JENIS KERTAS | | |
| 1 Kertas Putih | Rp. 2200 | Kg - |
| 2 Kertas Duplex | Rp. 1000 | Kg - |
| 3 Kertas Kardus | Rp. 2000 | Kg 1000 |
| 4 Kertas Koran | Rp. 2000 | Kg |
| 5 Kertas LKS/Buram | Rp. 1500 | Kg |
| 6 Kertas Semen | Rp. 2200 | Kg |
| 7 Kertas Campur / Buku Putih | Rp. 1200 | Kg |
| II JENIS PLASTIK | | |
| 1 Bak Warna | Rp. 3000 | Kg - |
| 2 Bak Hitam | Rp. 2000 | Kg |
| 3 Kerasan | Rp. 300 | Kg |
| 4 Pet Putih | Rp. 3900 | Kg - |
| 5 Pet Semu | Rp. 3000 | Kg |
| 6 Pet Warna | Rp. 2200 | Kg |
| 7 Tutup Botol / HDA | Rp. 3500 | Kg - |
| 8 Aqua Gelas Bersih | Rp. 8000 | Kg - |
| 9 Aqua Gelas Kotor | Rp. 3500 | Kg |
| 10 Plastik Putih / PE | Rp. 1500 | Kg |
| 11 LD Galon | Rp. 5000 | Kg |
| 12 Blowing Warna | Rp. 3700 | Kg - |
| 13 Mony | Rp. 3000 | Kg - |
| 14 PS Kaca | Rp. 4500 | Kg |
| 15 Blowing Putih | Rp. 4500 | Kg |
| 16 Jerigen | Rp. 3500 | Kg |
| 17 Glangsing | Rp. 800 | Kg |
| 18 Gelangan Aqua Gelas | Rp. 2500 | Kg - |
| 19 Kaset VCD | Rp. 2500 | Kg |
| 20 Kresek | Rp. 400 | Kg |
| 21 Kemasan Sachet | Rp. 500 | Kg |
| 22 Sepedah | Rp. 1500 | Kg |
| 23 Sedotan aqua | Rp. 4000 | Kg - |
| 24 Paralon | Rp. 1000 | Kg |
| 25 Kabel | Rp. 1200 | Kg |
| III JENIS LOGAM | | |
| 1 Besi | Rp. 3000 | Kg - |
| 2 Kaleng / Kompor / Gavalum | Rp. 1800 | Kg - |
| 3 Almini Rencek | Rp. 10000 | Kg |
| 4 Almunium | Rp. 11000 | Kg |
| 5 Tembaga | Rp. 50000 | Kg - |
| 6 Kuningan | Rp. 30000 | Kg |
| 7 Talang | Rp. 800 | Kg |
| 8 Paku | Rp. 1300 | Kg |
| 9 Aki Basah/Kering | Rp. 8000 | Kg |
| 10 Giral | Rp. 11000 | Kg |
| IV JENIS BOTOL | | |
| 1 Botol Bir Bintang | Rp. 1000 | Biji |
| 2 Botol Kecap Besar | Rp. 500 | Biji |
| 3 Botol Kecap Kecil | Rp. 150 | Biji |
| 4 Botol Tebs,Teh Botol | Rp. 50 | Biji - |
| 5 Botol Marjan,Indofood | Rp. 100 | Biji |
| 6 Botol Orson,ABC | Rp. 50 | Biji |
| 7 Botol DDI/Kratingdaing | Rp. 15 | Biji |
| 8 Botol Sauce | Rp. 20 | Biji |
| 9 Botol Fanta,Sprite,Coca-Cola | Rp. 300 | Biji |
| 10 Botol Drum (Madu) | Rp. 150 | Biji |
| 11 Botol Topi Miring | Rp. 650 | Biji |
| 12 Botol Miras,Vodka,Bir hitam(Guiness) | Rp. 250 | Biji |
| 13 Botol AB/Kecil | Rp. 10 | Biji |
| 14 Botol Bensin | Rp. 1300 | Biji |
| 15 Botol Kucing Besar/Kecil | Rp. 300 | Biji |
| 16 Galon | Rp. 2500 | Biji |
| 17 Botol Kemiri | Rp. 500 | Biji |
| 18 Botol Minyak Tawon | Rp. 250 | Biji |
| V LAIN-LAIN | | |
| 1 Sampah Campur | Rp. 1000 | Kg |
| 2 Pet Campur | Rp. 1500 | Kg |
| 3 Jelantah | Rp. 3000 | Kg |

Note :
setoran sampah sudah dalam keadaan terpilah dan bersih, bila setoran tidak terpilah dan kotor akan dihitung / dibeli dengan harga campur.

Gambar 14. Daftar Harga Jual Sampah

Sumber: Dokumen hasil penelitian 2018, (BSI Kota Mojokerto, 2018)

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa harga sampah yang dijual dibank sampah memiliki harga yang lebih mahal apabila dibandingkan dijual di lapak pingir jalan atau para tukang loak yang keliling yang biasanya membeli barang bekas. Hal tersebut disebabkan bank sampah sudah bekerjasama dengan para pengepul besar atau pabrik, sehingga secara otomatis sampah memiliki harga jual lebih tinggi daripada dijual ditempat lain.

4. Hadiah Umroh/Wisata Religi Gratis

Hadiah umroh gratis dalam program bayar pajak dengan sampah merupakan hadiah yang diberikan oleh pemerinah kota dalam hal tersebut dilakukan oleh BPPKA, menurut bu Nur selaku kasubdib pendataan dan penetapan BPPKA, mengungkapkan bahwa:

“Jadi begini mas, program pemerintah kota mojokerto itu didukung dengan hadiah umroh gratis gratis bagi pembayaran pajak khususnya dari bank sampah itu yang membayar diawal tahun, itu pada ulang tahun pemkot pada tanggal 19 juni, jadi yang membayar pajak dibawah 19 juni itu diikutkan undian umroh gratis, jadi ada 1 dari bank sampah yang dapat undian umroh, jadi hal-hal semacam itu yang memberikan mereka rangsangan untuk membayar pajak diawal tahun, jadi mereka tidak menunda nunda membayar pajaknya.”(Tanggal 28 Februari 2018,di kantor BPPKA)

Keterangan dari Bu Nur kasubbid pendataan dan penetapan diperkuat keterangan dari Pak Yahya selaku kapid pendataan BPPKA, mengungkapkan bahwa:

“untuk percepatan realisasi pajak, juga didukung dengan pemberian insentif berupa hadiah umroh gratis, khusus untuk pembayaran pajak dengan sampah itu diberikan satu, hadiah umroh gratis juga diberikan kepada 3 wajib pajak dari masing masing masing kecamatan, dan akan di undi pada saat ulang tahun kota. Sehingga sebelum dibulan juni itu akan cepat dilunai PBB nya” (Tanggal 17 November 2017, di kantor BPPKA)

Keterangan tersebut di perkuat dengan keterangan dari bapak Radi selaku masyarakat sekaligus keder lingkungan bank sampah yang mendapatkan hadiah umroh gratis pada tahun 2017 dari pembayran pajak dengan sampah mengungkapkan bahwa:

“ya betul, alhamdulillah saya perwakilan dari bank sampah yang memperoleh undian hadiah umroh gratis dari bank sampah, yang kemarin saya baru saja pulang umroh, karena saya membayar pajak pakai sampah sebelum tanggal 19 Juni sebelum hari jadi Kota Mojokerto.”(Tanggal 18 November, di Kantor BSI)



Gambar 15. Penerima Hadiah Umroh Gratis Dari Pembayaran Pajak Dengan Sampah Tahun 2017

Sumber: Dokumen hasil penelitian, 2018
(Instagram BPPKA@bppka_mojokertokota 2017)

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemberian hadiah umroh gratis bagi masyarakat yang membayar pajak dengan sampah akan memacu masyarakat untuk agar segera melunasi pajak PBBnya sebelum hari jadi Kota Mojokerto pada tanggal 19 Juni. Karena bagi masyarakat yang mengikuti program bayar pajak dengan sampah akan diberikan 1 hadiah umroh, hal tersebut dapat membaut masyarakat lebih giat dan semangat dalam membayar pajak, sehingga membayar pajaknya disegerakan

5. Peningkatan PBB Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah sumber pajak penting bagi pemasukan sebuah daerah sehingga keberadaannya perlu dimaksimalkan untuk membiayai berbagai aktifitas didalam daerah seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, pemungutan pajak di kota Mojokerto resmi diserahkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah Kota Mojokerto atas dasar Perda Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, sehingga Kota Mojokerto bisa dengan leluasa memaksimalkan PBB mulai dari pencatatan, menetapkan dan uaha usaha lainnya yang dapat meningkatkan keberadaan PBB, karena pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu pajak penting dari pajak daerah dan juga salah satu sumber pemasukan bagi PAD, pelaksanaan pemungutan pajak di kota mojokerto mulai dari tahun 2013, maka dari itu perlu digali potensi Inovasi bayar pajak dengan sampah yang terdapat di Kota Mojokerto merupakan salah satu langkah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto untuk meningkatkan salah satu sumber penerimaan dari daerah yaitu pajak bumi dan bangunan perkotaan, yaitu dengan dikeluarkanya program bayar pajak dengan sampah, dalam penyelenggaraannya program tersebut diselenggarakan oleh BPPKA dan dinas lingkungan hidup kemudian dibantu oleh bank sampah induk Kota Mojokerto. Manfaat dari inovasi bayar pajak dengan sampah tidak hanya untuk mempermudah akses pembayaran pajak bagi masyarakat sehingga berujung pada meningkatnya sektor PBB perkotaan, namun inovasi bayar pajak

dengan sampah juga berdampak pada lingkungan, sehingga lingkungan menjadi lebih bersih dan masyarakat juga akan sadar dengan kebersihan lingkungan sekitar.

Inovasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Mojokerto merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan perkotaan di wilayah Kota Mojokerto dan hal tersebut tercermin dari misi dalam Rentra BPPKA tahun 2014-2019 yaitu Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan dengan sasaran dengan meningkatkan pengelolaan pendapatan asli daerah, data yang diperoleh peneliti dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset menggambarkan jumlah penerimaa pajak PBB secara berurutan mulai dari tahun 2014-2017, sebagai berikut:

Tabel 5. Target dan realisasi penerimaan PBB Kota Mojokerto tahun 2014-2017

| Tahun | Target Pokok Penerimaan Pbb | Realisasi Pokok Pbb | Porsentase % |
|--------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 2014 | 5.100.000.000,00 | 5.838.447.077,00 | 144,48 |
| 2015 | 6.500.000.000,00 | 8.248.547.605,00 | 144,14 |
| 2016 | 8.250.000.000,00 | 8.713.056.045,00 | 105,61 |
| 2017 | 9.000.000.000,00 | 8.970.893.550,00 | 99,68 |

Sumber: Dokumen hasil penelitian tahun 2018 (BPPKA 2018)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2014-2017 penerimaan realisasi pokok PBB terhadap target pokok penerimaan mengalami peningkatan sertiap tahunnya, namun dari porsentasenya justru mengalami penurunan sertiap tahunnya, dan apabila dilihat dari target dan realisasinya

mengalami penurunan apabila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mulai dari tahun 2015-2017.

Penerimaan PBB beberapa tahun terakhir tidak terlepas dari strategi BPPKA untuk meningkatkan PBB perkotaan di Kota Mojokerto, banyak strategi yang telah dilakukan oleh BPPKA seperti pelayanan pembayaran pajak keliling, pembayaran pajak melalui bank Jatim, dan yang terbaru adalah dengan dimunculkannya program bayar pajak dengan sampah. Yang terbaru adalah munculnya program bayar pajak pakai sampah juga memiliki kontribusi pada peningkatan PBB Kota Mojokerto pada tahun 2017, berikut ini adalah data penerimaan pajak PBB dari masing masing bank sampah, sebagai berikut :

Tabel: 6 Rekapitulasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Bank Sampah Tahun 2017

| No | Bank Sampah | Kelurahan | Pokok Nominal | Pembayaran | % |
|----|----------------------|-----------------|---------------|------------|------|
| 1 | B-Tri | Wates | 15.042.342 | 9.329.092 | 62% |
| 2 | Permata | Meri | 5.927.669 | 4.551.794 | 77% |
| 3 | Tiga Puluh | Surodinawan | 5.278.021 | 4.364.859 | 83% |
| 4 | Setunggal | Balongsari | 4.482.005 | 4.110.362 | 92% |
| 5 | Guyub Rukun | Surodinawan | 4.001.246 | 3.806.222 | 95% |
| 6 | Sejahtera | Gunung gedangan | 4.632.868 | 3.652.231 | 79% |
| 7 | Istiqomah | Kauman | 3.948.362 | 3.139.304 | 79% |
| 8 | Bunga | Wates | 4.065.619 | 2.858.884 | 70% |
| 9 | 40 Ceria | Surodinawan | 3.081.562 | 2.702.356 | 88% |
| 10 | Jalah Arta | Surodinawan | 2.321.279 | 2.321.279 | 100% |
| 11 | Merbabu alam semesta | Kedundung | 2.274.384 | 2.165.918 | 95% |
| 12 | Rukun mulyo | Blooto | 2.376.781 | 2.135.076 | 90% |
| 13 | Fitrah | Kauman | 2.576.607 | 2.044.479 | 79% |
| 14 | Makmur sejahterah | Prajurit kulon | 2.263.622 | 1.913.206 | 85% |

| No | Bank Sampah | Kelurahan | Pokok Nominal | Pembayaran | % |
|---------------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------|
| 15 | Gading | Gunung gedangan | 3.103.401 | 1.911.536 | 62% |
| 16 | Cempaka | sentanan | 1.910.501 | 1.910.501 | 100% |
| 17 | Koyo kasih | Gunung gedangan | 2.014.395 | 1.763.665 | 88% |
| 18 | Resik sejati | Balongsari | 1.843.632 | 1.632.988 | 89% |
| 19 | Ertiga | Wates | 1.885.297 | 1.486.958 | 80% |
| 20 | Sumber arta | Kedundung | 1.681.958 | 1.371.763 | 82% |
| 21 | Anggrek | surodinawan | 1.730.589 | 1.276.816 | 74% |
| 22 | Mekarari | Magersari | 1.242.760 | 1.242.760 | 100% |
| 23 | Putri atu | kedundung | 1.479.303 | 1.187.521 | 80% |
| 24 | Arsa mandiri | gedongan | 1.053.977 | 1.053.977 | 100% |
| 25 | Merpati | miji | 907.894 | 877.429 | 97% |
| 26 | Sapulidi | Wates | 1.290.451 | 839.818 | 65% |
| 27 | Mandiri | Sirodinawan | 1.536.703 | 830.255 | 54% |
| 28 | Mawar | Blooto | 1.355.230 | 581.011 | 43% |
| 29 | Sejahtra KW | Miji | 548.058 | 381.372 | 70% |
| 30 | Arlang | Surodinawan | 377.505 | 377.505 | 100% |
| 31 | Artomoro | Pulorejo | 155.105 | 155.505 | 100% |
| Jumlah keseluruhan | | | 71.317.786 | 58.645.697 | 82% |
| Jumlah nasabah | | | 1221 | 585 | 48% |

Sumber: Dokumen hasil penelitian Tahun 2018, (BPPKA, 2017)

Tabel 5 diatas menunjukkan penerimaan pajak yang didapat dari masyarakat yang mengikuti program bayar pajak dengan sampah tahun 2017, dimana total ada 1221 orang yang telah menjadi anggota bank sampah, dengan potensi pajak yang dihitung sebesar 71.317.786 juta, dan realisasi masyarakat yang membayar pajak pakai sampah sebesar 58.645.697 juta dari 585 yang membayar lunas PBB pakai sampah melalui bank sampah, apabila dikalkulasikan pembayaran pajak sebesar 82 persen, dan realisasi masyarakat yang membayar pajak dalam program bayar pajak pakai sampah tahun 2017 sebesar 48%. Hasil pembayaran pajak dari

masyarakat yang mengikuti program bayar pajak dengan sampah tersebut memiliki kontribusi sebesar 58.645.697 juta apabila dilihat dari realisasi penerimaan pajak PBB Kota Mojokerto ditahun 2017 yang sebesar 8.970.893.550,00 Milyar dari target sebesar 9.000.000.000 Milyar.

Berdasarkan data diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa, peningkatan pajak PBB terkait dengan adanya program bayar pajak dengan sampah ada peningkatan, meskipun kontribusi terhadap pajak PBB tahun 2017 masih relatif kecil yaitu 58 juta, justru dengan adanya program bayar pajak pakai sampah, justru dari target pajak pada tahun 2017 tidak dapat tercapai, dan persentase dari target dan realisasi pajak sebesar 99.68, porsentase tersebut terendah dari tahun 2015-2016.

b. Faktor Penghambat

1. Kurangnya Respon Masyarakat

Program bayar pajak dengan sampah merupakan program yang dibuat oleh pemerintah Kota Mojokerto, tidak lain adalah untuk memberikan kemudahan dan memberikan keringanan dalam membayar pajak, serta memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih, serta bisa sebagai ajang edukasi masyarakat tentang sampah yang memiliki nilai ekonomis apabila dikelola dengan baik, bagi masyarakat mengikuti program bayar pajak dengan sampah adalah dengan memilah terlebih dahulu antara sampah kering dan basah. Dari manfaat yang cukup

bagus belum tentu didalam sebuah inovasi belum tentu dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Menurut keterangan dari Pak Yahya selaku kabit pendataan BPPKA, mengungkapkan bahwa:

“kembali ke masyarakat, terutama kesadaran masyarakat, jadi memang ada beberapa itu memang ogah ogahan atau males dan sebagainya, tidak konsisten. Mereka maunya sendiri, intinya Mojokero harus bersih, tapi ternyata mereka juga membuat sampah sembarangan, kan kembali kepada kesadaran masyarakat. Terutama untuk pembayaran pajak itu kadang karena namanya pajak itu tidak ada yang dikembalikan langsung kepada masyarakat, secara tidak langsung juga kembalinya kepada masyarakat dalam bentuk lain, kalau retribusi kan bisa langsung dinikmati secara langsung oleh masyarakat.”(Tanggal 28 Februari 2018, di kantor BPPKA)

Keterangan dari pak Yahya, diperkuat keterangan dari Ibu Nur selaku kasubbid pendataan dan penetapan di BPPKA, mengungkapkan bahwa :

“kesadaran masyarakat yang kurang, memang mereka tidak seluruhnya itu mendukung program kita, ada beberapa orang yang kurang mengenali dan kurang paham pentingnya bank sampah, bayar pajak pakai sampah dan kebersihan lingkungan.”(Tanggal 17 November 2017, di kantor BPPKA)

Pernyataan tersebut selaras dengan data yang diperoleh peneliti, ada sebanyak 31 bank sampah yang sudah berdiri ditahun 2017 yang sudah melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan, 31 bank sampah tersebut diantaranya:

Tabel 7. Rekapitulasi jumlah masyarakat dalam pembayaran pajak dengan sampah

| No | Bank Sampah | Kelurahan | Anggota terdaftar | Nasabah lunas PB | % |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------|
| 1 | Jalah Arta | Surodinawan | 29 | 29 | 100% |
| 2 | Anggrek | Surodinawan | 23 | 12 | 52% |
| 3 | Tiga Puluh | Surodinawan | 56 | 36 | 64% |
| 4 | Arlang | Surodinawan | 9 | 9 | 100% |
| 5 | 40 ceria | Surodinawan | 37 | 8 | 22% |
| 6 | Guyup rukun | Surodinawan | 59 | 13 | 22% |
| 7 | Mandiri | Surodinawan | 18 | 8 | 44% |
| 8 | Makmur sejahtera | Prajurit kulon | 31 | 13 | 42% |
| 9 | Mawar | Bloto | 26 | 9 | 35% |
| 10 | Rukun mulyo | Bloto | 52 | 36 | 69% |
| 11 | Istikomah | Kauman | 41 | 36 | 88% |
| 12 | Fitrah | Kauman | 48 | 40 | 83% |
| 13 | Arto moro | Pulorejo | 3 | 1 | 83% |
| 14 | Permata | Meri | 61 | 25 | 41% |
| 15 | Sejahtera kw | Miji | 11 | 9 | 82% |
| 16 | Merpati | Miji | 11 | 11 | 100% |
| 17 | Cempaka | Sentanan | 37 | 14 | 38% |
| 18 | Sejahtera | Gunung gedangan | 57 | 27 | 47% |
| 19 | Koyo kasih | Gunung gedangan | 22 | 16 | 73% |
| 20 | Gading | Gunung gedangan | 50 | 21 | 42% |
| 21 | Merbabu alam sejahtera | Kedundung | 26 | 23 | 88% |
| 22 | Sumber arta | kedundung | 35 | 19 | 54% |
| 23 | Putri ayu | kedundung | 25 | 12 | 48% |
| 24 | setunggal | balongsari | 70 | 33 | 47% |
| 25 | Resik sejati | Balong sari | 38 | 10 | 26% |
| 26 | Arsa mandiri | gedongan | 28 | 20 | 71% |
| 27 | mekasari | Magarsari | 11 | 9 | 82% |
| 28 | sapulidi | Wates | 20 | 4 | 20% |
| 29 | Ertiga | Wates | 35 | 17 | 49% |
| 30 | Bunga | Wates | 52 | 17 | 33% |
| 31 | B-tri | Wates | 103 | 48 | 47% |
| Jumlah keseluruhan | | | 1221 | 585 | 48% |

Sumber: Dokumen hasil penelitian, 2017 (BPPKA 2017)

Tahun 2017 bank sampah yang sudah berdiri sebanyak 31 bank sampah yang sudah melakukan aktifitas dan melakukan penyetoran pembayaran PBB dari nasabah bank sampah, data diatas ada sebanyak 1221 masyarakat yang menjadi nasabah bank sampah, namun dari nasabah tersebut hanya 585 nasabah yang membayar pajaknya dengan sampah, sehingga kalau dihitung dari 33 bank sampah tersebut persentase keikutsertaan masyarakat secara keseluruhan sebesar 48%. Hal tersebut juga menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat masih rendah dalam program bayar pajak dengan sampah.

2. Masih Banyak Bank Sampah Yang Baru Berdiri

Keberadaan bank sampah cabang dalam program bayar pajak memiliki posisi penting, karena bank sampah sebagai tempat dimana masyarakat mengumpulkan sampah dan bisa melakukan pembayaran pajaknya, Pada saat *launching* program bayar pajak pakai sampah, banyak yang masih baru, seperti keterangan dari Ibu Nur selaku kasubid pendataan dan penetapan BPPKA, bahwa:

“Yang kita inginkan belum maksimal, artinya kita pinginya itu 1 kota ada bank sampahnya, tapi kan ada kendala kendalanya seperti ada yang sudah jalan, ada yang baru jalan, ada yang sudah jalan namun berhenti dijalan, nah itu seharusnya dari bank sampah kita berikan motivasi.”(Tanggal 17 November 2017, di kantor BPPKA)

Keterangan tersebut diatas diperkuat dengan keterangan dari pak Yahya selaku kapid pendataan BPPKA, bahwa:

“ karena ini kan masih baru, sehingga kan katakanlah dalam satu bulan, mengumpulkan sampahnya mereka kan belum cukup, katakanlah mengumpulkan sampah menjadi 10 ribu, itu kan cukup banyak sampah, kalau sampah dirumah tangga kan tidak terlalu banyak, katakanlah dalam 1 minggu hanya menghasilkan uang 5 ribu, itu kan membutuhkan beberapa bulan untuk bisa membayar pajaknya, bukan berarti kelompoknya banyak kemudian tidak ada partisipasi, tidak karena dikelompok ini masih baru, untuk mengumpulkan modal itu belum cukup, mungkin dibutuhkan juga antusiasme dari kelompok itu sendiri, kalau gencar sosialisasinya mungkin bisa lebih bagus, diharapkan ditahun 2018 ini akan meningkat tidak hanya 31 bank sampah saja yang aktif, tapi yang lain juga bisa berperan aktif. Bisa dibilang 31 bank sampah itu sudah siap dan memang sudah lama, kalau dulu belum terkait dengan pajak, mereka itu sudah membentuk kelompok kelompok bank sampah ini.”(Tanggal 28 Februari 2018, di kantor BPPKA)

Awal tahun 2017 pada saat program bayar pajak muncul, apabila dihitung jumlahnya masih ada beberapa bank sampah yang sudah melakukan aktifitas pembayaran PBB, data bank sampah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 8: 31 Bank Sampah Aktif Tahun 2017

| No | Bank Sampah | Kelurahan |
|----|------------------|----------------|
| 1 | Jalah Arta | Surodinawan |
| 2 | Anggrek | Surodinawan |
| 3 | Tiga Puluh | Surodinawan |
| 4 | Arlang | Surodinawan |
| 5 | 40 ceria | Surodinawan |
| 6 | Guyup rukun | Surodinawan |
| 7 | Mandiri | Surodinawan |
| 8 | Makmur sejahtera | Prajurit kulon |
| 9 | Mawar | Bloto |
| 10 | Rukun mulyo | Bloto |
| 11 | Istikomah | Kauman |
| 12 | Fitrah | Kauman |
| 13 | Arto moro | Pulorejo |
| 14 | Permata | Meri |
| 15 | Sejahtera kw | Miji |
| 16 | Merpati | Miji |
| 17 | Cempaka | Sentanan |

| No | Bank Sampah | kelurahan |
|----|-----------------------|-----------------|
| 18 | Sejahtra | Gunung gedangan |
| 19 | Koyo kasih | Gunung gedangan |
| 20 | Gading | Gunung gedangan |
| 21 | Merbabu alam sejahtra | Kedundung |
| 22 | Sumber arta | kedundung |
| 23 | Putri ayu | kedundung |
| 24 | Setunggal | balongsari |
| 25 | Resik sejati | Balongsari |
| 26 | Arsa mandiri | Gedongan |
| 27 | Mekasari | Magersari |
| 28 | Sapulidi | Wates |
| 29 | Ertiga | Wates |
| 30 | Bunga | Wates |
| 31 | B-tri | Wates |

Sumber: Dokumen hasil penelitian, 2017 BPPKA 2017

Data diatas adalah 31 bank sampah yang sudah ada di Kota Mojokerto, 31 bank bank sampah diatas sudah terbentuk sebelum *launchig* program bayar pajak dengan sampah, sehingga siap melakukan aktifitas menampung sampah dari masyarakat yang mengikuti program bayar pajak dengan sampah pada awal tahun 2017, sehingga bank sampah tersebut dapat melakukan pembayaran PBB ditahun 2017.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa keberadaan bank sampah masih banyak yang masih baru, karena baru ada 31 bank sampah dari 111 bank sampah yang melakukan pembayaran PBB di tahun 2017, artinya masih ada 80 bank sampah yang yang belum siap melakukan pembayaran PBB pada tahun 2017.

C. Pembahasan

1. Inovasi bayar pajak pakai sampah sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan perkotaan di Kota Mojokerto

a. *Relative advantage* atau keuntungan relative

Kemunculan sebuah inovasi diharuskan mempunyai sebuah ciri keuntungan relatif dimana keuntungan ditujukan kepada si penerima layanan yaitu masyarakat, karena penciptaan sebuah inovasi sejatinya ditujukan untuk mempermudah masyarakat dan menambah nilai tambah dari sistem dan mekanisme yang sebelumnya sudah ada dan sudah terlaksana, artinya inovasi yang muncul tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah ada sebelumnya, hanya diperbarui baik itu mengenai dampak dan keefektifan yang ditimbulkan dalam inovasi yang baru, terutama keuntungan yang terdapat dalam inovasi. Inovasi juga sebuah cara untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Suwarno (2008:10) ditinjau secara lebih khusus, pengertian dari inovasi pelayanan publik bisa diartikan sebagai “prestasi dalam meraih, meningkatkan dan memperbaiki efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik yang dihasilkan oleh inisiatif pendekatan, metodologi dan atau alat baru dalam pelayanan kepada masyarakat”. Berbagai keuntungan yang terselip dalam inovasi akan dapat menarik minat masyarakat untuk mengikuti program bayar pajak pakai sampah, semakin menonjol inovasi dari sisi keuntungan maka masyarakat akan semakin antusias untuk

mengikutinya, karena kemudahan juga terlihat ketika masyarakat mengikuti program bayar pajak dengan sampah.

Inovasi dimunculkan tidak lain adalah untuk membentuk dan menciptakan sebuah pelayanan prima kepada masyarakat, di Kota Mojokerto inovasi bayar pajak dengan sampah merupakan sebuah terobosan baru yang dikeluarkan untuk memperluas akses pembayaran pajak yang saat ini bisa dilakukan oleh masyarakat melalui kelurahan, RT/RW, bank Jatim.

Program bayar pajak pakai sampah berdasarkan data lapangan menurut Ibu Nur kasubbid pendataan dan penetapan bahwa program bayar pajak dengan sampah mempunyai beberapa keuntungan relatif, baik itu dari sisi lingkungan maupun bagi masyarakat secara pribadi yang mengikuti program bayar pajak dengan sampah, pelaksanaan program bayar pajak pakai sampah dari sisi lingkungan memiliki keuntungan relatif dari sisi lingkungan seperti lingkungan menjadi bersih, sedangkan dari sisi masyarakat, program bayar pajak dengan sampah dapat meringankan beban pembayaran pajak, karena pembayaran pajak yang biasanya dilakukan dengan membayar uang secara *cash*, lain halnya dengan adanya program bayar pajak dengan sampah, dengan hanya mengumpulkan sampah secara berkala sampai hari pembayaran pajak, artinya masyarakat dapat mengangsur pajaknya sedikit demi sedikit sehingga masyarakat merasa ringan dan mudah dalam membayar pajaknya.

Masyarakat sebagai sasaran adanya inovasi juga merasakan dampak yang ditimbulkan dengan adanya program bayar pajak dengan sampah, masyarakat

yang mengikuti program bayar pajak dengan sampah merasa lebih ringan dalam membayar pajaknya. keuntungan-keuntungan yang terdapat dari munculnya program bayar pajak dengan sampah itu sejalan dengan apa yang telah diungkapkan oleh Roger yang dikutip oleh Suwarno (2008:17) mengartikan atribut *relative advance* adalah bahwa ciri sebuah inovasi harus mempunyai keuntungan apabila dibandingkan dengan inovasi yang telah ada sebelumnya, selalu ada nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakan dengan yang lain.

Munculnya program bayar pajak dengan sampah sendiri justru memiliki perbedaan dengan apa yang sudah ada sebelumnya, pembayaran pajak dalam program bayar pajak dengan sampah diintegrasikan dengan bagaimana mengelola sampah agar memiliki nilai ekonomis apabila masyarakat mampu mengelola dengan baik dengan cara memilah sampah yang memiliki nilai jual dan tidak memiliki nilai jual, dari sampah organik dan sampah anorganik yang telah diproduksi dalam skala rumah tangga atau yang terdapat di lingkungan sekitar. Sehingga pembayaran pajak dari sampah kemudian sampah tersebut ditabung secara berkala, hingga waktu pembayar pajak ditentukan oleh masyarakat atau pengurus bank sampah setempat.

Berdasarkan paparan teori dan kesimpulan dari narasumber kedua hal tersebut memiliki korelasi dimana dalam program bayar pajak dengan sampah terselip keuntungan relatif diantaranya masyarakat dapat semakin mudah dalam membayar pajaknya karena pembayaran pajak hanya dengan mengumpulkan

sampah, pembayaran pajak juga menjadi semakin terjangkau karena pembayaran pajak dapat dilakukan di RT/RW setempat dimana bank sampah tersebut berada, kemudian secara otomatis dengan adanya program bayar pajak pakai sampah juga membuat lingkungan masyarakat sekitar menjadi lebih bersih.

b. Kesesuaian atau *Compatibility*

Inovasi merupakan cara untuk merubah atau memperbarui beberapa hal yang dianggap masih kurang dalam pelaksanaan sebuah pelayanan, dan inovasi juga sebagai cara agar sebuah metode atau cara yang sebelumnya ada dapat memiliki kemanfaatan yang lebih apabila dibandingkan dengan metode atau cara yang sudah ada sebelumnya, kesesuaian berarti masih dalam koridor atau tatacara yang masih digunakan sebelumnya. Sebelum adanya program bayar pajak dengan sampah pembayaran pajak juga bisa dilakukan kelurahan, kantor BPPKA, bank jatim dengan cara menunjukkan sppt, kemudian setelah membayar wajib pajak tersebut diberi bukti pembayaran pajak yang sah, hanya saja setelah ada program bayar pajak pakai sampah alternatif pembayaran PBB bertambah yakni melalui pengurus bank sampah di RT/RW setempat atau petugas mendatangi bank sampah yang ingin membayar pajak bagi anggotanya. Perubahan pembayaran pajak bagi yang mengikuti program bayar pajak dengan sampah merupakan inovasi mekanisme pelayanan, seperti yang diungkapkan oleh Muluk (2008:44-45) merinci beberapa tipologi inovasi 1. Inovasi produk/layanan, 2. Inovasi proses pelayanan 3. Inovasi metode pelayanan, 4.

inovasi dalam strategi atau kebijakan 4. Inovasi sistem, dimana inovasi metode pelayanan dalam program bayar pajak dengan sampah terletak pada lokasi pembayaran pajak PBB dilakukan di bank sampah di RT/RW setempat atau pengurus bank sampah yang membayarkan ke BPPKA.

Pelaksanaan pembayaran dalam program bayar pajak dengan sampah, tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah ada sebelumnya, hanya merubah sedikit cara pembayaran. Masyarakat yang mengikuti program bayar pajak pakai sampah sebelum dapat membayar pajaknya, masyarakat harus mengumpulkan sampah ke bank terlebih dahulu, kemudian hasil dari pengumpulan sampah tersebut ditabung secara berkala hingga sppt turun dan kesepakatan masyarakat, kemudian masyarakat dapat membayar pajaknya di masing masing RT/RW atau dimana bank sampah itu berada atau pengurus bank sampah tersebut membayarkan langsung ke BPPKA. Karena bank sampah sudah terdapat di RT/RW setempat, dan pada saat pembayaran, petugas dari BPPKA juga bisa mendatangi bank sampah yang sudah siap melakukan pembayaran pajak, masyarakat yang membayar pajak PBBnya hanya menunjukkan SPPT dan buku tabungan sampah.

Kemunculan inovasi tidak berarti merubah keseluruhan sistem, metode, atau cara yang sudah ada, tapi tinggal menyesuaikan saja dengan apa yang sudah ada. Kesesuaian menurut pendapat dari Roger yang dikutip oleh Suworo (2008:17) menjelaskan bahwa Sebuah inovasi mampu mempunyai sifat kesesuaian dengan inovasi yang telah diganti sebelumnya, artinya inovasi yang

baru tidak serta merta mengganti seluruh tatanan inovasi yang lama, justru inovasi yang baru harus menyesuaikan dengan inovasi yang sudah ada sebelumnya. Karena bagaimanapun merubah seluruh tatanan inovasi yang lama selain membutuhkan waktu, juga biaya yang harus dipertimbangkan. Akan lebih baik jika inovasi yang lama mejadi patokan untuk diperbaiki agar inovasi yang baru menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Seperti yang dikatakan oleh O'Sullivan dan Dooley (2009:4) inovasi adalah “proses membuat perubahan terhadap sesuatu yang telah mapan melalui introduksi suatu hal baru yang memberikan nilai tambah bagi konsumen”. Kesesuaian atau *compatibility* dalam program bayar pajak dengan sampah bisa dibilang masih sesuai, inovasi tesebut memerikan alternatif pembayaran pajak yang biasanya dilakukan oleh masyarakat sebelum adanya program bayar pajak dengan sampah. Adapun perbedaan sebelum dan sesudah adanya program bayar pajak dengan sampah:

Tabel 9. Perbandingan sebelum dan sesudah adanya program bayar dengan sampah

| No | Item | Sebelum | Sesudah |
|----|---------------------|---|---|
| 1 | Akses pembayaran | Kelurahan, bank Jatim, mobil keling pajak, ditempat keramaian, dan kantor BPPKA | bank sampah di masing masing RT/RW |
| 2 | Alat pembayar pajak | Uang cash/tunai/langsung | Mengumpulkan sampah terlebih dahulu |
| 3 | Persyaratan | Menyerahkan sppt | Menyerahkan sppt dan tabungan sampah ke pengurus bank sampah yang ada di RT/RW terdekat |

| No | Item | Sebelum | Sesudah |
|----|-------------|-----------|---|
| 4 | kemanfaatan | - | 1. Lingkungan: a. Menjadi bersih dan terjaga b. Masyarakat sadar kebersihan 2. Ekonomi: a. Pembayaran pajak tidak perlu mengeluarkan uang |
| 5 | kemudahan | Tidak ada | Pembayaran pajak Bisa dicicil dengan mengumpulkan sampah seca berkala |

Berdasarkan pemaparan teori dan keterangan dari narasumber bahwa kedua hal tersebut memiliki korelasi dimana dalam pembayaran pajak dalam program bayar pajak dengan sampah tidak berbeda jauh dengan dengan pembayaran pajak sebelum adanya program bayar pajak dengan sampah, dimana sebelum adanya program bayar pajak dengan sampah masyarakat datang ke kelurahan, kantor BPPKA, bank jatim untuk membayar pajaknya dengan membawa SPPT, kemudian setelah membayar masyarakat diberi bukti lunas membayar pajak, sedangkan setelah adanya program bayar pajak dengan sampah masyarakat tinggal datang dimana bank sampah itu berada yang sudah tersebar di RT/RW setempat dengan membawa sppt dan menunjukkan kepada petugas pajak dari BPPKA, setelah menunjukkan masyarakat atau wajib pajak diberi bukti pembayaran pajak yang sah melalui langsung pengurus bank sampah yang ada di RT/RW. Mekanisme pembayaran pajak sebelum dan sesudah adanya program bayar pajak dengan sampah memiliki kesesuaian, yang membedakan hanya tempat pembayaran, dimana tempat pembayaran pajak bisa

dilakukan lebih dekat dan terjangkau, yaitu di bank sampah yang sudah terdapat di RT/RW, sedangkan pembeda yang kedua terletak pada cara membayar pajaknya, yaitu dengan mengumpulkan sampah terlebih dahulu secara bekala hingga waktu yang telah ditentukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak PBB, dan selain itu sesudah adanya program bayar pajak dengan sampah memiliki nilai lebih apabila dibandingkan dengan sebelum adanya program bayar pajak dengan sampah mulai dari akses, kemudahan, kemanfaata.

c. *Complexity* (Kerumitan)

Pada dasarnya, penciptaan sebuah inovasi adalah untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhannya, dan inovasi merupakan sebuah modifikasi pelayanan agar sebuah pelayanan menjadi lebih baik dalam pelaksanaannya, dan inovasi bisa membuat sistem dan mekanisme berubah menjadi lebih baik, inovasi dimunculkan pada dasarnya adalah untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat supaya masyarakat terasa terbantu dan kebutuhannya dapat terpenuhi dengan baik, maka dari itu tentu inovasi tidak diciptakan dengan cara yang rumit dan membingungkan masyarakat, justru mempermudah masyarakat dalam menggunakannya.

Kerumitan sebuah inovasi juga akan mampu memberikan pengaruh terhadap minat dan ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam inovasi, dalam inovasi bayar pajak dengan sampah, masyarakat yang ingin mengikuti dan membayar pajak pakai sampah tidak ada persyaratan khusus, dan yang

menyulitkan bagi masyarakat yang ingin membayar pajaknya dengan sampah, seperti yang dikatakan oleh Ibu Nur selaku kasubid pendataan dan penetapan di BPPKA dan Pak Yahya Kabid pendataan BPPKA serta masyarakat yang mengikuti program bayar pajak pakai sampah mengungkapkan hal yang senada yang pada intinya adalah bahwa program bayar pajak pakai sampah ini tidak rumit, justru mempermudah masyarakat dalam membayar pajaknya, tidak ada persyaratan yang membuat rumit, hanya mendaftarkan diri sebagai anggota bank sampah, setelah itu masyarakat dapat menyetor sampah untuk digunakan membayar pajak, pembayaran pajak bisa melalui bank sampah yang sudah terdapat di RT/RW. Kerumitan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat adalah tidak dibenarkan, namun pemberian pelayanan negara atau pemerintah setidaknya memperhatikan prinsip pelayanan, hal tersebut Menurut Sulistyo dan Budi (2009:39) pelayanan publik yang dilakukan oleh sebuah negara hendaknya berdasarkan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1. Rasional, efektif dan efisien yang dilakukan melalui manajemen terbuka.
2. Ilmiah berdasarkan kajian dan penelitian serta didukung oleh cabang-cabang ilmu pengetahuan lainnya.
3. Inovatif, pembaharuan yang dilakukan terus menerus untuk menghadapi lingkungan yang dinamis, berubah dan berkembang.
4. Produktif, berorientasi kepada hasil kerja yang optimal.

5. Profesionalisme, penggunaan tenaga kerja profesional, terampil dalam istilah *"The Right Man in The Right Place"*.
6. Penggunaan teknologi modern yang tepat guna

Pelayanan yang baik merupakan pelayanan yang memperhatikan prinsip prinsip dasar pelayanan, dalam kaitanya menurut pendapat dari Sulistyono dan budi ini terdapat didalam program bayar pajak dengan sampah, dimana dalam program bayar pajak dengan sampah tersebut terdapat prinsip sebuah pelayanan salah satunya adalah adanya sisi inovatif dalam pelayanan pajak, pembayaran pajak setelah adanya program bayar pajak dengan sampah semakin mudah dan ringan, hal tersebut tentu sebagai langkah untuk menyesuaikan berbagai perkembangan yang ada dimasyarakat, baik dari sisi lingkungan menjadi lebih bersih dan terjaga, kemudian dari sisi ekonomi masyarakat juga tidak terlalu berat dalam membayar pajak dan sekaligus program bayar pajak dengan sampah juga dapat membantu masyarakat yang sering menunggak dan merasa keberatan dalam membayar pajak, karena posisi pajak bagi pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan didalam daerah sangat penting, seperti yang diungkapkan oleh Rahayu dan Suharti (2010:3-4) umumnya dikenal dengan 2 macam fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair*, maksudnya adalah bahwa pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai berbagai aktifitas pemerintahan. Sebagai sumber keuangan pemerintah berusaha untuk memasukkan dana secara optimal ke dalam kas negara, dengan cara memungut pajak kepada masyarakat berdasarkan undang undang yang berlaku. dan fungsi

reulerend , Artinya pajak merupakan alat pengatur pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Disamping memaksukkan uang ke kas negara, pajak dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk mengubah atau mengatur susunan pendapatan kekayaan dalam ranah swasta.

Keberadaan inovasi tidak semua memiliki tingkat kerumitan tinggi, kerumitan tersebut biasanya terletak pada cara atau mekanismenya, dan hal tersebut juga dapat mempengaruhi minat masyarakat dalam mengikutinya, program bayar pajak dengan sampah mengharuskan bagi yang pengikutinya untuk mendaftarkan diri menjadi anggota bank sampah kemudian setelah terdaftar baru bisa mengumpulkan sampah dan hasilnya digunakan untuk membayar pajak yang juga bisa melalui bank sampah, hal tersebut merupakan aturan pelayanan yang berlaku, seperti yang diungkapkan oleh Sinambela (2008:5) pelayanan publik adalah “pemberian pelayanan oleh organisasi kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditentukan, yang berarti dalam pelayanan selalu ada aturan mainnya yang sudah ditentukan seperti halnya dalam program bayar pajak dengan sampah

Berdasarkan keterangan dari narasumber dan pemaparan teori bahwa kedua hal tersebut memiliki korelasi, dalam program bayar pajak dengan sampah tidak ada sisi kerumitan, masyarakat yang ingin membayar pajak dengan sampah hanya tinggal mendaftarkan diri sebagai anggota bank sampah terdekat, apabila dilihat dari sisi pembayaran pajak yang biasanya dilakukan

oleh masyarakat seperti di kelurahan, bank Jatim, mobil keliling pajak yang dilakukan dengan uang cash atau uang secara langsung, maka dalam program bayar pajak dengan sampah berbeda, karena masyarakat yang mengikuti program bayar pajak dengan sampah, masyarakat diharuskan untuk mengumpulkan sampah terlebih dahulu sebelum bisa digunakan untuk membayar pajak PBBnya.

d. *Triability* atau Kemungkinan dicoba

Layak atau tidaknya sebuah program atau kegiatan yang dilakukan pemerintah tentu masih membutuhkan uji coba terlebih dahulu, dalam pelaksanaannya, program bayar pajak dengan sampah sebelum dapat berjalan ada sebuah uji coba program dan itu perlu dilakukan untuk melihat bagaimana potensi dan kendala apa saja yang akan terjadi kedepannya, apakah sebuah program atau kegiatan dapat dilakukan atau tidak, hal tersebut merupakan juga sebagai cara apakah kalau dilaksanakan dapat berhasil atau justru gagal. Karena kegagalan sebuah program atau kegiatan dapat saja terjadi sehingga perlu dilakukan pemetaan yang matang sebelum diluncurkan dan dikonsumsi oleh masyarakat secara luas.

Kelayakan sebuah inovasi apakah dapat diimplementasikan dan dikonsumsi oleh publik, dapat terlihat ketika inovasi dalam pelaksanaan uji coba terdapat hal positif yang muncul dari apa yang telah ditetapkan atau direncanakan diawal kegiatan, sehingga dengan adanya kemungkinan diuji coba dilingkup kecil, inovasi yang akan dimunculkan untuk masyarakat luas

dapat berjalan dengan baik. Sebuah inovasi yang dapat diuji coba menandakan bahwa inovasi tersebut mempunyai power yang layak untuk dilaksanakan ke dalam lingkup yang lebih luas. Dalam fase uji publik masyarakat yang dijadikan sasaran untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terkait dengan adanya inovasi, respon masyarakat sebagai pengguna inovasi memiliki nilai sangat penting, karena memang inovasi ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, apabila dalam uji coba respon masyarakat tidak mendukung maka sebuah inovasi dapat dikatakan gagal sebelum dilaksanakan dan dikonsumsi publik secara luas, hal tersebut sejalan dengan apa yang telah diungkapkan oleh Suwarno (2008:78) menyatakan bahwa “penyelenggaraan inovasi pelayanan publik harus mendapat dukungan dari masyarakat”, dukungan berarti apresiasi dari masyarakat terhadap segala sesuatu yang menurutnya layak dan baik untuk diikuti.

Peluncuran program bayar pajak dengan sampah dilakukan pada tahun November 2016, dan baru bisa dilaksanakan pada awal Januari 2017. Sebelum program bayar pajak dengan sampah diluncurkan, pernah dilakukan sebuah percobaan untuk melihat bagaimana potensi kedepannya, dan pada saat itu memang sudah tersedia beberapa bank sampah yang sudah berdiri di wilayah Kota Mojokerto, sehingga pelaksanaan uji coba lebih mudah karena sudah tersedia wadahnya untuk dilakukan uji coba, menurut bu Nur , pak Edi staf bidang penataan dan pentaatan DLH, kasubbid BPPKA, dan kapid pendataan BPPKA pak Yahya mengungkapkan yang pada intinya sebelum pelaksanaan

program bayar pajak dengan sampah, pernah dilakukan uji coba program terlebih dahulu yang dilakukan di beberapa bank sampah cabang yang pada saat itu sudah berdiri dan melakukan aktifitas mengumpulkan sampah dari masyarakat, uji coba dilakukan lebih kepada penawaran, pengenalan atau sosialisasi mengenai tujuan dan maksud program bayar pajak dengan sampah program, oleh BPPKA kepada para kader bank sampah yang sudah berdiri yang sebelumnya sudah melakukan aktifitas pengelolaan sampah dari masyarakat secara rutin di lingkungannya, dan juga pemberian wawasan kepada para kader atau pengurus bank sampah cabang mengenai cara pembayaran pajak serta pendataannya.

Kegiatan uji coba yang telah dilakukan tersebut seperti yang diungkapkan oleh Roger yang dikutip dalam Suwarno (2008:17) mengungkapkan bahwa Sebuah inovasi yang diciptakan mempunyai kemudahan untuk diujicoba kualitasnya hal tersebut untuk membuktikan bahwa inovasi yang diciptakan mempunyai keuntungan dan nilai lebih dari inovasi sebelumnya. Atribut inovasi *triability* mempunyai makna bahwa sebuah inovasi mempunyai kemampuan untuk diuji coba, apakah inovasi yang dimunculkan mempunyai kelayakan atau tidak untuk dilaksanakan atau diimplementasikan, karena sebuah inovasi akan dikonsumsi oleh masyarakat luas, namun sampai kapan inovasi tersebut dilaksanakan, baik itu dilaksanakan secara berkelanjutan artinya akan dilaksanakan secara terus menerus atau hanya diwaktu tertentu

saja, tergantung bagaimana sebuah inovasi mampu bertahan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat secara umum.

Berdasarkan keterangan dari narasumber dan pemaparan teori bahwa kedua hal tersebut memiliki korelasi, bahwa salah satu ciri atau atribut inovasi dalam program bayar pajak dengan sampah sudah dilaksanakan hal tersebut dibuktikan dengan adanya uji coba program dimana pada saat uji coba program dilakukan di beberapa bank sampah di RT/RW yang sebelumnya sudah melaksanakan aktifitas pengelolaan sampah secara berkelanjutan, dan responnya cukup baik, setelah diuji coba bank sampah diberikan sosialisasi dan diberikan pemahaman, cara pembayaran dan pendataan mengenai program bayar pajak pakai sampah yang akan dilaksanakan.

e. Kemudahan untuk diamati atau *observability*

Inovasi agar dapat dikenali oleh masyarakat, maka masyarakat harus mengetahui bagaimana inovasi itu berjalan dan tentang berbagai hal yang telah melekat didalam sebuah inovasi, sehingga masyarakat akan mengetahui lebih jelas seluk beluk inovasi yang telah muncul, dan juga cara kerjanya apakah dapat menghasilkan manfaat yang baik yang atau tidak terlebih dapat bermanfaat bagi pengikut atau penggunanya. Program bayar pajak dengan sampah merupakan sebuah program dari yang memiliki beberapa manfaat seperti yang diungkapkan oleh Bu Nur dan Pak Yahya yang pada intinya mengungkapkan bahwa program bayar pajak pakai sampah bermanfaat bagi masyarakat, kemudahan pembayaran pajak, juga secara tidak langsung

membuat lingkungan sekitar menjadi semakin bersih karena sampahnya yang biasanya diproduksi oleh masyarakat tidak dibuang sembarangan karena memiliki nilai ekonomis, sehingga manfaatnya kemudahan dalam membayar pajak dan lingkungan juga kembali kepada masyarakat sendiri, hal tersebut sejalan dengan pengertian inovasi dari Oslo dalam Zuhaili (2013:58) inovasi memiliki aspek yang luas karena dapat berupa barang maupun jasa, proses, metode pemasaran atau metode organisasi yang baru atau telah mengalami pembaharuan yang pernah dihadapi oleh organisasi, inovasi bayar pajak pakai sampah memiliki perubahan proses dimana pembayaran pajak semakin mudah karena memakai sistem menabung, dan dari sisi lingkungan juga semakin bersih karena sampah di buat untuk membayar pajak, sehingga sampah berubah memiliki nilai ekonomis

Berdasarkan Pendapat dari narasumber sejalan menurut teori Roger yang dikutip oleh Suwarno (2008:17) mengungkapkan bahwa Sebuah inovasi yang juga harus mempunyai kemampuan untuk diamati dari segi bagaimana inovasi tersebut berjalan untuk menghasilkan kemanfaatan. Manfaat yang diperoleh dari adanya program bayar pajak dengan sampah sudah jelas bahwa memang dalam program ini memberikan berapa manfaat bagi masyarakat yang mengikuti seperti dari sisi kemudahan membayar pajak dan dari sisi lingkungan

Berdasarkan pemaparan dari narasumber dan pendapat dari teori tersebut diatas memiliki korelasi bahwa inovasi bayar pajak dengan sampah memiliki manfaat, dimana manfaat tersebut teretak pada masyarakat yang mengikuti

program bayar pajak dengan sampah, diantaranya adalah masyarakat akan mendapatkan kemudahan dalam membayar pajaknya, dan lingkungan sekitar juga akan menjadi bersih karena sampah tidak lagi dibuang begitu saja.

1. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat inovasi Bayar Pajak dengan Sampah Sebagai Upaya Meningkatkan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Di Kota Mojokerto.

a. Faktor Pendukung

Pelaksanaan sebuah inovasi tentu ada sebuah faktor yang membuat membuat inovasi yang ada dapat berjalan dan terlaksana dengan baik, maka faktor tersebut merupakan faktor pendukung, dimana faktor pendukung dalam pelaksanaan inovasi sangat penting keberadaannya, karena tidak adanya faktor pendukung sebuah inovasi tidak akan bisa berjalan dan terimplementasi dengan baik.

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lakukan mengenai program bayar pajak dengan sampah dapat menemukan ada beberapa faktor pendukung yang menjadi faktor pendukung dalam program bayar pajak dengan sampah seperti ada adanya peran pemimpin dan dinas lingkungan hidup, dan bank sampah induk, keberadaan bank sampah, dan hadiah umroh gratis, dan peningkatan PBB perkotaan. Salah satu faktor pendukung dalam program bayar pajak dengan sampah tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sumarto (2009:100) mengemukakan bahwa ada tujuh

faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu inovasi dalam mendorong terwujudnya *good governance* yaitu:

1. Faktor lingkungan yang meliputi krisis, demokrasi, dan kesempatan politik yang lebih kondusif terhadap perubahan,
2. Keberadaan arsitek inovasi dan pemimpin bervisi
3. Dukungan dari komunitas internasional maupun dukungan dari pemerintah
4. Partisipasi warga
5. Dukungan dan pertukaran rekan sejawat.
6. Struktur manajemen,
7. Insentif

Sesuai dengan apa yang sudah diungkapkan oleh Sumarto diatas mengenai faktor pendukung inovasi, dalam program bayar pajak pakai sampah memiliki faktor pendukung, faktor pendukung dalam program bayar pajak pakai sampah salah satunya adalah keberadaan pemimpin yang bervisi, pelaksanaan program bayar pajak pakai sampah juga tidak terlepas dari keberadaaan pemimpi dimana pemimpin tersebut adalah pak Masud Yunus Walikota Mojokerto yang memiliki Visi dan misi yang mengarah kepada memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakatnya, misi tesebut terletak pada misi yang kedua dari ke-5 misi yang ada, yaitu menciptakan menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi, dimana hal tersebut tersirat dalam program bayar pajak dengan

sampah, program tersebut membuat pembayaran pajak menjadi ringan karena memakai sampah dan juga bisa ditabung dibuku tungan sampah, serta akses pembayaran pajak juga semakin mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Karena pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat dilakukan melalui bank sampah terdekat yang sudah berada di RT/RW setempat.

Berdasarkan penjelasan dari teori dan keterangan dari narasumber memiliki korelasi dimana faktor pendukung menurut Sumarto (2009:100) salah satunya terdapat Keberadaan arsitek inovasi dan pemimpin bervisi, keberadaanya juga dalam program bayar pajak pakai sampah memiliki salah satu faktor pendukung dari peran seorang pemimpin dan pihak terkait (DLH dan bank sampah) dalam program bayar pajak dengan sampah di Kota Mojokerto, dimana peran pemimpin tersebut adalah berasal dari Misi dari Walikota Mojokerto yang menciptakan menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi.

b. Faktor Penghambat

Inovasi dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari faktor yang membuat inovasi tersebut tidak bisa berjalan dengan maksimal dalam pelaksanaannya, faktor tersebut merupakan faktor penghambat, sehingga dengan adanya faktor penghambat akan berdampak pada tujuan awal yang sudah direncanakan sebelumnya. Faktor penghambat tidak selalu bersumber dan terdapat didalam organisasi, namun faktor penghambat juga

terdapat diluar organisasi, dimana sebuah program saat berjalan dilapangan yaitu dalam lingkungan masyarakat yang kondisinya tidak bisa diprediksi, maka dari itu perlu dipertimbangkan lebih matang dalam menghadapi faktor penghambat dari lingkungan eksternal organisasi faktor penghambat dalam program bayar pajak dengan sampah hanya terletak pada masih rendahnya partisipasi masyarakat yang mengikuti program bayar pajak dengan sampah dan banyak ban sampah yang belum siap, karena memang tidak semua masyarakat menerima dan menyambut baik dengan adanya program bayar pajak dengan sampah, mungkin masyarakat yang tidak mengikuti kurang tau pentingnya bayar pajak dengan sampah serta banyak banyak bank sampah yang masih baru berdiri sehingga belum siap , keberadaan bank sampah, hal tersebut telah diungkapkan oleh kabid pendataan dan kasubid pendataan dan penetapan BPPKA.

Faktor penghambat dalam sebuah program inovasi terletak bagaimana respon dari penerima atau masyarakatnya, karena sebuah program atau kegiatan dari pemerintah hanya ditujukan kepada masyarakat secara umum, apabila partisipasi sedikit maka program inovasi tersebut akan sia sia. Partisipasi yang dimaksud adalah menurut Sumarto (2009:153) yaitu partisipasi dalam pembuatan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam menerima manfaat, dan partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program bayar pajak dengan sampah masih rendah hal tersebut dibuktikan dari data 1221 wajib

pajak tahun 2017 yaang sudah terdaftar menjadi anggota bank sampah, sedangkan realisasi masyarakat yang mengikuti program bayar pajak dengan sampah sekitar 525 wajib pajak atau sekitar 48%.

Berdasarkan pejelasan dari pendapat ahli dan teori memiliki korelasi bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan sebuah program adalah dari partisipasi masyarakat, karena partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung setiap kegiatan dari yang pemerintah keluarkan, partisipasi masyarakat dalam program bayar pajak juga masih rendah karena masih banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi atau mengikuti program bayar pajak dengan sampah,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas penelitian yang dilakukan tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai inovasi bayar pajak dengan sampah sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan perkotaan di Kota Mojokerto. Sebagai berikut:

1. Bagaimana inovasi bayar pajak dengan sampah sebagai upaya meningkatkan pendapatan PBB perkotaan di Kota Mojokerto
 - a. Keuntungan Relatif (*Relative advantage*): inovasi bayar pajak dengan sampah memiliki beberapa keunggulan yaitu dapat mempermudah dan meringankan masyarakat dalam membayar pajak karena hanya dengan mengumpulkan sampah, masyarakat bisa menabung secara berkala sampai pembayaran pajak ditetapkan oleh kelompok bank sampah, akses dalam pembayaran pajak PBB semakin dekat, serta dapat membuat lingkungan sekitar juga menjadi lebih bersih
 - b. Kesesuaian (*Compatibility*): sebelum dan sesudah adanya inovasi bayar pajak pakai sampah masih memiliki kesesuaian dalam hal melaksanakan pembayaran pajak PBB yaitu wajib pajak membawa SPPT bisa melalui ke kelurahan, bank Jatim atau mobil keliling pajak kemudian dikasih bukti pembayaran pajak asli, sedangkan setelah adanya inovasi bayar pajak dengan sampah masyarakat dalam pembayaran pajak PBB bisa dilakukan melalui kelompok bank sampah

yang ada di RT/RW setempat dengan memberikan SPPT dan buku tabungan sampah kepada kelompok bank sampah, kemudian dikasih bukti pembayaran PBB asli. Yang membedakan hanya caranya, yaitu harus mengumpulkan sampah ke bank sampah terlebih dahulu sebelum akhirnya bisa digunakan untuk membayar pajak.

- c. Kerumitan (Complexity): inovasi bayar pajak dengan sampah dalam pelaksanaannya tidak memiliki kerumitan sama sekali, hal tersebut dikarenakan tidak ada persyaratan khusus dalam mengikuti program bayar pajak dengan sampah, masyarakat hanya perlu mendaftarkan diri sebagai anggota bank sampah, setelah terdaftar masyarakat baru bisa mengikuti program bayar pajak dengan sampah dengan mengumpulkan sampah ke bank sampah terlebih dahulu.
- d. kemungkinan dicoba (*Triability*): sebelum pelaksanaan inovasi bayar pajak dengan sampah pernah dilakukan uji coba, uji coba dilaksanakan di beberapa kelompok bank sampah yang saat itu memang sudah ada dan melakukan aktifitas kebersihan lingkungan, kelompok bank sampah pun mendukung dan masyarakat menyambut dengan baik, setelah itu kelompok bank sampah tersebut diberikan sosialisasi terkait teknis pembayaran dan pendataan dalam program bayar pajak pakai sampah, sebelum benar benar diluncurkan.
- e. Kemudahan untuk diamati (*Observability*): manfaat yang terdapat dalam program bayar dengan sampah khususnya bagi masyarakat akan semakin mudah dan ringan membayar pajaknya, karena pembayaran pajak cukup

menabung dengan sampah, serta hal tersebut dapat membuat lingkungan sekitar bersih karena sampah tidak dibuang sembarangan, karena sampah semenjak adanya program bayar pajak dengan sampah, sampah menjadi memiliki nilai ekonomis untuk digunakan membayar pajak.

2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan inovasi bayar pajak dengan sampah sebagai upaya meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan perkotaan di Kota Mojokerto Faktor pendukung:

- (1) Peran pemimpin dan pihak terkait (DLH dan Bank Sampah Induk)

Kebeadaan inovasi bayar pajak pakai sampah tidak terlepas dari peran seorang pemimpin, yaitu walikta Mojokerto, dimana visi misinya memiliki pengaruh terhadap kemunculan inovasi bayar pajak dengan sampah, hal tersebut juga terlihat kehadiran walikota pada saat penimbangan sampah secara tidak langsung dapat memberikan contoh kepada masyarakat. Peran pihak terkait seperti DLH dan bank sampah juga menjadi pendukung dalam pelaksanaan inovasi bayar pajak dengan sampah.

- (2) Keberadaan bank sampah

Keberadaan bank sampah sangat penting, karena bank sampah dalam program bayar pajak dengan sampah sebagai tempat masyarakat untuk mengumpulkan sampah dan membayar pajak bagi masyarakat yang mengikuti program bayar pajak dengan sampah.

- (3) Harga sampah lebih mahal: sampah yang dijual ke bank sampah memiliki harga jual sedikit lebih mahal apabila dibandingkan dengan harga sampah yang dari pembeli keliling, karena bank sampah induk bekerja sama dengan pengepul besar atau pabrik.
- (4) Hadiah umroh gratis: bagi yang mengikuti program bayar pajak dengan sampah diberikan 1 hadiah umroh guna mendorong masyarakat agar lebih antusias dalam membayar dan melunasi pajak PBBnya sebelum ulang tahun Kota Mojokerto, karena pembayaran pajak PBB sebelum ulang tahun kota tanggal 19 juni diberikan 1 undian hadiah umroh gratis bagi yang mengikuti program bayar pajak dengan sampah.
- (5) Peningkatan PBB perkotaan: Pelaksanaan inovasi bayar pajak dengan sampah pada Tahun 2017 memiliki kontribusi terhadap peningkatan PBB pada tahun 2017, namun kontribusi terhadap peningkatan PBB masih sangat kecil yaitu sebesar 58 juta dari 9 milyar realisasi penerimaan pajak PBB tahun 2017, persentase antara target dan realisasi penerimaan PBB 2017 justru mengalami penurunan dari tahun tahun sebelumnya dan target dari PBB tidak terpenuhi/terrealisasi

3. Faktor penghambat:

- (1) Partisipasi masyarakat masih rendah: partisipasi masyarakat yang mengikuti program bayar pajak dengan sampah masih rendah, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat partisipasi pembayaran pajak yang hanya 585 dari 1221 orang yang sudah terdaftar sebagai anggota bank sampah yang memutuskan untuk

ikut program bayar pajak dengan sampah, melalui bank sampah terdekat yang sudah berdiri di RT/RW setempat.

- (2) Bank sampah belum merata: pada saat pelaksanaan program bayar pajak dengan sampah masih banyak bank sampah yang belum bisa membayar pajak PBB hal tersebut dikarenakan banyak bank sampah yang masih baru berdiri. Hanya ada 31 bank sampah yang sudah berdiri dan melakukan pembayaran PBB, dan ada sekitar 80 bank sampah yang baru berdiri sehingga belum bisa membayar PBB dengan adanya program bayar pajak dengan sampah.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan pembahasan dan analisis terhadap penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti memiliki saran sebagai berikut:

1. Pemerintah seharusnya tidak terburu buru dalam meluncurkan program bayar pajak dengan sampah, karena hal tersebut menyebabkan pelaksanaan program tidak bisa maksimal sehingga banyak kelurahan di kecamatan Kota Mojokerto yang belum bisa memanfaatkan program bayar pajak dengan sampah, dikarenakan bank sampah belum ada di RT/RW, bank sampah dalam hal ini sebagai tempat pembayaran pajak keberadaanya masih belum merata di Kota Mojokerto dan banyak yang masih dalam proses pembentukan, sehingga hal tersebut berdampak hanya ada 31 bank sampah yang melakukan pembayaran PBB, sisanya masih ada 80 bank yang belum bisa melaksanakan pembayaran PBB, dikarenakan masih banyak yang baru dan baru terbentuk pada tahun 2017.

2. Bagi masyarakat apabila sudah terdaftar sebagai anggota bank sampah dan mengikuti program bayar pajak dengan sampah seharusnya diteruskan dan konsisten untuk mengikuti program bayar pajak dengan sampah dengan mengumpulkan sampah berkala sampai pada saat pembayaran ditentukan
3. Bagi pengurus atau kelompok bank sampah agar terus mendorong dan memberitahukan kepada masyarakat terkait dengan adanya program bayar pajak dengan sampah, agar masyarakat mengetahui bahwa pembayaran pajak bisa melalui bank sampah dengan mengumpulkan sampah terlebih dahulu. Serta memberikan gambaran bahwa ada banyak jenis sampah yang bisa dijual di bank sampah, dan harganya lebih baik sehingga masyarakat dapat tertarik mengikuti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas Mohamad, Endang Haris, Zenal Aripin.2010. *Pendidikan Lingkungan Hidup untuk smp/mts kelas VII*. Jakarta: Erlangga.
- Ancok, Djamaludin. 2012. *Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi*. Jakarta: Erlangga
- Abdul, Halim dan Mujib, Ibnu. 2009. *Problem desentralisasi dan perimbangan keuangan pemerintah pusat-daerah peluang dan tantangan dalam pengelolaan sumber daya daerah*.Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM
- Alex. 2011. *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Buku profil Sampah Kota Mojokerto Tahun 2016
- Profi Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset tahun 2016
- BPS Kota Mojokerto. 2017. Kota Mojokerto Dalam Angka. Mojokerto: BPS Kota Mojokerto Diakses dari <http://mojokertokota.bps.go.id> pada 9 Januari 2018 Pukul 9.36 WIB.
- Creswell, John W. 2009. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Edisi ke 3. Dialihahasakan oleh Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Direktorat Jendral Pajak. 2012. Pengalihan pajak bumi dan bangunan perkotaan. Diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/pengalihan-pbb-perdesaan-dan-u-perkotaan> pada 31 Novermber 2017 pukul 15.00 WIB.
- Djaenuri, Aries. 2014. *Hubungan Keuangan Pusat Daerah, Elemen-Element Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*.Cet ke-2. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Djohan dan Halim. 2013. *Pengelolaan Limbah Rumah Sakit*. Jakarta: Salemba Medika.
- Dovadan, Deny dan Amanah, lailatul. 2015. *Strategi Pemungutan PBB Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Mojokerto*, Jurnal Ilmu Dan Riset Akutansi Vo .4 No. 11

Gelbert M, Prihanto D, dan Suprihatin A. 1996. Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart". Malang: PPPGT/VEDC.

Global News. Berkat Program Umroh dan Kasih Setia, Pemkot Mojokerto Berpeluang Raih Adipura. diakses dari <http://global-news.co.id/2017/06/berkat-program-umroh-dna-kasih-setia-pemkot-mojokerto-berpeluang-raih-adipura/> pada 23 Februari 2018 pukul 19.30 WIB pada 23 Februari

Halim, Abdul. (2008). *Akutansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba empat

Hamdi, Asep Saepul. E. Bahrudin. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublisher.

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Kemendagri. Postur APBD. Dikases dari <http://keuda.kemendagri.go.id/datin/index/1/2016>. Pada 29 November 2017 14.30 WIB

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik

Moleong J.Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kaulitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakary.

Mojokertokota.go.id. *Visi Misi Kota Mojokerto*. Dikases melalui <http://www.mojokertokota.go.id/> pada tanggal 28 Januari 2018

Notoatmodjo, soekidjo, 2007. *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah

Perda Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Rahayu, Siti Kurnia dan Suhayati, Ely. 2010. *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Resmi, S. 2014. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Rarasri.2016. *Kontribusi sampah terhadap pemanasan Global*(dicetak ulang oleh Pusat pengendalian pembangunan ekoregional kalimantan lingkungan hidup dan kehutanan). Kalimantan: pusat pengendalian pembangunan ekoregional kalimantan lingkungan hidup dan kehutanan
- Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Tahun 2014-2019.
- Sari, Diana.2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung:Refika Aditama.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Impementasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sosial media Instagram bpka diakses melalui @ bppkakotamojokerto
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.2009. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Susyanti Jeni dan Dahlan Ahmad. 2015. *Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empat Dua Media.
- Suwarno, Yogi. 2008. *Inovasi Di Sektor Publik*. Jakarta: STIA-LAN Press
- Sumarto, Hetifah Sj. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Sulistio, Budi dan Budi Waspa Kusuma. 2009. *Birokrasi Publik: Perspektif Ilmu Administrasi Publik*. Bandar Lampung: CV.Badranaya.
- Tarigan, Kharisma Wanta. 2013. Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pbb Terhadap Penerimaan Pajak Di KPPP Pratama Kota Manado., jurnal EMBA, Vol. 1 No.3
- Tim Pusat Inovasi Administrasi Negara. 2014. *Hanbook Inovasi Administrasi Negara*. Jakarta Pusat: PUSAT INTAN-DIAN-LAN
- Tribunnews surabaya. 2016. Berkat Barang Buangan ini Target Pendapatan Pajak Kota Mojokerto Terpenuhi. Diakses dari <http://surabaya.tribunnews.com/2016/11/15/berkat-barang-buangan-ini-target>

pendapatan-pajak-kota-mojokerto-terpenuhi. Pada 31 November 2017 dan 8 Februari 2018

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah

Undang -undang Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Zuhal. 2013. *Gelombang Ekonomi Inovasi: kesiapan Indonesia berselancar di era ekonomi baru*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama